

Ikhtiar MengIndonesiakan
NTB
Edisi Ke-2

Judul:

Ikhtiar MengIndonesiakan NTB Edisi Ke 2

Penulis:

Rosiady Husaenie Sayuti

Layout:

Fatia Hijriyanti

Design Sampul:

Nurul Haromain

Design Isi:

Fatia Hijriyanti

Penerbit:

Mataram University Press

Jln. Majapahit No. 62 Mataram-NTB

Telp. (0370) 633035, Fax. (0370) 640189, Mobile Phone +6281917431789

e-mail: upt.mataramuniversitypress@gmail.com

website: www.uptpress.unram.ac.id.

Cetakan Pertama, Desember 2020

ISBN: 978-602-8487-36-8 (Edisi Pertama)

ISBN: 978-623-7608-77-6 (Edisi Ke-2)

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang memperbanyak, sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk dan dengan cara apapun, tanpa izin penulis dan penerbit.

KATA PENGANTAR

Tidak terasa, *subhanallah*, terbitan pertama buku saya yang berjudul “Ikhtiar MengIndonesiakan NTB” telah berlalu enam tahun, sejak tahun 2014. Waktu itu, menjelang perayaan ulang tahun NTB yang ke 56, saya melaunching terbitnya buku tersebut. Buku yang merupakan buah tangan saya dari hasil perenungan, refleksi, dan pengalaman, dan mungkin juga evaluasisaya.

Ketika menghadiri perayaan HUT NTB di lapangan ex Bandara Selaparang, buHj. Erika Majdi, isteri Bapak TGB, Gubernur NTB kala itu, mengatakan pada saya “Pak Ros, saya tidak tidur semalam, gara-gara membaca sampai selesai bukunya pak Ros,” kata beliau... “Bagus bukunya, ringan dibacanya...” Lanjutnya. Tentu saya senang sekali mendengar itu. Kayaknya saya *speechless* waktu itu, hanya tersenyum dan menyampaikan terimakasih saya atas sanjungan beliau. Tentu bukan hanya beliau yang membacanya. TGB juga, harap saya. Banyak kolega, handai tolan dan para pemerhati pembangunan di NTB merasa terhibur dengan hadirnya buku itu. Termasuk kawan saya, Farid Tolomundu yang menginspirasi saya untuk menuliskan berbagai pengalaman dan ‘bacaan’ saya selama menjadi birokrat, khususnya ketika menjadi “ketua para perencana pembangunan di NTB” alias Kepala Bappeda. Karena Bappeda adalah dapur perencanaan pembangunan, sekaligus menjadi evaluatornya.

Kini, setelah 6 tahun berlalu, dan saya kembali ke kampus, ke dunia akademik, salah seorang kawansaya, Bapak Ir. H. Tajidan, MS... mengatakan pada saya. “Pak Ros, mengapa tidak pak Ros revisi buku yang pak Ros pernah tulis ketika di Pemdadulu, kemudian terbitkan ulang. Kan bisa menjadi kredit

point,” kata beliau. “Bapak juga bisa menambahkan data atau informasi baru yang nyambung dengan tulisan itu. Sehingga ada juga unsur kebaruannya.” Tanpa fikir panjang, maka jadilah Edisi Ke 2 ini, yang saya kerjakan beberapa hari. Mulai dari mencari file-file, yang alhamdulillah masih tersimpan rapi di *blogspot* saya. Kemudian mencari tambahan informasi yang relevan untuk saya jadikan *suplemen* buku ini. Menghubungi mahasiswa saya, Maman dan Isnan, untuk membantu merapikan kumpulan tulisan ini dan mengeditnya, membuat sampulnya, dan terakhir menghubungi Unram Press untuk menerbitkannya.

Setelah saya baca-baca kembali, ternyata betul. Tulisan-tulisan yang saya terbitkan ulang dalam buku ini saya yakin masih relevan untuk menjadi bahan bacaan para pemerhati pembangunan, ataupun juga para akademisi dan para mahasiswa yang sedang belajar tentang makna pembangunan. Berbagai proses dan tahapan pembangunan dari waktu ke waktu, khususnya dalam kurun waktu sepuluh tahun TGB Dr. KH Muhammad Zainul Majdi menjadi Gubernur NTB (2008-2018) menjadi tergambar, seolah ada di depanmata. Prestasi demi prestasi yang diraih, baik di bidang ekonomi, sosial dan budaya menjadi catatan yang akan tertulis dengan tinta emas pada waktunya nanti. Mungkin tidak pada hari ini. Karena yang namanya sejarah, tentu akan ditulis jauh setelah peristiwa ituterjadi.

Terimakasih dan penghargaan saya yang tak terhingga kepada mereka yang telah menginspirasi saya sehingga buku ini bisa terbit kembali. Ibunda, isteri, anak-anak, para menantu dan cucu-cucu serta adik-adik saya. Penghargaan yang tak terhingga juga kepada Bapak Tuan Guru Bajang, Dr. TGKH Muhammad Zainul Majdi, yang telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk berhidmat di Pemerintah

Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, sejak dilantik menjadi Kepala Bappeda NTB tanggal 6 Oktober 2008, sampai dengan saya mencukupkan kiprah saya sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tanggal 20 Mei 2019. Sebuah pengalaman yang luar biasa indah, dan semoga juga barokah, insha Allah. Saya taklupa juga menyampaikan penghargaan dan terimakasih yang tulus kepada Rektor Universitas Mataram, Bapak Prof. Dr. Lalu Husni, SH.,M.Hum, yang telah menerima saya kembali untuk melanjutkan pengabdian saya di kampus Univeritas Mataram tercinta setelah lebih dari sepuluh tahun sayatinggalkan. Demikian juga kepada para kolega saya, baik di jajaran Pemerintah Daerah maupun di Kampus Universitas Mataram, yang dengan keberterimaan mereka, hidup saya menjadi terasa bermakna. Dimanapun saya berada.

Akhirnya kepada Allah SWT semua pengabdian ini dan rasa syukurini penulis pasrahkan.

Wallahu a'lam bissawab. Wallahulmuwafiq walhaadi ilaasyabilirrosyad.

Mataram, 27 Nopember 2020

Penulis

Rosiady Sayuti

PENGANTAR EDISI Ke-1

Memerlukan waktu yang cukup panjang untuk ‘menemukan’ judul untuk buku saya ini. Ada beberapa alternatif yang muncul atau dimunculkan oleh beberapa teman. Tentu yang berasal dari judul-judul tulisan saya yang terangkum dalam buku ini. Ada beberapa yang terasa ‘cocok’. Intinya yang langsung dapat mengesankan atau memberikan pemahaman kepada pembacanya bahwa tulisan ini, sebagian besarnya adalah ‘oleh-oleh’ atau kenang-kenangan saya selama hampir lima tahun menjadi Kepala Bappeda Nusa Tenggara Barat.

Ketika memulai tugas menjadi Kepala Bappeda, salah satu pertanyaan saya kepada teman-teman di Bapeda, adalah terkait soal majalah Info Bappeda yang diterbitkan, kalau tidak salah sejak pak Nanang Samodra menjadi Kepalanya. Dalam perjalanannya kemudian saya usulkan agar nama majalahnya diganti dengan “Akselerasi” dimana dalam setiap terbitannya saya ‘memaksa’ diri untuk menorehkan tulisan. Itu artinya kesempatan saya, untuk menulis semakin bertambah. Ada ada saja gagasan atau mimpi-mimpi yang muncul dibenak saya kala itu dan kemudian menjadi sebuah tulisan. Mungkin benar yang tertulis dalam buku “the Secret” bahwa kala manusia itu terpojok, atau terpaksa, pasti akan keluar tenaganya, akalnya, atau fikirannya dan dalam hal ini kemudian, adalah tulisannya.

Tulisan-tulisan itulah yang terkumpul dalam buku ini. Ditambah dengan tulisan-tulisan saya yang lain, yang umumnya sudah saya publikasikan, apakah lewat media maya atau media dunia nyata, dikoran-koran terbitan lokal, seperti Lombok Post dan Suara NTB. Dengan demikian, tidaklah berlebihan jika dikatakan buku ini kumpulan kisah, pemikiran,

ataupun kesan saya selama hampir lima tahun memimpin Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Barat, sejak 6 Oktober 2008 hingga 25 Agustus 2013. Sebuah perjalanan yang cukup panjang, hampir lima tahun.

Berbagai pengalaman dan kisah yang saya alami langsung, maupun pemikiran gagasan yang timbul dari berbagai peristiwa yang terjadi, sudah tertuangkan dalam buku ini. Mulai dari ceritera penampilan perdana saya dalam Musrenbang RPJMD 2009-2013, berbagai peristiwa seputar tugas dan fungsi saya selaku Kepala Bappeda Provinsi, hingga ceritra perjalanan yang saya ikuti sebagai bagian dari tugas dinas yang harus saya laksanakan.

Berbagai kisah sukses dari perjalanan lima tahun kepemimpinan Bapak Tuan Guru Bajang sebagai gubernur NTB, seperti turunnya angka kemiskinan, diresmikannya Bandara International Lombok, dibangunnya Islamic Center yang menjadi dambaan umat Islam di daerah ini, mulainya dibangun dam-dam besar di NTB, seperti Pandandure, Rababaka Komplek, Bintang Bano, serta meningkatnya secara signifikan kemandirian jalan nasional dan provinsi, adalah 'peristiwa' sejarah yang harus kita catat bersama. Kita catat bukan hanya dalam bentuk tulisan, seperti yang ada dalam buku ini, namun lebih dari itu. Kita patut mencatatnya sebagai bagian yang indah dalam memori kita masing-masing, yang akan kita ceritakan secara turun temurun. Sebagai bagian dari rasa bangga kita memiliki pemimpin yang dicintai oleh rakyatnya. Sebagai bagian dari rasa syukur kita, yang telah dikaruniai Allah SWT daerah dan negara yang damai dan insya Allah membawa kesejahteraan.

Ada juga tulisan dalam buku ini yang merupakan kesan dan kenangan dari bepergian keluar negeri, mengikuti seminar atau menjadi pembicara di berbagai seminar internasional,

seperti di Belanda, Canada, Filipina, dan Australia. Bagi saya, mengikuti seminar dan terlebih menjadi pembicara di berbagai ajang yang sifatnya akademik menjadi semacam “recharging” agar dunia asli saya sebagai akademisi tidak hilang bersama perjalanan birokrasi administrasi yang saya lalui saat itu.

“MERAJUT RENCANA: Ikhtiar meng-Indonesiakan NTB” dimaknakan bahwa berbagai perencanaan dan ihtiar yang telah dilaksanakan tidak lain dimaksudkan untuk mencapai berbagai target yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Target-target tersebut, seperti penurunan angka kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap kebutuhan dasar, dan lain-lain, diharapkan dapat membawa NTB mendekati angka rata-rata nasional. Bahkan untuk beberapa indikator dapat berada di atas rata-rata nasional. Dengan kata lain agar keberadaan NTB tidak kalah dibandingkan dengan daerah-daerah lain di tanah air.

Atas terbitnya buku ini, ijinakan saya mengucapkan terima kasih kepada beberapa Pihak yang telah berkontribusi dalam mengantar terbitnya buku ini. Kepada Gubernur NTB, Bapak Dr. TGH M Zainul Majdi, atas kesan atau komentarnya setelah membaca draf buku ini. Berikutnya kepada saudara Farid Tolomundu yang telah memberikan inspirasi kepada saya untuk membukukan tulisan tulisan saya selama menjadi Kepala Bappeda, dan sekaligus berkenan menjadi editornya. Juga kepada saudara M Zakiy Mubarok dan kawan-kawan di Larispa yang menjadi teman diskusi di sela sela kesibukan saya di kantor. Wabil khusus ucapan terima kasih sekaligus permohonan maaf kepada isteri saya, Hj Ikhsanty Komala Rimbun yang kalau sekali-sekali ikut menemani saya bepergian, tidak bisa banyak jalan jalankarena pada saat-saat bepergian keluar daerah itulah tulisan-tulisan ini lahir. Pada

saat saat keluar daerah itulah saya memiliki waktu yang cukup untuk menulis. Bahkan saya kadang juga menulis (baca: melaptop menetik dengan laptop) di atas pesawat terbang.

Demikian juga kepada kolega saya di Bappeda Provinsi NTB, yang selama hampir lima tahun menjadi saudara dan sahabat saya dalam berkhidmat sebagai perencana dalam membangun Nusa Tenggara Barat, saya juga ucapkan terima kasih. Buku ini lahir, juga atas dukungan mereka. Kepada anak-anak saya, Silmi Rosmala Hayati dan suaminya Lalu Jaga Adubangga, Ahia Zakira Rosmala, Muhammad Ihsan Sayuti, dan Iman Rasyid Sayuti, yang selalu memberikan motivasi dan menginspirasi saya dalam bekerja, saya juga ucapkan terima kasih. Saya juga berharap mereka dapat terinspirasi dari buku ini untuk dapat meniru bapaknya, suka menulis dan mempublikasikan tulisannya. Karena saya percaya bahwa sesederhana apapun sebuah tulisan yang dipublikasikan, pasti akan ada manfaatnya bagi masyarakat pembaca.

Akhirnya kepada Allah SWT kita berpasrah diri, teriring doa semoga kita selalu mendapat taufik dan hidayahNya. Dan buku yang ada di hadapan pembaca ini, bermanfaat adanya.

Wallahulmuwafiq walhaadi ilaasyabilirrosad.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Mataram, Oktober 2020

Penulis

Rosiady Sayuti

SEKAPUR SIRIH GUBERNUR NTB KE-7

"Ikhtiar" itulah kata kunci membangun NTB. ada dalam kata itu makna gerak, kesungguhan, komitmen, selalu memilih yang terbaik, dan kesadaran / keyakinan akan pertolongan Allah SWT. Buku ini menggambarkan sekelumit ikhtiar yang telah dilaksanakan dalam memajukan NTB.

Dan NTB masih memerlukan ikhtiar yang lebih kuat lagi. Untuk kemajuan kita bersama. Semoga Allah selalu merahmati.

Nidm M. Zainul Majidi
11/11/14

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
KATA PENGANTAR	v
PENGANTAR EDISI Ke-1	viii
SEKAPUR SIRIH GUBERNUR NTB KE-7	xii
DAFTAR ISI	xiii
Prolog: Makna “MengIndonesiakan” NTB	xvi
Membangun dan Menginspirasi	1
Membangun Berbasis IPTEK	1
Sistem Inovasi Daerah dan DRD	6
Air Mengalir di Era TGB	10
Antara TGB dan Islamic Center	14
Islamic Center dan Peradaban Islam	21
BIL, Mandalika, Pandan Dure dan Divestasi	25
PON, Embarkasi, Jalan, Apalagi?	31
Merajut Rencana, Mengejar Prestasi	37
Angka Kemiskinan NTB Turun Lagi	37

Setelah Kemiskinan dan Drop Out Sekolah Turun, Lalu?.....	43
UN 2015 dan Pertaruhan Kejujuran	48
UN 2016 dan Indeks Integritas.....	52
Belajar dari “Indonesia Mengajar”.....	56
Menuju Generasi Emas NTB 2025.....	61
Generasi Emas 2025.....	63
Empat T, oleh-oleh dari Eropah.....	66
BIL Operasional, NTB Take Off, InshaAllah.....	70
Nihil Temuan Pemeriksaan	75
Merintis Kerjasama Dengan Belanda	78
GO Internasional	83
Membangun Diantara Mimpi dan Visi	87
Sayangi Mataram: Satu Kelurahan Satu Miliar, Mungkinkah?	88
Membangun Visi Kota	92
Membangun Tanpa Uang Negara.....	96
Membangun Singapura Besar Bernama Lombok.....	100
LECI, Meniru Singapura dan China.....	104
Mempersiapkan RPJMD 2009-2013: NTB BerSaing	109
Tampaksiring Summit	116

Gagasan Untuk Masa Depan	119
Membangun Mataram Berbasis Kota Cerdas.....	120
Menyederhanakan SPJ	124
Satu NTB Satu Data	129
Menuju Birokrasi Klas Dunia	133
Indonesia Terpaksa Maju: Bagaimana dengan NTB?.....	137
ARSA dan Presentasi di Filipina	142
Catatan Kecil dari Calgary, Canada	146
World Class Research University	150
Epilog: Industrialisasi dan Mimpi Gubernur NTB.....	155

Prolog: Makna “MengIndonesiakan” NTB

Ketika mengumumkan kesediaannya untuk maju kembali menjadi Gubernur NTB periode kedua tahun 2013-2018 pada tanggal 16 Oktober 2012 lalu, Dr. TGH M. Zainul Majdi menjelaskan tiga alasan utamanya. Pertama, kata beliau, karena dorongan dari berbagai lapisan masyarakat yang menghendaki beliau untuk tampil kembali, dengan berbagai alasan. Kedua, karena ingin melanjutkan ikhtiar untuk menuntaskan berbagai program yang telah berjalan dan sudah mulai dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Ketiga, ungkap beliau, dan ini yang menarik menurut saya, “saya ingin memperbaiki positioning NTB di tingkat nasional.” Dengan bahasa lain, beliau ingin mengangkat derajat dan martabat Nusa Tenggara Barat agar sejajar dengan daerah-daerah lain di Indonesia, yang sudah lebih maju. Katakanlah mengambil provinsi terdekat kita, Provinsi Bali, atau Jawa Timur.

Mengapa Bali dan juga Jawa Timur, atau provinsi lainnya di bagian barat Indonesia demikian maju pesat, jauh meninggalkan provinsi lain di Indonesia Bagian Timur, termasuk NTB, NTT, Maluku, dan lain-lain, karena selama ini politik anggaran di Indonesia menggunakan azas jumlah penduduk. Karena daerah-daerah di Indonesia bagian timur ini jumlah penduduknya jauh lebih sedikit dari daerah bagian

barat Indonesia, maka jumlah dana yang digelontorkan pusat ke provinsi di bagian barat jauh lebih besar dibandingkan dengan yang ke bagian timur. Dengan besaran dana seperti itulah yang kemudian menyebabkan berbagai fasilitas infrastruktur di KBI jauh lebih baik dari daerah-daerah KTI. Akibatnya, investasi yang masuk ke KBI jauh lebih banyak, dibandingkan dengan investasi di KTI.

Bukti paling ‘anyar’ terkait masalah ‘positioning’ ini adalah struktur pendanaan dalam proyek MP3EI. Kalau dilihat dari besaran total investasi yang diperlukan (baca:dialokasikan) untuk tiga provinsi yang masuk dalam koridor V, yaitu Bali, NTB, dan NTT; maka yang paling sedikit adalah Bali. Namun, kalau dilihat dari proporsi APBNnya, maka Bali lah yang paling banyak. Makanya, tidak mengherankan kalau pada tahun 2012-2013 ini, suasana Bali hiruk pikuk dengan proyek MP3EI, khususnya konektivitas, sementara NTB dan NTT masih adem ayem.

Itulah salah satu contoh, betapa ‘positioning’ Bali di tingkat nasional, harus kita akui, jauh lebih baik di bandingkan dengan kita di NTB ataupun NTT. Dan itulah saya kira, yang dimaksudkan oleh TGB ketika menyatakan akan maju lagi dalam Pilkada NTB 2013 yang akan datang.

Beliau menyadari, apa yang telah beliau lakukan selama ini, sejak menjadi gubernur NTB 2008 yang lalu, beliau rasakan masih bisa untuk ditingkatkan. Meskikita, rakyat NTB, sudah menikmati BIL, bypass menuju BIL, yang insya Allah akan diperpanjang sampai Kota Mataram, bendungan Pandan duri Swangi juga sudah memasuki fase konstruksi utama, APDN yang megah akan segera nampak di Lombok Tengah, Embarkasi dan disembarkasi penuh haji, jalan negara mulus dari Ampenan sampai Sape, dan lain-lain, yang kesemuanya itu tidak mungkin terjadi tanpa turun tangan Gubernur secara

langsung ke pusat; namun beliau menganggap posisi tawar NTB di pusat masih belum maksimal. Masih banyak ikhtiar yang harus ditingkatkan, agar berbagai agenda besar membangun NTB ini dapat segera terwujud. Ada bendungan Rababaka Komplek di Dompu, Dam Mujur Dua di Lombok Tengah, Bintang bano di KSB, perpanjangan runway dan perluasan bandara Salahuddin Bima dan Kaharuddin Sumbawa, pembangunan Global Hub di Kayangan KLU, pembangunan kawasan Samota (Teluk Saleh, Moyo, dan Tambora), kajian jalan alternatif Mataram - Lombok Timur yang sudah sangat padat, membangun Mataram Metro sebagai gerbang wisata nasional, meningkatkan daya tarik berbagai destinasi wisata andalan di NTB, dan lain-lain.

Demikian pula ikhtiar untuk mewujudkan masyarakat NTB yang beriman dan berdaya saing. Tentu pekerjaan yang tidak mudah dan memerlukan waktu yang panjang. Membuat perencanaan dan melaksanakan serta pada waktunya mengevaluasi apakah tingkat kecerdasan dan daya saing para pelajar, mahasiswa, dan pemuda NTB telah meningkat atau malah jalan di tempat, tentu perlu waktu. Tidak mungkin dapat diketahui dalam waktu setahun dua tahun. Karena memang, investasi di sektor pendidikan dan kesehatan itu, menurut para pakar, adalah *long term investment*.

Kalaupun dalam empat tahun terakhir ini NTB telah berhasil menurunkan angka buta huruf, angka drop out sekolah, pengangguran, angka kematian bayi, dan lain-lain, tentu merupakan modal awal yang baik untuk melangkah ke peningkatan kualitas sumber daya manusia. Lima tahun ini tentu berbagai program yang dilaksanakan masih dalam rangka meletakkan dasar yang kokoh dan memperbanyak mereka yang terkena sasaran program. Belum banyak bicara

daya saing, atau kualitas. Istilah TGB, kita belum banyak bisa bicara soal “marwah.”

Kata “marwah” itulah yang beliau ungkapkan ketika mentargetkan sepuluh medali emas dalam PON yang baru baru ini berhasil diraih. Melalui potensi dan perjuangan keras para atlet, ternyata kita mampu menaikkan posisi NTB dalam kancah olah raga nasional. Melalui olah raga itulah, masyarakat Indonesia kemudian mengetahui dan mengakui beradaan NTB dalam percaturan olah raga nasional. Pada akhirnya, kita berada pada posisi ke 12 (yang PON sebelumnya rangking 26) dalam deretan provinsi-provinsi peraih medali, adalah sesuatu yang patut dibanggakan. Artinya NTB telah menempatkan dirinya di atas rata-rata nasional. Ada dua puluh provinsi lain yang posisinya di bawah posisi NTB.

Posisi NTB dalam berbagai sektor pembangunan juga terus membaik. Penghargaan demi penghargaan dapat diraih di bidang koperasi, ketenagakerjaan, transmigrasi, pariwisata, bahkan infrastruktur jalan dan tata ruang juga terus meningkat. Dari posisi yang tidak disebutkan, dapat meningkat menjadi posisi yang disebutkan; apakah dalam peringkat lima besar, juara tiga bahkan juara satu. Di bidang bina marga misalnya, tahun lalu NTB menempati peringkat ketiga se Indonesia. Ini karena kebijakan percepatan jalan provinsi dan komitmen pemerintah daerah lainnya, terkait dengan pemeliharaan jalan dan jembatan yang menjadi kewenangan provinsi. Tahun 2012 ini, NTB masuk nominasi 3 besar dalam bidang tata ruang. Konon juara satu, insya Allah. NTB juga telah ditetapkan menjadi pilot percontohan pembangunan jalan provinsi yang didukung Australia dengan nilai investasi sampai 1,2 T dalam kurun waktu lima tahun, sejak 2013.

Demikian pula halnya dalam bidang penanggulangan kemiskinan, penanganan masalah ketenagakerjaan,

penciptaan kewirausahaan baru, dan lain-lain. Posisi NTB terus membaik. Namun semua itu belum cukup untuk mempercepat laju pembangunan di NTB, sehingga kemiskinan dan pengangguran menjadi terentaskan. Belum cukup untuk meningkatkan kapasitas fiskal di NTB seperti yang direncanakan dalam RPJMD, sehingga semua program tertunda; belum cukup untuk menambah dana pusat yang masuk ke NTB atau untuk menarik dana investasi non pemerintah sebanyak-banyaknya ke NTB, sehingga semua tenaga kerja di pekerjakan.

Artinya, menurut perspesi TGB, masih perlu kerja lebih keras lagi untuk memperbaiki positioning NTB di tingkat nasional. Sehingga, jalan-jalan provinsi dan kabupaten yang ada di NTB menjadi seratus persen mantap; arus barang dan jasa menjadi makin lancar; kawasan mandalika dan pariwisata lainnya mulai terbangun, dan bandara kita menjadi makin ramai dengan tujuan penerbangan dalam dan luar negeri makin banyak pula. Pertumbuhan ekonomi juga makin baik dengan makin banyaknya industri olahan hasil pertanian di setiap kabupaten kota di NTB; jumlah turis mancanegara maupun nusantara makin melimpah, sehingga masyarakat pelaku wisata menjadi meningkat kesibukan dan penghasilannya. Dengan kata lain, posisi ekonomi NTB sama atau bahkan di atas rata-rata posisi ekonomi nasional.

Itulah saya kira, yang dimaksudkan oleh TGB, dengan bahasa, meningkatkan posisi NTB di kancah nasional yang dalam bahasa penulis, “mengindonesiakan NTB” atau mensejajarkan NTB dengan daerah-daerah lainnya. Tidak lagi berada “di bawah rata-rata nasional.” Kalau kondisi NTB sudah seperti itu, maka tidaklah perlu lagi warga NTB mengais rizki di negeri orang hanya untuk menyambung hidupnya dan keluarganya. Bahkan orang dari luar NTB yang akan berlomba-

lomba mendatangi NTB, untuk mendapatkan penghasilan yang layak dan penuh berkah, seiring dengan masuknya para investor seperti yang mulai terjadi akhir-akhir ini, insha Allah. Wallahu 'alambissawab. (2012)



Membangun dan Menginspirasi

Ikhtiar
mengIndonesiaikan
NTB
Edisi Ke 2

Membangun Berbasis IPTEK

Banyak hal yang sangat menarik dan membedakan perayaan Hari Ulang Tahun NTB yang ke 56 tanggal 17 Desember kemarin. Disamping ada terjun payung oleh para penerjun dari TNI Angkatan Udara, juga diberikan penghargaan kepada warga NTB yang telah berprestasi di berbagai bidang. Salah satu bidang tersebut adalah bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Ada kelompok mahasiswa Universitas Teknologi Sumbawa yang menang dalam lomba International Genetically Engineered Machine di Boston, Amerika Serikat; ada yang mendapatkan penghargaan dalam ajang International Children's Art Exhibition, ada yang berhasil menemukan beragam teknologi tepat guna, seperti Mobile Switch Controller, Desain Kompor Gas, Tandon Air Teron (Taron), Mesin Pengereng Gabah/jagung, dan penemu oven kopi, dan lain-lain. Beberapa tahun yang lalu ada anak SMA yang menemukan cara ngecas HP sambil berjalan, ada yang dapat mengubah arus listrik dari AC ke DC dan sebaliknya. Mungkin masih banyak lagi deretan inovasi yang telah ditelorkan oleh anak-anak kita dari NTB.

Hal tersebut menunjukkan bahwa anak bangsa dari NTB tidak kalah dibandingkan dengan anak-anak dari daerah lain, dalam hal inovasi berbasis ilmu pengetahuan. Ini adalah suatu modal utama yang perlu dikelola dalam rangka menuju apa yang disebut oleh teman-teman dari Kementerian Ristek, Knowledge Base Community, atau masyarakat berbasis ilmu

pengetahuan. Masyarakat yang dalam kesehariannya selalu akrab dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan kata lain, masyarakat yang ramah IPTEK. Kalaupun hingga saat ini NTB masih dalam urutan bawah terkait ranking IPM, tidak berarti kita tidak boleh mengejar daerah lain dalam hal penguasaan ilmu pengetahuan dan pemanfaatan IPTEK dalam membangun daerah. SDM kita yang berkualitas relatif banyak. Baik yang berada di Perguruan Tinggi yang ada di NTB, maupun di lembaga-lembaga penelitian di daerah ini. Dan sesungguhnya, ikhtiar kita untuk ke arah itu sudah dimulai, dengan dicanangkannya Sistem Inovasi Daerah (SIDa) di NTB oleh Menteri Riset dan Teknologi RI, Prof. Gusti Muhammad Hatta pada tahun 2012 yang lalu di kawasan RPH Banyuwilek. Teknologi yang diluncurkan sebagai unggulan SiDa di NTB kala itu adalah IB sexing. Dengan teknologi tersebut, peternak dapat mengikhtiarkan jenis kelamin anak sapi yang diinginkan. Jantan atau betina. Belakangan Unram juga dipercaya untuk menjadi Center of Excellence Pengembangan Ternak Besar di kawasan Nusa Tenggara, mengalahkan pesaingnya dari Universitas Udayana dan Nusa Cendana

Apa itu SIDa?

Untuk mendorong daerah dan masyarakat menjadi ramah IPTEK, artinya mampu menjadikan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai alat yang dipergunakan dalam membangun, Kementerian Riset dan Teknologi memiliki program yang dikenal dengan SIDa, atau Sistem Inovasi Daerah. SIDa ini

merupakan sebuah pola pendekatan pembangunan daerah yang dilakukan secara sistemik dan sistematis. Melalui pendekatan pembangunan SIDa ini, akan tumbuh di daerah daya inovasi dari masyarakat, yang 'dipancing melalui suatu teknologi tertentu untuk pengembangan suatu kooditas tertentu.

NTB dengan potensi bibit sapi yang sudah dikenal luas di Indonesia, harus dapat mempertahankan dan mengembangkan diri sedemikian rupa, dengan berbagai cara, agar gelar sebagai gudang bibit sapi tersebut dapat berkelanjutan. IB sexing, yang diperkenalkan sebagai salah satu teknologi untuk pengembangan bibit sapi tersebut, haruslah kemudian memasyarakat. Tidak sampai uji coba di laboratorium saja. Demikian pula teknologi lainnya, seperti teknologi pakan ternak dan sarana produksi lainnya.

Demikian juga dalam hal pengembangan komoditas unggulan lainnya, seperti jagung dan rumput laut. Pengembangan komoditas tersebut tidak dapat lagi dilaksanakan secara tradisional. Baik untuk meningkatkan jumlah secara kuantitatif, maupun dalam rangka kita memperbaiki mutu atau kualitas. Hasil-hasil penelitian selama ini yang terkait dengan hal tersebut harus dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya. Kalangan PT atau para peneliti di lembaga-lembaga penelitian harus secara sadar, memperkenalkan teknologi yang mereka miliki. Interaksi antara para peneliti dengan para pengguna teknologi, para petani, hendaknya menjadi lebih intens lagi. Di sisi lain, sikap ramah ilmu pengetahuan dan teknologi, hendaknya menjadi sikap masyarakat kita secara keseluruhan. Indikatornya adalah secepat apa masyarakat kita dapat mengadopsi teknologi yang relevan dengan kebutuhan mereka dalam memproduksi. Indikator lainnya adalah seperti apa budaya baca masyarakat kita sekarang ini. Karena budaya baca atau budaya tulis ini merupakan salah satu persyaratan bagi terwujudnya masyarakat yang ramah IPTEK (*knowledge based community*).



Kehadiran SIDA di daerah hendaknya dapat dimanfaatkan untuk menuju masyarakat yang ramah IPTEK. Teknologi yang dikembangkan melalui SIDA ini juga tentu tidak terbatas pada apa yang telah dilaksanakan di awal berdirinya SIDA yang kebetulan dukungan dananya juga berasal dari Kementerian Ristek. Idealnya, SIDA ini terus dikembangkan menjadi program daerah, yang sumber pendanaannya berasal dari APBD. Baik provinsi maupun kabupaten/kota. Karena manfaatnya sudah sangat jelas, dalam rangka meningkatkan produktivitas masyarakat. Disamping itu, melalui SIDA ini juga akan meningkatkan daya saing daerah. Tujuan lainnya adalah dalam rangka menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk menarik investor. Pada saat yang sama, dengan SIDA ini diharapkan dapat terwujud adanya kebijakan yang berlandaskan asas keberlanjutan dan berwawasan lingkungan. Bukan sekedar 'running bussiness as usual.' Wallahu a'lam bissawab.

Sistem Inovasi Daerah dan DRD

Salah satu dokumen strategis yang diwariskan oleh rezim pemerintahan SBY adalah berupa Kesepakatan Bersama antara Menteri Riset dan Teknologi dengan Menteri Dalam Negeri untuk mengembangkan Sistem Inovasi Daerah. Dokumen tersebut ditanda tangani pada saat upacara Hari Otonomi daerah tanggal 25 April 2012.

Apa itu SIDA?

Sistem Inovasi Daerah atau yang disingkat SIDA adalah sebuah sistem yang dikembangkan oleh para pakar di daerah dalam rangka mempercepat tercapainya target-target pembangunan khususnya yang berorientasi produk lokal yang berdaya saing. Dengan sentuhan ilmu pengetahuan dan teknologi, melalui kegiatan penelitian dan pengembangan, diharapkan akan ditemukan sebuah inovasi yang dapat menjadikan sebuah produk lokal bernilai global. Produk yang dapat bersaing di pasar global. Dengan bahasa yang lebih sederhana, suatu produk yang memiliki daya jual ke luar daerah bahkan ke luar negeri (ekspor).

Dengan adanya, apalagi dalam jumlah besar, produk lokal yang bisa diekspor, atau minimal dijual ke luar daerah, tentu akan memiliki nilai tambah terhadap pendapatan masyarakat setempat. Apalagi kemudian nilai investasi di daerah tersebut bertambah, tentu *multiflyer effect* nya

terhadap pendapatan masyarakat setempat akan semakin bertambah pula. Pada gilirannya, akan menjadi daya ungkit tersendiri terhadap pertumbuhan ekonomi daerah setempat.

Sebagai contoh, ketika SIDA di NTB di canangkan oleh Menristek dan Gubernur NTB di kawasan pengembangan ternak Banyuwulek akhir 2012 yang lalu, di uji cobakan sebuah inovasi inseminasi seksing, yang intinya adalah peternak dapat memilih jenis kelamin sapi yang mau diinseminasikan. Apakah jantan atau betina. Menurut laporan teman-teman peneliti dari LIPI yang terlibat dalam kegiatan tersebut, keberhasilan inseminasi seksing tersebut diatas 85 persen. Artinya, sebagian besar sapi yang lahir dari proses inseminasi tersebut sesuai dengan harapan peternak yang sapinya diinseminasi.

Pengembangan teknologi tersebut sangat strategis bagi NTB, sebagai daerah yang telah memilih komoditas sapi sebagai salah satu komoditas unggulannya. Perlibatan Fakultas Peternakan Unram dan LIPI dalam pengembangan Progam BSS adalah salah satu bentuk komitmen Pemda NTB dalam pengembangan SIDA. Demikian juga keterlibatan Dewan Riset Daerah selama ini. Meskipun dengan proporsi anggaran yang terbatas, namun kerjasama para pihak selama ini telah menghasilkan berbagai produk strategis yang pada waktunya akan mengangkat nama daerah sebagai provinsi meletakkan iptek sebagai bagian dari landasan pembangunannya.

DRD dan SIDA

Secara umum fungsi Dewan Riset Daerah adalah memberikan sumbangan pemikiran kepada kepala daerah terkait dengan berbagai persoalan pembangunan daerah. Secara teknis, fungsi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

- (1) Memantau kemajuan pemanfaatan, pengembangan dan penguasaan berbagai cabang IPTEK di daerah;
- (2) Merumuskan prioritas dan berbagai aspek kebijakan penelitian, pengembangan dan penerapan (Litbangtrap) Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) bagi pembangunan daerah
- (3) Mengkaji prioritas dan mengagendakan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah dalam mendayagunakan sumber daya riset dan teknologi secara efektif di daerah
- (4) Menyusun prioritas utama riset dan teknologi di daerah khusus yang terkait dengan penelitian, pengembangan dan rekayasa untuk memperkuat perwujudan otonomi daerah di bidang IPTEK demi keberhasilan pembangunan di daerah
- (5) Memberi pertimbangan kepada Pemerintah Daerah untuk memecahkan masalah pembangunan daerah yang berkelanjutan melalui riset dan teknologi
- (6) Mengambil prakarsa untuk membangun Pusat Basis Data Sumber Daya Daerah sebagai titik simpul dari Jaringan Sistem Informasi Nasional, serta Pusat Teknologi Daerah sebagai inkubator industry kecil menengah yang berbasis IPTEK, dan
- (7) Berperan sebagai brain trust, sounding board, pressure group dan moral support bagi stakeholder.

Dari uraian tentang fungsi DRD di atas, maka adalah suatu keniscayaan ketika alokasi anggaran untuk kegiatan DRD diberikan secara proporsional sesuai dengan kebutuhan daerah akan pengembangan berbagai potensi yang dimiliki. Dengan anggaran penelitian yang memadai, tentu

akan dapat dihasilkan berbagai inovasi yang relevan dengan potensi daerah yang ada. Selanjutnya berpulang kepada SKPD terkait untuk mengembangkannya lebih lanjut, menjadi komoditas laik pasar, yang pada gilirannya mensejahterakan masyarakat. Insya Allah.

Air Mengalir di Era TGB

Ketika memberikan arahan kepada jajaran Bappeda NTB menjelang Musrenbang Provinsi NTB 2014, Bapak Gubernur, Dr. TGH M Zainul Majdi menyatakan bahwa: “kita sudah dapat melaksanakan dengan baik tugas kita terkait dengan infrastruktur jalan. Saya ingin, lima tahun ke depan, kita dapat menyelesaikan tugas kita untuk meningkatkan akses masyarakat terkait air bersih. Masih banyak anggota masyarakat kita di desa-desa, khususnya daerah Lombok Selatan yang masih kesulitan dengan air. Khususnya pada bulan-bulan tertentu. Bahkan kadang-kadang itu menjadi alasan mereka tidak shalat. Karena tidak ada air untuk berwudlu. Nah, kalau itu kita biarkan, tidak ada upaya untuk mengatasi, maka kita tentu ikut berdosa. Saya sebagai gubernur juga ikut dosa.” Sebuah ungkapan yang tulus dari seorang pemimpin yang agamis. Yang faham betul tanggung jawabnya sebagai seorang pemimpin umat.

Persoalan air memang masih merupakan persoalan di sebagian desa-desa kita yang berada di wilayah selatan pulau Lombok dan beberapa wilayah di Pulau Sumbawa. Memang tidak sepanjang tahun. Tapi pada bulan-bulan tertentu, banyak keluarga yang harus mengangkut air dari sumbernya yang jaraknya satu sampai tiga kilometer.

Ketika menemani Prof. Emil Salim ke beberapa desa binaan WFP di wilayah Lombok selatan dua tahun yang lalu, beliau melihat sendiri berbagai infrastruktur air bersih yang telah terbangun; namun banyak yang sudah tidak fungsional

lagi. Dari wawancara singkat dengan beberapa warga, dapat disimpulkan bahwa masyarakat setempat mungkin sudah tidak lagi mempersoalkan kondisi dan situasi yang dihadapi. Semua sudah dianggap biasa. Mengambil air dengan jarak yang relatif jauh, dianggap sudah biasa. Kalaupun kemudian, seperti yang diceriterakan oleh Pak Gubernur, mereka tidak menjalankan kewajibannya karena tidak ada air untuk berwudhu, juga mungkin dianggap biasa. *Nauzubillah.*

Yang menjadi persoalan adalah, apabila pemerintah, yang nota bene memiliki tanggung jawab untuk menyediakan infrastruktur sumberdaya air bagi warganya, menyerah begitu saja terhadap hal tersebut. Memang, sudah sekian banyak program pemerintah telah dilaksanakan untuk mengatasi persoalan air bagi masyarakat, khususnya di daerah-daerah kering. Baik program yang sumbernya APBN maupun bantuan luar negeri. Namun hingga kini, belum ada yang benar-benar sustain, yang benar-benar dapat membuat air mengalir sampai ke rumah, sepanjang tahun. Padahal dari segi potensi sumberdaya air yang dimiliki, khususnya di Pulau Lombok, semestinya air yang ada, volumenya cukup memadai. Indikasinya, masih banyak air sungai kita yang mengalir begitu saja hingga ke laut tanpa ada intervensi untuk memanfaatkannya, baik sebagai air irigasi ataupun air bersih.

Oleh karena itu, apa yang Bapak Gubernur risaukan dan arahkan kepada para perencana pembangunan di NTB, merupakan sesuatu yang sangat strategis dan harus dapat dilaksanakan. Menurut data BPS NTB, untuk daerah perkotaan, kondisi akses masyarakat terhadap air bersih pada tahun 2013 adalah 79,35%, sedangkan daerah perdesaan 71,42%. Dari kondisi tersebut, menurut perencanaan dalam RPJMD NTB 2013-2018, diharapkan pada tahun 2018 akan dapat

meningkat, paling tidak menjadi 87,56% untuk daerah perkotaan dan 81,87% untuk daerah perdesaan.

Untuk mencapai, bahkan kalau mungkin melampaui target tersebut, harus segera disusun roadmap percepatan peningkatan akses masyarakat terhadap air bersih Nusa Tenggara Barat; kemudian diproses menjadi peraturan daerah. Kalau NTB sukses menjadi nomor tiga nasional dalam bidang kebinamargaan, atau pembangunan infrastruktur jalan raya, karena didukung Perda multiyears, saya kira untuk percepatan peningkatan akses masyarakat terhadap air bersih juga dapat dilaksanakan dengan pola yang sama. Sehingga jelas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama tiga sampai lima tahun ke depan, dan berapa anggaran yang dibutuhkan. Sehingga kalau untuk buta aksara kita mengenal istilah Absano atau angka buta aksara nol, terkait sanitasi kita mengenal BASNO (Buang air sembarangan nol) maka lima tahun ke depan, mengapa kita tidak bertekad membuat MAsyarakat yang Tidak memiliki Akses terhadap air berSIH NOL atau boleh disingkat MATASIHNO.

Dengan Gerakan Matasihno, atau apapun namanya, masyarakat di daerah yang selama ini kesulitan dengan air, khususnya pada musim-musim panas, akan mendapatkan akses air yang relatif sama dengan masyarakat di desa atau daerah lain di NTB. Dalam lima tahun ke depan tidak akan ada lagi warga yang tidak bisa shalat karena tidak ada air untuk berwudlu. Tidak perlu lagi ada ibu-ibu atau anak-anak remaja harus mengambil air sepanjang satu sampai tiga kilometer. Tidak boleh lagi ada warga kelas dua, karena akses terhadap air, di daerah ini. Karena semua kita, memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk mendapatkan pelayanan minimum. Termasuk di dalamnya, hak terhadap layanan air bersih. Caranya adalah dengan memaksimalkan sumberdaya

yang ada, baik teknologi maupun finansial. Sehingga di era TGB ini, air benar-benar dapat mengalir sampai ke rumah-rumah, di seluruh wilayah NTB, dan sepanjang tahun. Insya Allah (Jkt, 250414).

Antara TGB dan Islamic Center

Islamic Center adalah salah satu cita cita panjang masyarakat Nusa Tenggara Barat. Gagasan pembangunan Islamic Center ini sendiri telah diwacanakan semenjak Nusa Tenggara Barat dipimpin oleh Jenderal Warsito. Kemudian mengemuka lebih intens ketika Gubernur Harun Alrasyid. Waktu itu wacananya bahkan sudah mengarah kepada lokasi, yaitu di jalan udayana, sehingga akan menjadi ikon NTB. Setiap orang yang datang dari luar NTB, yang mendarat di bandara Selaparang, maka pemandangan pertama mereka adalah bangunan Islamic Center.

Namun menjadi lebih serius, ketika Gubernur Lalu Serinata memimpin Nusa Tenggara Barat. Pada waktu itu, dibentuklah panitia pembangunan Islamic Center yang diketuai oleh Walikota Mataram Muhammad Ruslan. Saya sendiri masuk dalam kepanitiaan, sebagai salah seorang koordinator bidang sosialisasi. Sementara koordinator bidang perencanaan pembangunannya diserahkan ke Prof Hadi, Dekan Fakultas Teknik Universitas Mataram.

Saya juga ikut ketika panitia mengadakan studi banding ke beberapa Islamic Center yang sudah ada, yaitu ke Mesjid Agung Surabaya dan Almarqaz Al Islami di Makassar, Sulawesi Selatan. Beberapa anggota panitia yang ikut studi banding tersebut diantaranya Lalu Wardi dari Bappeda, Pak h sukardi dari BKKBN, Prof Hadi dari Unram, dan lain-lain. Sekembali

dari studi banding tersebut, panitia cukup intensi mengadakan pertemuan untuk membahas rencana lokasi yang akan diusulkan untuk menjadi tempat pembangunan IC tersebut. Pada akhirnya, panitia kemudian merumuskan tiga alternatif lokasi dengan segala kelebihan dan kekurangannya.

Yang pertama adalah di areal sekitar Gedung KONI Mataram, bersebelahan dengan Masjid Raya Attaqwa Mataram. Kelebihannya lokasinya berada di Jalan Protokol, berdekatan dengan areal yang berpenduduk padat, yaitu kelurahan Dasan Agung. Cuma harus menghapuskan gedung olahraga; dari segi luas areal, tidak seluas alternatif kedua, yaitu areal eks gedung kantor bupati lombok barat, di jalan sriwijaya. Persoalannya areal eks kantor bupati adalah milik pemda lombok barat. Belum tentu pemda lombok barat mau menyerahkan tanah yang menjadi asetnya untuk pembangunan IC dengan cuma-cuma. Karena tentu mereka sangat berkepentingan untuk menjadikan asetnya sebagai salah satu sumber pendapatan. Artinya mereka pasti akan mau menyerahkan asetnya kalau dibeli. Pada waktu itu memang sedang ada negosiasi dengan pihak ketiga untuk proses jual beli atau tukar guling aset tersebut.

Alternatif ketiga adalah di lahan yang menjadi milik provinsi di jalan lingkar selatan. Kelebihannya jika memilih lokasi ini adalah luasnya dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan. Karena di daerah tersebut belum ada bangunan, masih berupa sawah. Ini meniru pembangunan Masjid Agung Surabaya, yang dibangun di luar kota surabaya. Kekurangannya jika memilih lokasi tersebut, maka akan perlu waktu yang lama baru bisa terisi. Seperti halnya mesjid agung surabaya, untuk menjangkaunya, harus menggunakan kendaraan. Sementara di sekitarnya pada waktu itu pemukiman masih belum banyak.

Kalau tidak salah, sampai di situlah panitia pembangunan tersebut bekerja. Setelah itu, laporan di serahkan ke gubernur. Dan tidak ada lagi undangan-undangan untuk mengadakan rapat rapat. Hanya plang panitia yang tetap bertahan di depan pendopo walikota mataram. Namun aktivitas panitia menjadi vakum, sampai dengan penggantian Gubernur NTB dari Lalu Serinata kepada Tuan Guru Bajang, TGKH Muhammad Zainul Majdi, MA pada tanggal 17 September 2008, yang bertepatan dengan 17 Ramadhan 1430 H.

Wacana pembangunan Islamic Center itu sendiri tidak lagi muncul. Itu sebabnya dalam RPJMD NTB 2009-2013 tidak tercantum. Karena kawan-kawan di Bappeda sendiri tidak lagi mendiskusikan atau mewacanakan pembangunan IC tersebut. Bahkan sampai kemudian Prof Hadi meninggal dunia, panitia pembangunan tidak lagi eksis.

Barulah hidup lagi menjelang Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang Provinsi tahun 2009 wacana pembangunan Islamic Center muncul lagi. Di sela-sela arena Musrenbang yang dihadiri oleh hampir seluruh bupati walikota se NTB, Bapak TGB, selaku Gubernur NTB menyampaikan secara resmi dan meminta persetujuan para Bupati Walikota terkait rencana beliau untuk memulai pembangunan Islamic Center tersebut dengan lokasi di areal Gedung KONI dan sekitarnya. Bahkan menurut pak Gubernur waktu itu, tidak hanya Koni yang dibebaskan, namun juga gedung SPMA dan SMPN 6 Mataram. “kita perlu areal yang agak luas. Sehingga nantinya bangunan IC tersebut akan dapat juga dilihat dari Jalan Udayana,” kata pak Gubernur. Para Bupati dan Walikota secara aklamasi menyetujui dan mendukung. Bahkan bapak H. Muhammad Ruslan, walikota Mataram mengatakan “saya siap

mendukung, bahkan nanti kalau sudah jadi, biar saya yang jadi merbotnya,” kata beliau dengan bersemangat.

Ada tiga alasan, mengapa TGB memilih areal KONI sebagai lokasi pembangunan IC NTB. Pertama, kata beliau pada saya ketika mendiskusikan rencana pembangunan IC tersebut, supaya IC ini benar-benar berada di jantung Kota Mataram. Jangan dipinggiran. “saat ini, kalau kita berjalan dari Ampenan sampai Narmada, tidak ada bangunan mesjid yang dapat kita banggakan sebagai simbol bahwa kita mayoritas. Mesjid Attaqwa sendiri sekarang sudah tenggelam, dimana posisi jalan raya lebih tinggi dari mesjid itu sendiri. Sehingga kalau orang luar datang ke Mataram, tidak bisa menyimpulkan kalau sesungguhnya islam adalah agama mayoritas di daerah ini. Oleh karena itu areal Konilah menurut saya yang paling pas. Dan jangan hanya KONI, tapi juga terus ke timur, di areal SPMA dan SMP 6. Sehingga benar-benar IC itu berdiri di jantung kota Mataram; bisa terlihat dari dua jalan utama, Jalan Langko dan Udayana.” Kata beliau, ketika pertama kali beliau menanyakan soal rencana pembangunan IC dengan saya. Waktu itu saya dipanggil sendirian, sebagai Kepala Bappeda yang juga kebetulan ikut dalam kepanitiaan pembangunan IC yang dibentuk Gubernur Lalu Serinata.

Alasan kedua, jika kalau di areal KONI, maka pasti jemaah yang ada di Mesjid Raya akan otomatis menjadi jemaah IC. Artinya, kita tidak perlu khawatir akan kekurangan jemaah. Apabila kita membangun di tempat lain, apalagi di jalan lingkar yang masih sepi, maka belum tentu akan langsung terisi. Harus menunggu perkembangan pemukiman penduduk sekian lama dulu, baru akan terisi.

Yang ketiga, menurut beliau, di IC tersebut nantinya harus berdiri juga lembaga pendidikan Islam yang berkelas dunia. Bukan hanya mesjid. Karena itu maka lokasinya harus

berada di tempat yang mudah di akses bagi anak-anak yang nantinya akan menjadi murid di situ.

Minaret 99

Satu lagi yang beliau sarankan untuk pembangunan IC, yaitu “di bangunan mesjid itu harus ada menaranya yang tinggi, yang tingginya sekitar seratus meteran,” kata beliau. “sehingga benar-benar menjadi ikon Mataram atau NTB. Yang monumental.” Dari gagasan beliau itulah yang kemudian berkembang menjadi Minaret 99, dimana tinggi menara yang menjadi simbol IC NTB tersebut didesain secara keseluruhan sampai ujungnya adalah 114 meter dan dek yang dapat dinaiki adalah 99 meter. Dari ketinggian 99 meter ini pengunjung akan dapat menikmati keindahan kota Mataram. Dengan kata lain saya ingin menceritakan bahwa gagasan Minaret 99 itu adalah murni dari Bapak Gubernur NTB, Bapak TGB KH Muhammad Zainul Majdi, MA.

Mekanisme Pembangunan

Setelah TGB mengemukakan rencana akan dimulainya pembangunan IC di hadapan para Bupati/Walikota, barulah kemudian mulai dibahas secara intens oleh para fihak, Bappeda, Dinaas PU, Biro Umum, dan lain-lain terkait dengan proses perencanaan dan pembangunan IC tersebut. Salah satu topik yang didiskusikan adalah apakah mekanisme pembangunan yang akan dipilih. Apakah pembangunan akan dilaksanakan oleh panitia pembangunan atau oleh SKPD terkait. Mekanisme ini akan menentukan bentuk panitia pembangunan yang akan disusun.

Saya teringat, salah seorang mantan panitia pembangunan IC sebelumnya, yaitu Bapak Drs. H. Mahfudz, yang juga mantan kepala kanwil departemen agama provinsi NTB mendatangi saya, membawakan SK dan susunan

kepanitiaan pembangunan IC yang telah diterbitkan oleh Gubernur Lalu Serinata. Kalau tidak salah di situ beliau adalah sekretaris umumnya. Panitia yang belum sempat mengeksekusi pembangunan tersebut.

Kembali ke soal mekanisme. Pilihannya ada dua: pertama, pembangunan dilaksanakan oleh panitia pembangunan ataupun yayasan yang khusus dibentuk untuk itu. Jika ini dipilih, maka pemerintah akan memberikan bantuan hibah atau bantuan sosial ke panitia atau yayasan. Panitia atau yayasanlah yang akan bertanggung jawab sepenuhnya, baik terhadap proses perencanaan pembangunan, sampai pada pelaksanaan pembangunan. Panitia lah yang akan menentukan siapa yang akan menjadi pelaksana atau kontraktor pembangunan. Dengan kata lain, seperti mekanisme pelaksanaan pembangunan-pembangunan mesjid pada umumnya. Jika ini yang dipilih, maka kepanitiaan akan bernama Panitia Pembangunan Islamic Center NTB.

Alternatif lainnya, adalah dengan menyerahkan sepenuhnya pada instansi terkait. Dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum Provinsi. Jika ini yang dipilih, maka seluruh sumbangan masyarakat akan diserahkan dalam bentuk sumbangan fihak ketiga kepada pemerintah, masuk dalam mekanisme APBD.

Setelah beberapa kali diskusi, maka akhirnya dipilih alternatif kedua. "Itu yang paling aman, panitia hanya bertugas mengumpulkan sumbangan dan dana dari masyarakat," kata Kepala Biro Umum waktu itu, yaitu Ir Iswandi. Karenanya, panitianya menjadi Panitia Pengumpulan Dana Masyarakat Untuk Pembangunan Islamic Center Nusa Tenggara Barat. Ketua Umumnya langsung Bapak Gubernur dan kepala Bappeda sebagai Ketua Hariannya

Alhamdulillah, akhirnya tepat pada tanggal 17 Ramadhan 1431 H, bertepatan dengan tanggal 10 September 2010 ground breaking pembangunan Islamic Center NTB yang telah sekian lama menjadi angan-angan masyarakat Nusa Tenggara Barat dimulai; dengan memulai pembangunan gedung lembaga pendidikannya, yang berlokasi di eks Gedung KONI. Bapak Tuan Guru Bajang KH Muhammad Zainul Majdi, MA, bersama dengan pimpinan DPRD, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, meletakkan batu pertamanya. Peletakan batu sejarah, yang menandai dimulainya pembangunan Islamic Center tersebut. Saya juga ikut masuk ke dalam lubang lokasi peletakan batu pertama, berdiri di belakang para tokoh yang secara bergiliran meletakkan fondasi pembangunan gedung lembaga pendidikan IC. Sementara pembangunan mesjidnya pada waktu itu belum dapat dimulai karena proses penghapusan gedung SPMA dan SMP 6, pada saat itu belum dapat diselesaikan. Subhanallah. (Jakarta, 280314).

Islamic Center dan Peradaban Islam

ALHAMDULILLAH , hari Jumat 19 Maret 2010 lalu, sayyidul ayyam, dalam rangkaian peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad Saw tingkat provinsi NTB, Pak Gubernur NTB, TGH M Zainul Majdi, MA akan melaksanakan peletakan batu pertama pembangunan Islamic Center Nusa Tenggara Barat. Dari sudut pandang arsitektural, seperti yang kita lihat dalam gambarnya, tidak lama lagi kita, masyarakat NTB akan memiliki sebuah bangunan mesjid yang besar, dengan menara asmaul husnanya, yang memiliki tinggi 99 meter. Angka 99 itu sendiri diambil dari Asmaul Husna, 99 nama agung Allah SWT .

Pertanyaan pertama yang muncul dalam benak kita, apa makna dari pembangunan Islamic Center tersebut. Mengapa kita harus memulai pembangunan Islamic center , yang tentunya akan menelan biaya yang besar, untuk ukuran kapasitas fiscal daerah kita yang terbatas ini? Dalam berbagai kesempatan, Bapak Gubernur NTB, TGH M. Zainul Majdi, MA menyampaikan bahwa pembangunan IC NTB adalah gagasan yang sudah lama ada di NTB, bahkan sejak gubernur Wasita Kusuma almarhum. NTB yang mayoritas penduduknya muslim, kemudian pulau Lombok yang dikenal dengan Pulau Seribu Mesjid, sangat wajar kalau kemudian mendambakan adanya sebuah symbol, sebuah *landmark*, yang akan menjadi kebanggaan masyarakat, yang tentunya berkaitan dengan nilai nilai keagamaan, atau bangunan yang kemudian dapat

bermanfaat bagi peningkatan keimanan dan ketaqwaan ummat. Ada wadah yang dapat dibanggakan untuk menjadi sarana pemersatu berbagai kepentingan masyarakat daerah kita yang heterogen atau plural ini.

Dengan adanya Islamic center, kita dapat menunjukkan bahwa Islam adalah agama rahmatan lil alamin agama yang dapat memayungi dan mengayomi seluruh mahluk di bumi, bahkan diseluruh jagat raya (alam semesta) yang tak terbilang luasnya ini. Di dalam lembaga Islamic Center itu nanti akan dilaksanakan berbagai pengkajian tentang nilai-nilai islam dan keislaman sert a manusia dan kemanusiaan yang pada dasarnya berpusat pada fitrah manusia sebagai khalifah.

Islamic Center sebagai *icon* NTB.

Berdirinya Islamic Center nantinya diharapkan dapat menjadi icon NTB yang telah memantapkan visinya sebagai daerah yang beriman dan berdayasaing (NTB Bersaing). Sekaligus sebagai landmark nya kota Mataram yang visinya Maju dan Religius. Pertanyaan berikutnya adalah, apa manfaat dari adanya Islamic Center itu bagi masyarakat.

Secara langsung, tentunya manfaat IC terkait dengan adanya 4 komplek bangunan yang menjadi bagian dari IC tersebut. Yang pertama adalah mesjid, yang kalau jadi nanti akan dapat menampung jemaah kurang lebih lima belas ribu jemaah. Ini artinya kita (warga Kota Mataram) mungkin tidak perlu lagi menggunakan lapangan untuk shalat hari raya. Disamping tentunya untuk kegiatan peribadatan sehari hari.

Bangunan kedua dari IC tersebut adalah untuk lembaga pendidikan terpadu, dari TK sampai Perguruan Tinggi. Di gedung ini dihajatkan dapat dibangun suatu lembaga pendidikan bernuansa Islami yang berkelas internasional, mulai dari taman kanak-kanak sampai dengan perguruan

tinggi. Di sinilah diproses revitalisasi peradaban islam dalam rangka menemukan seperti apa sesungguhnya *way of life* yang bernuansa islam seperti yang kita pelajari di sekolah selama ini.

Di sinilah dididik generasi muda islam yang berkualitas, baik dari sisi pemahaman akan nilai-nilai keagamaan, maupun dari sisi penguasaannya terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan bahasa yang lebih sederhana, di sinilah dididik generasi masa depan islam yang handal, baik secara lahiriah maupun batiniah, yang tentunya berwajah islam yang moderat, yang dapat mengayomi seluruh lapisan masyarakat. Jauh dari wajah islam radikal. Cerminan dari sosok islam yang rahmatan lil alamin, yang menjembatani ketegangan yang selama ini seringkali terjadi, baik antara agama dan budaya, agama dan iptek, bahkan antara pendidikan keagamaan dengan pendidikan sekuler.

Untuk menunjang misi di atas, bangunan ketiga dari IC tersebut adalah Pusat Kajian keislaman dan IPTEK, yang bangunannya menempati mesjid raya attaqwa sekarang. Di gedung ini akan ada lembaga pengkajian keislaman, perpustakaan, dan juga museum mini atau galeri yang menggambarkan keagungan islam masa lalu, atau sejarah masuknya Islam di NTB. Gedung ini juga menjadi perkantoran bagi lembaga-lembaga Islam provinsi yang sudah ada, seperti MUI, DMI, FKPP NTB, BAZDA, dan lain-lain.

Manfaat lain dari IC adalah sebagai salah satu pusat rekreasi atau wisata religi.

Dengan adanya menara Asmaul Husna dan bentuk berbagai bangunannya yang unik, kiranya IC NTB dapat menjadi daya pesona tersendiri bagi NTB yang telah menetapkan pariwisata sebagai salah satu andalan daerah.

Pengalaman di berbagai IC yang ada di tanah air, dapat memberikan suatu harapan kepada kita, bahwa IC ini dapat juga berfungsi ekonomi, disamping religi dan sebagai pusat peradaban. Untuk itu maka disiapkan komplek bangunan keempat, yaitu area komersial atau bisnis, dimana di situ ada perhotelan, pusat rekreasi dan olah raga, dan lain-lain. Areal ini merupakan komponen terakhir yang akan dibangun kelak, dengan menempati lokasi di sebelah selatan gedung DPRD Provinsi.

Semoga tulisan ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat, akan makna dan manfaat dari dibangunnya Islamic Center Nusa Tenggara Barat. Cepat atau lambat diselesaikannyapembangunan IC ini, akan tergantung dari seberapa besar partisipasi masyarakat di dalamnya. Karena adalah tidak mungkin, gedung semegah IC ini dapat diselesaikan hanya dengan mengandalkan dana dari pemerintah semata. Wallahu alam bissawab.

BIL, Mandalika, Pandan Dure dan Divestasi

Ketika menerima amanah menjadi gubernur NTB pada 17 September 2008 yang bertepatan dengan 17 Ramadhan 1430 H, TGH M Zainul Majdi—yang populer dengan sebutan Tuan Guru Bajang (TGB) dengan wakil gubernur Ir. M. Badrul Munir ditinggalkan beberapa “PR besar” yang belum dapat diselesaikan pada era gubernur Drs. HL Srinata. Sebuah PR yang tidak mudah untuk dilaksanakan, apalagi diselesaikan. Itulah sebabnya pak H. Rahmat Hidayat, SH, anggota DPR RI asal NTB, ketika mengomentari mulai beroperasinya BIL dengan tegas menyatakan: “Justru saya bangga dengan Gubernur NTB, dia muda dan berani. Dia berhasil melanjutkan apa yang telah dirintis pendahulunya...” (Lombok Post, 10 Oktober 2011).

BIL memang paling urgen di antara sekian banyak ‘PR’ peninggalan pemerintahan sebelumnya. BIL tidak sekadar memindahkan bandar udara dari Mataram ke Lombok Tengah, namun sesungguhnya memiliki arti yang strategis. Dengan areal bandara yang telah dipersiapkan lebih dari 550 ha—konon terluas kedua di Indonesia setelah Sukarno Hatta, ke depan BIL dapat menjadi pintu gerbang pariwisata. Bukan semata untuk kawasan timur Indonesia, bahkan kawasan Asia Pasifik, karena posisinya yang terletak di tepian Samudra Hindia. Karena itu, cukup beralasan pula ketika saya menulis bahwa beroperasinya BIL dapat menjadi simbol takeoff-nya NTB.

Belum mulainya pelaksanaan pembangunan di kawasan Mandalika sampai saat ini, salah satu faktornya karena menunggu beroperasinya BIL. Maka dengan telah mulai beroperasinya BIL, tentu akan mempercepat munculnya investor yang akan menggarap kawasan yang oleh Presiden akan ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata Nasional (KEK Parnas). Dengan adanya penetapan presiden tersebut, akan menjadi insentif tersendiri bagi para investor, karena berbagai kemudahan yang disediakan. Bagi masyarakat NTB, dimulainya pembangunan kawasan Mandalika tentu akan menjadi lahan baru untuk lapangan kerja, mulai dari proses konstruksi sampai masa operasional kelak.

Menurut pihak BTDC, saat ini telah siap tiga calon mitra strategis yang akan menandatangani memorandum of understanding (MoU) di hadapan Presiden RI pada saat berkunjung ke NTB antara 19-21 Oktober ini. Diharapkan pada awal tahun 2012, proses pembangunan infrastruktur di Mandalika resort dapat dimulai.



PANDANDURE DAN DIVESTASI NEWMONT



Proyek strategis lain yang menjadi PR Gubernur TGB adalah bendungan Pandanduri atau Pandandure—demikian orang Sasak biasa menyebutnya. Proyek ini bahkan telah menjadi “agenda politik” Gubernur dan Bupati Lombok Timur. Itulah sebabnya, sejak dilantik menjadi gubernur, TGB memberikan perhatian khusus pada Pandandure ini. Kepala Dinas PU diberikan tugas untuk mengawal proyek ini dengan meningkatkan intensitas koordinasi dengan Kementerian PU. Beliau sendiri beberapa kali menghadap langsung ke Menteri PU (Ir. Djoko Kirmanto, Dipl. HE) untuk mengkonsultasikan progress yang diraih, sekaligus memastikan groundbreaking-nya.

Gubernur tidak segan-segan menyampaikan ke Presiden SBY, dalam berbagai kesempatan bahwa Pandandure adalah juga janji kampanye sang Presiden—ketika Pilpres 2009 lalu—kepada masyarakat Lombok, yang akan diselesaikan sebelum masa bhakti SBY berakhir 2014 nanti. Mungkin itulah sebabnya, suatu kali ketika saya turut mendampingi Gubernur menghadap Menteri Pekerjaan Umum, terungkap bahwa Pandandure telah dijadikan prioritas pada Kabinet Indonesia Bersatu II bersama dengan bendungan sejenis di Maluku dan NTT. Persoalannya waktu itu, menurut Menteri, karena biayanya yang relatif besar akan diupayakan dari dana loan luar negeri.

Alhamdulillah, akhirnya Pandandure dimulai, dan bahkan menjadi tempat dicanangkannya proyek MP3EI untuk Koridor 5 bersama Bali dan NTT pada hari Jumat, 27 Mei 2011. Proyek yang akan menghabiskan dana sekitar Rp 600 miliar tersebut diharapkan rampung pada 2014.

Berkah Bendungan Pandan Dure Bagi Petani Lombok Timur

Redaktur: ME. Bijo Dirajo



3 - 21:24

LOMBOK — Beroperasinya bendungan Pandan Dure, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB) pada tahun 2013 lalu, telah memberikan dampak besar bagi masyarakat, khususnya petani dengan lahan tadah hujan bagian selatan.

Satu lagi PR besar yang telah dapat ditunaikan oleh Gubernur TGB adalah terkait dengan divestasi saham Newmont. Sebuah proses yang sempat deadlock di jaman pemerintah sebelumnya, karena masing-masing pihak bersikukuh pada pendiriannya. Gubernur Serinata, kala itu, menggandeng pihak swasta nasional sebagai pemodal: karena tentu tidak mungkin menggunakan dana dari APBD.

Sementara pihak NNT menawarkan diri untuk menjadi pemodal, di mana dana dari pihak mereka akan dipinjamkan kepada pemda untuk membeli saham, yang kemudian dikembalikan dari dividen yang menjadi hak pemda untuk sekian tahun ke depan. Masing-masing bersikukuh, sehingga sampai masa jabatan Mamik Sri-sapaan Serinata-berakhir, proses divestasi ini tidak terealisasi. Malahan di kemudian hari proses divestasi ini dibawa ke Mahkamah Arbitrase Internasional, karena tidak terjadinya kesepakatan antara para pihak terkait.

Ketika gubernur NTB berganti, pihak NNT berharap (mungkin) tawaran divestasi ala Newmont akan dapat diterima oleh Gubernur TGB. Namun ternyata tidak juga. Pak Gubernur TGB memilih untuk diadakan beautycontest sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, dalam rangka memilih mitra mana yang paling besar memberikan keuntungan bagi rakyat NTB. Proses divestasi Newmont ini ternyata tidak sederhana. Setelah proses beautycontest selesai dan hasilnya sudah diumumkan, Menteri Keuangan menyatakan kalau pemerintah pusat merekomendasikan agar BUMN-lah yang harus digandeng Pemda. Dengan kata lain, Gubernur diminta menganulir hasil beautycontest. Bahkan pihak DPR melalui komisi terkait sempat juga ‘mempersoalkan’ proses divestasi tersebut. Semua itu tidak membuat Gubernur menyerah. Yakin bahwa apa yang telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan akan memberikan kemanfaatan bagi rakyat NTB. Seakan tak kenal lelah bolak balik Mataram-Jakarta, hanya demi meyakinkan kepada para pihak agar proses divestasi segera direalisasikan.

Bagi mereka yang ikut langsung dalam berbagai pertemuan dan perdebatan antara Gubernur dengan para pihak, pasti mengakui kemampuan lobi beliau. Dengan

kesantunan, namun tetap tegas dan lugas, Gubernur mampu meyakinkan para elit pusat, utamanya Menteri Keuangan, Menteri ESDM dan pimpinan Komisi VII DPR RI—waktu itu—agar menyetujui proses divestasi sesuai mekanisme yang telah ditempuh, demi rakyat NTB, di mana tambang NNT itu beroperasi. Seorang teman di Jakarta, yang intens mengikuti proses divestasi tersebut berkomentar kepada saya, “Kalau bukan TGB, kayaknya nggak mungkin Menteri Keuangan menyerah atau mengalah dalam proses divestasi Newmont.” Wallahu ‘alam bissawab.

PON, Embarkasi, Jalan, Apalagi?

Setelah PON Sukses, Embarkasi Lancar, Jalan Mantap, Apa Lagi?

Ketika menerima Jajaran Pengurus KONI NTB hasil Musda pada bulan Juli 2009 yang memilih pak HMS Kasdiono sebagai ketua umumnya, pada waktu itulah Gubernur NTB, Bapak Tuan Guru Bajang menantang Ketua KONI yang baru, agar mampu menargetkan peraih emas menjadi sepuluh. Padahal ketika melapor peraih emas pada PON di Samarinda, NTB hanya mendapat 3 emas, sehingga rangkingnya masuk ke 26 dari 33 Propinsi yang ikut PON. Setelah berdiskusi dan tentu memperhitungkan segala sesuatunya, tidak ada kata lain dari pak Ketua KONI yang waktu itu baru saja terpilih, selain kata "Siap, Pak Gub." Sejak itulah kemudian Ketua KONI beserta jajarannya mulai berfikir, bagaimana mewujudkan tantangan pak Gubernur. Itu artinya NTB harus dapat melakukan terobosan khusus, sehingga mendapat tambahan medali tiga kali lipat dari raih PON sebelumnya. Sesuatu yang menurut pak Kasdiono, pasti susah sekali. Tapi kan ada istilah orang barat, "nothing is impossible on earth." Tidak ada yang tidak mungkin. Kita juga punya pepatah, "dimana ada kemauan, di sana ada jalan."

Gubernur: Prestasi Yang Diperoleh Pada PON XIX Sangat Membanggakan



Atlet PON NTB Menerima Penghargaan dan Apresiasi dari Pemprov NTB di Pendopo Gubernur, Rabu (12/10).

Demikianlah, sekilas balik apa yang kemudian kita sama sama saksikan menjadi salah satu titik tolak kebanggaan daerah dan masyarakat kita. NTB berhasil melampaui target sepuluh emas (memperoleh 11 emas 5 perak dan 8 perunggu) dan memperbaiki peringkat yang tadinya 26 dari 33 provinsi menjadi peringkat 12. Sebuah prestasi yang merupakan hasil kerja keras semua pihak, terutama para atlet, pelatih, pengurus cabor, pengurus KONI, dibawah motivator dan fasilitator utama daerah, yaitu Gubernur dan Wakil Gubernur NTB. Alhamdulillah.

Setelah kita selesai dengan euforia Sukses PON Riau, kembali ada getaran getaran kekhawatiran terkait embarkasi haji. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, NTB dipercaya menjadi embarkasi dan disembarkasi haji penuh oleh pemerintah. Itu artinya, masyarakat NTB yang akan naik haji, bisa langsung terbang dari BIL ke Jeddah, Saudi Arabia. Dari

Tanak Awu ke Tanah Suci. Namun alhamdulillah, kekhawatiran itu sirna, manakala jadwal pemberangkatan pertama jamaah Haji Kloter dari Kota Mataram sesuai jadwal. Pendaratan perdana Pesawat Airbus Garuda di BIL berjalan mulus, demikian pula take off perdananya. Sesuatu yang menjadi kekhawatiran banyak pihak tidak terjadi. Sejak hari itu, 21 September 2012, resmilah BIL menjadi embarkasi penuh haji untuk wilayah NTB.

Ceritera tentang embarkasi ini lain lagi. Kira kira sebulan sebelum BIL beroperasi tahun lalu, pak Gub menghadap Menteri Agama, Suryadharma Ali. Pada waktu itu pak Gub meminta agar BIL dapat dipergunakan sebagai embarkasi dan disembarkasi penuh. Kebetulan waktu itu tanggal 1 Oktober merupakan pendaratan perdana. Sedangkan jemaah haji mulai berangkat tanggal 8 Oktober. Jadi paslah kata beliau. “sekalian kita cari barokahnya,” kata pak Gub pada pak Menteri, setengah memaksa. Dan pak Menteri pada waktu pertemuan itu pada prinsipnya setuju. Namun ternyata belakangan secara teknis administrasi yang tidak memungkinkan, karena saat itu maskapai yang akan melayani jemaah NTB embarkasi Surabaya adalah Saudia Airlines yang tidak memiliki pesawat yang dapat mendarat di BIL. Seandainya Garuda yang bertugas untuk mengangkut jemaah haji asal NTB waktu itu, bukan tidak mungkin embarkasi penuh dari BIL dimulai tahun lalu. Harapan kita ke depan, semoga BIL tidak hanya embarkasi untuk masyarakat NTB, tapi juga untuk NTT dan Bali, insya Allah. Ini, sekaligus menghapus keraguan orang yang mengatakan bahwa BIL tidak bisa dilandasi oleh pesawat berbadan lebar dengan penumpang di atas tiga ratus orang.

Percepatan Jalan

Setelah ceritera sukses PON dan embarkasi haji, satu lagi yang mungkin perlu diketahui masyarakat, sebagai hasil buah sukses yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi NTB, dalam rangka implementasi RPJMD 2009-2013. Yaitu peningkatan kondisi jalan raya, baik jalan negara, maupun jalan provinsi.

Pada awal Tuan Guru Bajang menjadi gubernur, prosentase jalan provinsi yang masuk dalam kategori mantap hanya 44 persen. Karenanya tidak mengherankan, setiap kali pak Gub maupun Wagub bersilaturahmi dengan masyarakat, khususnya di Pulau Sumbawa, selalu keluhan mereka adalah jalan. Saking seringnya masalah jalan ini diutarakan oleh masyarakat, secara bercanda beliau mengatakan “.....kalau saja kita bisa membangun jalan dengan surat alfatihah, maka saya akan ajak kita semua untuk membaca alfatihah sering-sering.” Beliau ingin mengatakan bahwa komitmen pemerintah soal jalan ini jangan pernah diragukan. Namun karena perlu dana besar, tentu perlu waktu. Bayangkan, dari 1700 an km jalan provinsi, lebih dari 1000 km kondisinya tidak mantap. Demikian pula halnya jalan negara, yang membentang antara Ampenan di Lombok bagian barat, sampai ke Sape, ujung Pulau Sumbawa bagian timur.

Alhamdulillah, masalah jalan ini ternyata dapat juga diatasi. Untuk jalan negara, kementerian PU mengalokasikan dana yang tidak sedikit dengan target pada akhir 2013 seluruhnya dapat dimantapkan. Artinya Ampenan-Sape menjadi hotmix mulus. Sepanjang tidak kurang dari 632 km. Bahkan, penyelesaiannya dapat dipercepat. Yang tadinya akhir 2013, menjadi akhir 2012. Alhamdulillah.

Kemantapan Jalan Nasional di NTB 98,74 Persen

Kamis, 18 Mei 2017 7:15

Saat ini hanya ada satu jalur jalan nasional lintas kabupaten dari Pelabuhan Lembar menuju arah timur Pulau Lombok, dan kondisinya sudah sangat padat

Demikian pula jalan propinsi, yang tadinya banyak rusak. Melalui Perda Perecepatan Peningkatan Pemantapan jalan Sistem Tahun Jamak, lebih dari 350 km dapat dimantapkan dengan anggaran sekitar 450 Milyar dalam masa anggaran tiga tahun. Sebuah kebijakan Gubernur bersama DPRD yang bertujuan untuk meningkatkan kemantapan jalan propinsi yang semula hanya 44persen mantap, menjadi hampir 70 persen mantap. Sesuai dengan target dalam RPJMD 2009-2013. Bahkan lebih sedikit, akan dapat dicapai, diakhir tahun 2013. Sampai akhir 2012 ini, target untuk menjadi 68 persen mantap dapat dicapai. Semoga di tahun 2013 masih ada tambahan dari APBN untuk jalan propinsi yang berstatus strategis nasional, sehingga target dalam RPJMD dapat terlampaui, sebagaimana halnya lampauan target medali emas di PON Riau. Insya Allah.

Ketika ada yang menyinggung, apakah demikian tingginya perhatian pemerintah pusat pada NTB ada kaitannya dengan posisi TGB sebgaia ketua DPD Demokrat NTB? Dengan kerendahan hati beliau menjawab “saya kira ya, meski sulit juga kita buktikan. Dan secara pribadi, ketika menerima tawaran teman-teman untuk memimpin PD NTB, niat saya memang hanya itu, agar apa yang telah kita rencanakan dalam RPJMD mendapat dukungan pusat. Terutama terkait

infrastruktur dasar seperti jalan, pengairan, dan listrik, yang menjadi persoalan kita selama ini di NTB, yang membuat investor masih enggan masuk ke daerah kita. “ Wallahu ‘alam bissawab.



Merajut Rencana, Mengejar Prestasi

Ikhtiar
mengIndonesiaikan
NTB
Edisi Ke 2



Angka Kemiskinan NTB Turun Lagi

Ketika pertama kali mendengar release BPS NTB bahwa angka prosentase kemiskinan di NTB telah menurun di bawah dua puluh persen, yaitu pada posisi 19,87% pada tahun 2011, Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur NTB sangat senang. Itu artinya, apa yang beliau harapkan ketika mula pertama memimpin NTB telah menunjukkan tanda tanda keberhasilan.

Saya ingat betul, dalam salah satu arahannya, pak Gubernur menyatakan bahwa “apapun yang kita laksanakan dalam membangun daerah ini, muaranya adalah pada peningkatan kesejahteraan rakyat dan penurunan angka kemiskinan. Tidak ada artinya infrastruktur yang hebat, jalan, jembatan listrik, irigasi, dan lain-lain, jika kita tidak bisa menekan angka pengangguran dan menurunkan angka kemiskinan.” Beliau memang sangat ‘concern’ dengan masalah kemiskinan ini. Sebagai Tuan Guru, suatu ketika beliau ditanya oleh jemaah, apakah mungkin kemiskinan itu ditiadakan dari muka bumi, padahal menjadi miskin itu adalah takdir Allah SWT. Sebagai salah seorang jemaah yang hadir dalam pengajian itu, saya menunggu betul, apa yang akan beliau jelaskan. Karena seringkali saya mendengar dalam pengajian kalau mereka yang hidupnya miskin justru nanti akan bersama Nabi masuk surga.

Menjawab pertanyaan tersebut, beliau tentu menjelaskan atas dasar Qur’an dan hadits Nabi. Beliau menyatakan bahwa”adalah benar, miskin itu adalah takdir

Allah. Tapi jangan lupa, menjadi kaya juga adalah takdir Allah. Berpulang kepada kita, mahluk yang namanya manusia ini. Yang diberikan keistimewaan akal oleh Allah SWT. Apakah mau menjadi miskin atau berihthiar agar bisa menjadi kaya. Sama sama kita menjemput takdir Allah.” Cukup panjang beliau kemudian memberikan motivasi kepada jemaah, yang diharapkan dapat membangkitkan semangat ekonomi atau semangat berproduksi dari masyarakat. Menurut beliau, tidaklah mungkin kesejahteraan, kekayaan, tingginya tingkat pendidikan, baiknya derajat kesehatan masyarakat, dapat kita raih tanpa melalui kerja keras seluruh penduduk bersama pemerintah. “masing-masing dengan porsi dan tugas pokok masing-masing,” jelas pak Gubernur dalam kapasitas sebagai Tuan Guru di hadapan jemaah yang ribuan jumlahnya itu.

Psikologi 20%

Secara sederhana, prosentase kemiskinan di suatu daerah dapat kita kategorikan menjadi tiga kategori, yaitu di bawah sepuluh persen, belasan persen, dan diatas dua puluh persen. Kalau meminjam pengklasan dalam olah raga, di bawah sepuluh persen itu papan atas, belasan persen itu papan tengah, dan di atas dua puluh persen itu papan bawah. Nah, ketika kita kemudian dapat menembus angka psikologis itu, maka dari kategori itu, dapatlah kita katakan bahwa kita telah berubah kategori dalam hal angka kemiskinan ini, dari papan bawah ke papan tengah. Meskipun harus kita akui bahwa kalau dilihat dari rangking secara nasional, NTB masih masuk dalam sepuluh besar daerah yang paling tinggi angka kemiskinannya. Masih relatif jauh dari angka kemiskinan rata rata nasional yang saat ini sudah berada pada posisi 12 persen. Artinya kita masih harus dapat bekerja lebih keras lagi, lebih terpadu lagi, dan lebih bersinergis lagi dengan

para stakeholders yang memiliki komitmen yang sama dalam hal penanggulangan kemiskinan ini.

NTB, Maret 2018: Persentase Penduduk Miskin Mencapai 14.75 Persen

Jadwal Rilis : 2018-07-16

Ukuran File : 0.85 MB

Hit : 1424

Abstraksi

Jumlah penduduk miskin di Nusa Tenggara Barat pada Maret 2018 mencapai 737,46 ribu orang (14,75 persen). Jika dilihat dalam periode September 2017 - Maret 2018, jumlah penduduk miskin berkurang 10,66 ribu orang (0,30 persen).

Selama periode September 2017 - Maret 2018, secara absolut penduduk miskin di daerah perkotaan meningkat sekitar 1,83 ribu orang (dari 368,55 ribu orang pada September 2017 menjadi 370,38 ribu orang pada Maret 2018), sebaliknya di daerah perdesaan penduduk miskin berkurang sebanyak 12,49 ribu orang (dari 379,57 ribu orang pada September 2017 menjadi 367,08 ribu orang pada Maret 2018).

Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada September 2017 sebesar 16,23 persen, turun menjadi 15,94 persen pada Maret 2018. Sementara penduduk miskin di daerah perdesaan turun dari 14,06 persen pada September 2017 menjadi 13,72 persen pada Maret 2018.

Namun keberhasilan kita untuk menurunkan angka kemiskinan lebih cepat dari daerah lain (tahun lalu paling cepat ke empat secara nasional) hendaknya dapat memotivasi kita untuk bekerja lebih keras lagi. Angka penurunan rata rata 1.43% per tahun selama tiga tahun berturut turut belakangan ini, sesungguhnya masih dapat kita 'genjot' lagi hingga mencapai penurunan dua persen per tahun, seperti yang ditargetkan dalam RPJMD. Memang kita masih mengharapkan mulai jalannya satu mega proyek lagi dalam masa masa ini, yaitu pembangunan kawasan Mandalika Resort yang dalam rencana, akan menelan investasi sampai 30

trilyun rupiah. Kalau mega proyek ini dimulai, insya Allah 2013 ini, maka bukan hal yang tidak mungkin, target penurunan angka kemiskinan dua persen akan dapat terealisasi. Tugas kita ke depan, adalah menjaga keamanan dan kenyamanan berinvestasi dan berkunjung di daerah ini. Kita harus hindarkan daerah ini dari konflik antara warga, antar kampung atau desa, atau konflik terbuka lainnya. Karena pembangunan pariwisata itu sangat rentan dengan hal-hal yang seperti itu. Tidaklah mungkin akan ada orang mau berkunjung ke suatu tempat yang tidak aman. Padahal, secara sederhana kita dapat berhitung, bahwa setiap turis yang berkunjung ke suatu daerah, pasti akan memberikan peluang rezeki kepada lima aktor ekonomi sekaligus, yaitu: pemilik penginapan, pemilik restoran, penjual oleh-oleh, pelaku jasa informasi, dan pelaku jasa transportasi. Nah kalau kalau jutaan turis datang berkunjung, maka jutaan orang pula yang akan menikmati rezeki Allah yang dititipkan melalui turis tersebut.

Selesaiya pembangunan Islamic Center di 2014, insya Allah, pasti juga akan berkontribusi terhadap pembangunan pariwisata ini. Pengalaman beberapa IC yang ada seperti di Semarang, Samarinda, Depok, dan lain lain menunjukkan hal tersebut. Akan banyak pengunjung dari luar daerah bahkan luar negeri yang ingin menikmati wisata religi atau wisata spiritual, sebagai 'icon' dari destinasi wisata Islamic Center ini.

Demikian juga dam Pandan Duri di Lombok Timur yang direncanakan selesai 2014 juga. Akan ada lebih dari 13 ribu hektar sawah akan berubah sistem irigasi, menjadi irigasi teknis, dari yang sebelumnya tadah hujan. Ini akan mengubah intensitas dan pola tanam. Tentu akan menambah rezeki bagi para pemilik sawah yang akan tergenangi dari dam pandanduri tersebut. Karena desa-desa di sekitar pandanduri ini adalah salah satu sentra buruh migran, maka akan banyak buruh

migran kita yang di luar negeri akan kembali ke tanah kelahirannya, akan mengelola sawah ladangnya, sehingga mereka merasa tidak perlu lagi jauh-jauh meninggalkan anak istri untuk mencari rezeki dan keluar dari jerat kemiskinan. Insya Allah. Wallahu 'alam bissawab. (Bima, 13 Desember 2012)

Setelah Kemiskinan dan Drop Out Sekolah Turun, Lalu?

Salah satu arahan yang sangat tegas dan terang benderang yang disampaikan oleh pak Gubernur TGH Muhammad Zainul Majdi di awal beliau memerintah bersama dengan wakilnya Bapak H. Badrul Munir, adalah terkait dengan masalah kemiskinan. Beliau mengatakan bahwa “esensi dari pemerintahan ini adalah bagaimana kita berihhtiar untuk menurunkan angka kemiskinan. Percuma saja kita dapat berhasil membuat jalan mulus, gedung mewah, telekomunikasi lancar, ataupun listrik tidak pernah padam, manakala angka kemiskinan kita tidak menurun, dari posisinya pada hari ini.” Sebuah pernyataan yang sekaligus merupakan arah kebijakan yang harus dapat diterjemahkan oleh setiap aparat pemerintah Provinsi NTB. Artinya, setiap kepala SKPD harus dapat mengarahkan setiap kegiatan dan program yang akan dilaksanakan untuk menjawab, seberapa banyak orang dari keluarga miskin yang akan tersentuh oleh program yang mereka akan laksanakan.

Kepala Dinas PU misalnya, memiliki tugas mengidentifikasi berapa banyak jaringan irigasi dan juga jalan jalan usaha tani maupun infrastruktur jalan pada umumnya yang harus diselesaikan sehingga dapat mengungkit perekonomian masyarakat, khususnya dari keluarga

misikin. Bagaimana dia harus berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten kota, sehingga program provinsi dan kabupaten/kota bersinergi untuk memaksimalkan manfaat dari program yang dilaksanakan. Demikian pula Kepala Dinas Pertanian, bersama dengan dinas terkait di rumpun pertanian. Mereka tidak boleh bekerja sendiri sendiri. Haruslah ada koordinasi antar dinas sejenis, yang saling berhubungan. Berapa banyak lahan pertanian yang dapat dimanfaatkan secara maksimal, sehingga para buruh tani yang bekerja dan para petani pemilik tanah bisa meningkat pendapatannya. Apakah melalui program intensifikasi, ataupun ekstensifikasi. Meningkatkan produktivitas lahan, atau memperluas areal tanam. Termasuk mencetakan sawah sawah baru ataupun menghijaukan lahan kering yang ada. Maklum, lahan kering kita di NTB ini masih cukup luas dan banyak yang belum dapat dimanfaatkan oleh petani secara optimal.

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) yang menjadi leading sektor untuk penanggulangan kemiskinan ini bersama dengan BPS mengidentifikasi kantong kantong kemiskinan di NTB.

Berbagai program penanggulangan kemiskinan dari pusat seperti PNPM dan lainnya harus dapat menyentuh langsung kantong kantong kemiskinan tersebut. Tentu bersama dengan instansi terkait seperti Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, Bappeda, dan lainnya. Intinya adalah, masalah penang-gulangan kemiskinan itu tidak dapat dan tidak akan maksimal dilaksanakan tanpa adanya koordinas yang efektif dan produktif antar instansi. Bahkan kalau mungkin juga dengan lembaga lembaga masyarakat non pemerintah dan dunia usaha. Di situlah peran penting seorang Kepala Daerah

akan nampak; sebagai seorang koordinator, motivator, bahkan juga inspirator.

Hasilnya?

Data yang dipublikasikan oleh BPS, menunjukkan bahwa NTB telah dinyatakan berhasil menurunkan angka kemiskinan dalam masa waktu empat tahun terakhir ini. Secara statistik, tercatat telah terjadi penurunan dari 24,99 persen pada tahun 2008 menjadi 18,63 persen pada tahun 2012., rata-rata 1,43 persen per tahun. Memang harus diakui bahwa penurunan tersebut belum mencapai target yang dicanangkan dalam RPJMD 2009-2013 yaitu sebesar 2 persen rata-rata pertahun. Namun angka tersebut telah membawa nama baik NTB di jajaran provinsi-provinsi sedang berkembang di Indonesia. NTB termasuk dalam deretan empat besar tingkat penurunan angka kemiskinan pada tahun 2012, sebagaimana dirilis oleh BPS. Tiga provinsi di atas NTB adalah Papua, Maluku, dan NTT yang nota bene memiliki kapasitas fiskal jauh di atas NTB. Kapasitas fiskal maksudnya adalah jumlah anggaran pembangunan di bagi ke jumlah penduduk.

Drop out sekolah

Masalah lain yang menjadi perhatian Pak Gubernur dalam memimpin daerah ini adalah masalah pendidikan. Sebagai seorang yang kesehariannya bergelut di dunia pendidikan, tentu hal ini sangat mudah untuk difahami. Tapi dari kacamata politik, menginvestasikan dana yang sangat besar untuk dunia pendidikan, sesungguhnya “kurang menguntungkan.” Mengapa? Karena investasi di pendidikan itu adalah investasi jangka panjang, yang hasilnya tidak akan langsung dapat dilihat atau bahkan dirasakan oleh masyarakat. Apalagi untuk daerah NTB, yang penduduknya relatif besar dan terpecah. Tidak seperti Gorontalo atau

Maluku Utara atau Bengkulu. Namun demikian, saya ingat betul Pak Gub berkata”saya sangat sadari itu. Bahwa kalau kita mematok anggaran 20 persen untuk pendidikan, artinya kita harus mengurangi anggaran yang seharusnya bisa kita alokasikan untuk infrastruktur yang langsung dapat dilihat oleh masyarakat. Namun persoalannya, kalau pendidikan ini kita tidak prioritaskan, maka kualitas SDM kita akan tetap rendah dan tidak akan bisa bersaing dengan SDM dari daerah lain di masa-masa yang akan datang. Apalagi ketika kita menghadapi era pasar bebas, atau era globalisasi ke depan.” Maka sejak tahun anggaran 2009, NTB termasuk dalam sedikit provinsi yang mengalokasikan tidak kurang 20 persen APBDnya untuk urusan pendidikan. Dan sebagian besar dari yang 20 persen itu untuk bantuan siswa miskin (BSM), yang langsung dapat dimanfaatkan oleh siswa dari keluarga miskin untuk membeli keperluan sekolah. Sebagian lainnya untuk bantuan guru non pns, rehab ruang kelas, dan juga bantuan ke Perguruan Tinggi. Termasuk beasiswa bagi mereka yang tidak mampu secara ekonomi namun mampu secara akademik, yang melanjutkan pendidikan untuk jenjang S1, S2, dan bahkan S3. Dengan demikian, tidak boleh lagi ada alasan mereka untuk tidak menyekolahkan anaknya, dari SD atau MI sampai ke SMA, MA, atau SMK, bahkan ke jenjang Pendidikan Tinggi.

Data dari Dinas Dikpora maupun dari BPS menunjukkan bahwa angka Drop Out Sekolah maupun Madrasah di NTB menurun drastis. Terutama di madrasah dan sekolah swasta yang nota bene sebagian besar siswanya berasal dari keluarga miskin. Pada tahun 2008, angka drop out di SD/MI mencapai 1,17 persen persen, pada tahun 2011 turun menjadi 0,90 persen. Untuk tingkat SMP/MTs, 2008 sebesar 3,93 persen, pada tahun 2011 turun menjadi 0,92 persen. Yang agak tinggi adalah pada tingkat SMA/MA/SMK, pada tahun 2008 sebesar 8,03 persen, pada tahun 2011 turun menjadi 1,88 persen.

Pertanyaannya adalah, apakah dengan berbagai prestasi tersebut, IPM NTB sudah meningkat? Jawabannya, kalau dilihat dari segi nilai indeksnya, jawabannya adalah ya. IPM NTB sudah meningkat dari 64,12 pada tahun 2008 menjadi 66,23 pada tahun 2011. Ini artinya berbagai variabel pendidikan, kesehatan, dan ekonomi yang menjadi tolok ukur IPM kita sudah menjadi semakin baik. Bahwa posisinya secara nasional tidak berubah, tetap 32, memang ya juga. Ini karena provinsi lain juga meningkat indeksnya. Wallahu 'alam bissawab. (Jayapura, 14 Oktober 2012).

UN 2015 dan Pertaruhan Kejujuran

Gawe Nasional yang bernama UN kini sudah mulai ditabuh. Pada hari Rabu, 25 Februari 2015, telah diadakan Sosialisasi UN tingkat pusat, yang dihadiri oleh unsur-unsur Dikpora Provinsi, Perguruan Tinggi, dan LPMP. Acara yang dibuka langsung oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anis Baswedan itu tentu menjadi sangat menarik, mengingat terjadinya perubahan kebijakan yang sangat mendasar. Ujian Nasional (UN) tidak lagi menjadi unsur penentu kelulusan siswa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2005, pasal 68. Kini, PP tersebut sedang dalam proses perubahan, untuk melegalkan bahwa UN tidak lagi menjadi penentu kelulusan siswa.

Lantas pertanyaannya adalah, untuk apa UN tetap dipertahankan? Sesuai dengan isi pasal 68, PP tersebut, maka tiga fungsi yang lain dari UN tetap dipertahankan, yaitu sebagai: (1) alat untuk pemetaan mutu program dan/atau satuan pendidikan; (2) sebagai dasar seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya; dan (3) dasar untuk melakukan pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upayanya untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Dengan kata lain, pelaksanaan UN dengan biaya yang luar biasa besar, tetap ada manfaatnya. Bahkan ke depan, menurut Bapak Anies Baswedan, UN ini akan diupayakan mendapatkan pengakuan internasional, yang nilainya

kemudian dapat dipergunakan untuk masuk ke perguruan tinggi ternama di luar negeri, sekelas Cambridge International Examination di Inggris atau American College Testing Program (ACT Test) di Amerika Serikat.

Apa yang salah selama ini?

Saya tidak ingin mengulas kembali apa yang pernah saya tulis dalam “Surat Terbuka” kepada Bapak Menteri Anies Baswedan beberapa waktu yang lalu. Faktanya adalah, tujuan ke tiga dari UN sebagaimana diatur dalam PP tersebut diatas, tidak dapat dilaksanakan, karena ‘tidak ada korelasi yang nyata,’ antara ketersediaan infrastruktur pendidikan dengan nilai rata-rata UN di satuan Pendidikan tersebut. Sekolah-sekolah atau madrasah-madrasah yang berada di pelosok negeri, yang kalau dicermati infrastrukturnya kurang memadai, justru nilai rata-rata UN siswa nya tinggi-tinggi. Atau sebaliknya, ada sekolah-sekolah di kota yang dari segi infrastrukturnya cukup baik, namun nilai UN rata-rata siswanya jeblok.

Dengan adanya kebijakan baru terkait “UN tidak lagi menjadi unsur penentu kelulusan siswa” akan terjadi paling tidak tiga hal: (1) Pelaksanaan UN benar-benar dilaksanakan dengan jujur: baik murid maupun gurunya. Tidak boleh lagi ada kecurangan yang dibiarkan; ketidak jujuran yang difasilitasi; dan kebocoran soal yang ditutup-tutupi.

(2) Kepala setiap satuan pendidikan tidak perlu khawatir akan mendapat sanksi atau teguran dari kepala daerah atau kepala dinasnyanya, hanya karena nilai UN di sekolahnya jelek atau banyak siswanya yang tidak lulus. Justru kalau ternyata nilai UN nya jelek, Pemerintah atau Kementrian/Dinas akan memberikan perhatian khusus, apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki kualitas satuan pendidikan

tersebut. Mungkin laboratoriumnya yang perlu dibenahi, atau guru-gurunya perlu ditambah, atau bahkan ruang kelasnya harus diperbanyak, dan sebagainya. Intinya adalah, dari hasil UN tersebut akan dapat dijabarkan suatu kebijakan yang dapat membantu suatu satuan pendidikan meningkatkan kualitasnya.

(3). Masyarakat tidak perlu memiliki kekhawatiran yang berlebihan terhadap nasib anak-anaknya; lulus UN atau tidak lulus UN. Ketika kelulusan siswa menjadi tanggung jawab penuh ibu dan bapak guru di sekolah, maka tentu para orang tua akan lebih ihlas untuk menerima hasil proses pendidikan anak-anaknya. Tidak lagi ada yang mengatakan “hasil pendidikan tiga tahun ditentukan oleh ujian nasional yang tiga hari.” Dengan mengembalikan kedaulatan satuan pendidikan dalam menentukan ‘nasib’ murid-muridnya, bukan berarti setiap anak akan ‘pasti lulus.’

Dalam teori kurva normal, pastilah diantara sekian banyak siswa, sebagian kecil ada yang kurang pandai, yang daya serap terhadap mata pelajaran kurang atau rendah, sebagian besar dalam kondisi medioker atau normal, dan sebagian kecil lainnya dalam kondisi sangat pandai, atau daya serapnya tinggi. Itu teorinya. Tinggal berpulang pada para guru dalam melaksanakan proses pembelajaran dan proses pendidikan di setiap satuan pendidikan. Bisa saja, menurut teori tersebut, bandulnya akan bergeser ke kanan, artinya prosentase mereka yang berada pada arah sangat pandai yang tinggi; atau bergeser ke kiri, dimana sebagian besar dari murid-muridnya memiliki daya serap rendah. Itulah fungsi dari pendidikan yang sesungguhnya.

Harapan Pak Menteri

Perubahan mendasar yang dilakukan oleh Pemerintahan Jokowi terkait UN diharapkan berdampak positif terhadap upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di tanah air. Pada saat yang sama, diharapkan UN dapat menjadi barometer berklas internasional yang nilainya diakui secara internasional. “jumlah peserta UN kita terbesar ke empat di dunia,” kata pak Menteri, “sehingga kita harus berjuang agar nilai UN kita dapat diakui oleh lembaga-lembaga pendidikan tingkat dunia.” Maksudnya, dengan nilai UN yang tinggi, siswa yang bersangkutan akan dapat diterima tanpa tes lagi di perguruan tinggi terkemuka di seluruh dunia. Kata kuncinya hanya satu, pungkas pak Menteri: “UN yang kita laksanakan kredibel atau tidak.” Menurut para ahli evaluasi pendidikan, tidaklah sulit untuk mengukur tingkat kredibilitas UN tersebut. Wallahu a’lam bissawab.

UN 2016 dan Indeks Integritas

Gawe Nasional yang bernama UN kini sudah mulai ditabuh lagi. Pada waktu acara rembuk nasional pendidikan akhir Februari 2016 yang lalu, Bapak Mendikbud Anies Baswedan meluncurkan Indeks Integritas semua Satuan Pendidikan dan Daerah se Indonesia. Dari indeks tersebut setiap daerah dan sekolah akan mengetahui apakah daerah atau sekolahnya dalam posisi (1) Indeks Tinggi, Nilai UN juga tinggi; (2) Indeks Tinggi Nilai UN rendah; (3) Indeks Rendah Nilai UN tinggi; atau (4) Indeks rendah, nilai UN juga rendah.

Indeks tinggi atau rendah tersebut diukur dari sejauh mana kecurangan terjadi di suatu sekolah; secara sederhana, kalau 80% dari peserta ujian di sekolah itu jawaban salahnya di soal yang sama, maka indeksnya menjadi 20. Tapi kalau hanya 10%, dari jumlah peserta ujian punya kesalahan di soal yang sama, maka nilai indeksnya 90. Setelah itu baru dicek kebenaran jawabannya.

Ada sekolah yang indeksnya rendah, nilai rata rata UNnya juga rendah. Ini artinya, kunci jawaban yang beredar di sekolah tersebut adalah kunci yang salah. Tapi ada sekolah yang indeksnya tinggi, tapi nilai Unnya rendah; ini artinya mereka rata-rata jujur. Tidak ada kunci jawaban yang beredar, tidak ada kerja sama antar siswa yang dibiarkan. Mungkin karena soalnya yang memang tidak bisa mereka selesaikan dengan benar.

Dengan adanya kebijakan baru terkait “UN tidak lagi menjadi unsur penentu kelulusan siswa” akan terjadi paling tidak tiga hal: (1) Pelaksanaan UN benar-benar dilaksanakan dengan jujur: baik murid maupun gurunya. Tidak boleh lagi ada kecurangan yang dibiarkan; ketidak jujuran yang difasilitasi; dan kebocoran soal yang ditutup-tutupi.

(2) Kepala setiap satuan pendidikan tidak perlu khawatir akan mendapat sanksi atau teguran dari kepala daerah atau kepala dinas, hanya karena nilai UN di sekolahnya jelek atau banyak siswanya yang tidak lulus. Justru kalau ternyata nilai UN nya jelek, Pemerintah atau Kementrian/Dinas akan memberikan perhatian khusus, apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki kualitas satuan pendidikan tersebut. Mungkin laboratoriumnya yang perlu dibenahi, atau guru-gurunya perlu ditambah, atau bahkan ruang kelasnya harus diperbanyak, dan sebagainya. Intinya adalah, dari hasil UN tersebut akan dapat dijabarkan suatu kebijakan yang dapat membantu suatu satuan pendidikan meningkatkan kualitasnya.

(3). Masyarakat tidak perlu memiliki kekhawatiran yang berlebihan terhadap nasib anak-anaknya; lulus UN atau tidak lulus UN. Ketika kelulusan siswa menjadi tanggung jawab penuh ibu dan bapak guru di sekolah, maka tentu para orang tua akan lebih iklas untuk menerima hasil proses pendidikan anak-anaknya. Tidak lagi ada yang mengatakan “hasil pendidikan tiga tahun ditentukan oleh ujian nasional yang tiga hari.” Dengan mengembalikan kedaulatan satuan pendidikan dalam menentukan ‘nasib’ murid-muridnya, bukan berarti setiap anak akan ‘pasti lulus.’

Dalam teori kurva normal, pastilah diantara sekian banyak siswa, sebagian kecil ada yang kurang pandai, yang daya serap terhadap mata pelajaran kurang atau rendah;

sementara sebagian besar dalam kondisi medioker atau normal, dan sebagian kecil lainnya dalam kondisi sangat pandai, atau daya serapnya tinggi. Itu teorinya. Tinggal berpulang pada para guru dalam melaksanakan proses pembelajaran dan proses pendidikan di setiap satuan pendidikan. Bisa saja, menurut teori tersebut, bandulnya akan bergeser ke kanan, artinya prosentase mereka yang berada pada arah sangat pandai yang tinggi; atau bergeser ke kiri, dimana sebagian besar dari murid-muridnya memiliki daya serap rendah. Itulah fungsi dari pendidikan yang sesungguhnya.

Perubahan mendasar yang dilakukan oleh Pemerintahan terkait UN diharapkan berdampak positif terhadap upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di tanah air. Pada saat yang sama, diharapkan UN dapat menjadi barometer berklas internasional yang nilainya diakui secara internasional. “Jumlah peserta UN kita terbesar ke empat di dunia,” kata pak Menteri, “sehingga kita harus berjuang agar nilai UN kita dapat diakui oleh lembaga-lembaga pendidikan tingkat dunia.” Maksudnya, dengan nilai UN yang tinggi, siswa yang bersangkutan akan dapat diterima tanpa tes lagi di perguruan tinggi terkemuka di seluruh dunia. Kata kuncinya hanya satu, pungkas pak Menteri: “UN yang kita laksanakan harus kredibel.”

Menurut para ahli evaluasi pendidikan, tidaklah sulit untuk mengukur tingkat kredibilitas UN tersebut. Itulah yang kemudian diukur dengan mengeluarkan Indeks Integritas, seperti yang saya uraikan di depan. Sekarang berpulang kepada kita masing-masing, mau mengedepankan kejujuran yang diukur dengan indeks integritas tersebut, atau masih terbuai dengan Nilai UN yang harus tinggi, meski tingkat kejujuran anak-anak kita dipertaruhkan. Kalimat mana yang

akan kita ungkapkan: “maaf, nilai UN anak-anak saya rata-rata rendah; tapi saya bangga, mereka sangat jujur”.... Atau..... “maaf, meskipun nilai rata-rata UN anak-anak saya tinggi, tapi saya sedih karena ternyata, indeks integritas sekolah kami rendah.” Wallahu a’lam bissawab.

Belajar dari “Indonesia Mengajar”

Berhenti mengecam kegelapan. Nyalakan lilin. Ini negeri besar dan akan lebih besar. Sekedar mengeluh dan mengecam kegelapan tidak akan mengubah apapun. Nyalakan lilin, lakukan sesuatu.

Kalimat kalimat tersebut dapat Anda temukan pada blog Indonesia Mengajar (Indonesia-mengajar.org). Karena karyanya itu, Dr. Anies Baswedan diundang untuk berbicara di Indonesia Update 2012, di Canberra 20-21 September yang lalu. Saya sendiri diundang atas sponsorship dari AIPD-AusAID, bersama dengan empat Kepala Bappeda Provinsi lain yang menjadi lokasi kegiatan AIPD dalam lima tahun ke depan.

Program Indonesia Mengajar itu sendiri merupakan gagasan Anies Baswedan yang pada intinya merekrut anak-anak muda lulusan terbaik dari berbagai perguruan tinggi terbaik di Indonesia. Setelah dilatih khusus selama beberapa waktu, mereka dikirim ke daerah-daerah terpencil untuk membantu mengajar di SD-SD daerah terpencil tersebut. Di NTB, yang mendapat kiriman adalah SD-SD terpencil di kabupaten Bima, seperti wilayah kecamatan Sanggar di punggung Gunung Tambora dimana untuk menjangkau daerah tersebut perlu naik ojek atau bahkan harus jalan kaki. Belum bisa dijangkau oleh kendaraan umum. Banyak juga yang ditugaskan di pulau-pulau terluar Indonesia, atau di puncak pegunungan Papua, dan sebagainya.

Intinya adalah, melalui program ini para sarjana baru yang rata rata memiliki IP di atas tiga itu, dan memiliki idealisme tinggi untuk mengabdikan, diberi kesempatan untuk mencari pengalaman yang akan menjadi bekal mereka kelak. Istilah Pak Anies, “one-year experience, lifetime inspiring.” Mereka bertugas selama setahun. Mengajar di SD-SD yang gurunya sendiri pasti sangat terbatas, baik dari segi jumlah maupun kualitas. Mereka tinggal di desa terpencil selama setahun, bergaul dengan masyarakat desa, bergaul dengan mereka, dan dengan itu, mereka akan dapat mengetahui apa sesungguhnya yang dirasakan oleh masyarakat desa tersebut.

Satu lagi, menurut Pak Anies dalam presentasinya, mereka akan menyadari betapa luasnya negara yang bernama Indonesia ini. Betapa besarnya negara yang bernama Indonesia ini. Dan karena itu, akan memahami juga, betapa tidak mudahnya, mengurus negara yang bernama Indonesia ini. Itulah filosofi dibalik kalimat yang dijadikan tagline dalam blognya, seperti yang saya kutip di awal tulisan ini.

Memang Indonesia adalah negara besar. Tidak ada satupun negara di dunia yang jumlah pulau-pulainya seperti Indonesia. Saking besarnya, kalau dibandingkan dengan Eropah, dari ujung ke ujung, hampir sama dengan nusantara. Begitu pula kalau kita bandingkan dengan benua Amerika. Sehingga memang tidaklah mudah mengelola negara yang bernama Indonesia itu. Siapapun dia.

Kesadaran itulah yang ingin dibangun oleh Anies Baswedan melalui para pemimpin bangsa di masa depan, yang bernama generasi muda. Para kader penerus dari sarjana sarjana cerdas dari berbagai perguruan tinggi yang telah memiliki rekord terbaik selama ini. Yang dari perguruan tinggi itu pulalah lahir kader bangsa yang berkiprah membangun

bangsa melalui jalur ‘oposisi’ yang mengkritisi setiap langkah pemerin-tah. Kiprah yang memang diperlukan, dalam rangka mengawasi para pelaksana pembangunan agar tidak sewenang-wenang, tidak mementingkan kelompok tertentu saja, dan sebagainya. Meski tidak jarang juga kadang suara-suara mereka ‘memekakkan’ telinga yang dikritik.

Bagaimana hasilnya? Menurut Dr. Anies Baswedan, sang pemilik *brand*, ternyata luar biasa. Baik bagi anak-anak di daerah terpencil, terluar, dan ter’pinggirkan’ selama ini, maupun bagi anak-anak bangsa yang secara sukarela dan penuh semangat menjadi Pengajar Muda dan bekerja setahun penuh selama ini. Anak-anak di sekolah-sekolah tersebut sangat senang dan bersemangat karena kehadiran program Indonesia Mengajar memberikan warna baru bagi mereka. Baik di depan klas, maupun juga di luar klas. Banyak guru-guru mereka yang biasanya masuk senin-kamis (ya memang dua hari dalam seminggu), kini menjadi rajin. Tentu mereka merasa malu hati, karena kehadiran anak-anak muda dari kota ini ‘memaksa’ mereka untuk menjadi rajin. Telah menjadi rahasia umum, kalau mental para guru kita di sekolah-sekolah terpencil seperti itu. Meski sesungguhnya pemerintah telah menambah uang kesejahteraan mereka lebih dari mereka yang bertugas didaerah normal.

Masyarakat setempat juga merasakan manfaatnya; karena anak-anak muda ini juga melakukan kegiatan membangun perpustakaan, mengaktifkan kegiatan luar sekolah bagi anak-anak muda sebaya mereka, membangun budaya baca di masyarakat, dan lain-lain. Sebaliknya, bagi para tenaga muda itu sendiri, benar-benar seperti yang dijanjikan program ini, yakni “one year experience, lifetime inspiring” Memberikan inspirasi bukan saja bagi anak didik, warga masyarakat setempat, maupun bagi mereka, para

Pengajar Muda itu sendiri. Bahwa mereka dapat berbuat untuk turut membangun negeri. Bahwa mereka sesungguhnya dapat menyumbangkan sesuatu yang mereka miliki, untuk turut meningkatkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan ke seluruh negeri. Mereka terinspirasi oleh senyum mekar anak-anak negeri yang tak pernah mereka dapati di kota-kota; bahkan mungkin di keluarga mereka sendiri.

Banyak dari mereka yang berasal dari keluarga super sibuk, yang tidak pernah tahu, betapa masyarakat desa di tempat jauh, harus berpanas-panas di tengah ladang atau bahkan di tengah laut, hanya untuk menyambung hidup dari hari ke hari. Banyak dari mereka tidak pernah tahu, kalau banyak dari anak-anak negeri ini yang berangkat sekolah dengan perut kosong, namun tetap memiliki semangat tinggi untuk menuntut ilmu.

Itulah yang mereka temui, mereka ajak berdiskusi sehari hari, selama setahun mengabdikan. Hasilnya? Pak Anies berceritera, bahwa dari para peserta Indonesia Mengajar, tidak sedikit yang kemudian memberikan apresiasi kepada para pegawai negeri; yang meski dengan gaji pas pasan, harus melayani masyarakat di pelosok negeri, terkadang jauh dari sanak keluarga mereka sendiri.

Konon ada peserta yang keluar dari perusahaan multinasional tempatnya bekerja selama ini, karena sadar bahwa membangun masyarakat sendiri secara langsung, membawa keberkahan dan kenikmatan tersendiri; dibanding hanya mengejar kekayaan dengan memperbesar perusahaan orang luar negeri. Terima kasih Bung Anies, yang telah menginspirasi kami. Kami tidak akan lagi hanya bisa mengemaskan kegelapan. Kami akan meyalakan lilin, untuk

mendapatkan secercah sinar, yang akan menyinari dunia, dan juga hati kami. Insya Allah. (Sydney, 23 September 2012)

Menuju Generasi Emas NTB 2025

Saya kira, kado terindah buat Nusa Tenggara Barat yang hari ini berusia 54 Tahun adalah keberhasilannya dalam hal pembangunan sumberdaya manusianya. Baik dalam bidang pendidikan, kesehatan, maupun ekonomi. Di bidang pendidikan misalnya, baru pertama kali dalam sejarah, NTB berhasil meningkatkan angka partisipasi sekolah untuk anak usia sekolah SD-SMP atau MI-MTs mendekati 100 persen. Ini artinya, nyaris tidak ada anak usia sekolah pendidikan dasar (SD-SMP) yang tidak berada di bangku sekolah. Sementara untuk anak usia SMA dan sederajat, makin tahun juga makin meningkat. Targetnya, di tahun 2012 ini, APM untuk SMA dan sederajat bisa mendekati angka 90 persen. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa program wajib belajar 9 tahun di NTB sudah berhasil dilaksanakan dan telah siap untuk melaksanakan wajib belajar 12 tahun.

Di bidang kesehatan, derajat kesehatan masyarakat juga kian meningkat. Ini diindikasikan dengan makin menurunnya angka kematian bayi dan balita dan ibu melahirkan. Menurut pakar demografi dari Universitas Mataram, Ir. Anwar Fachry, MA, berdasarkan evaluasi dari hasil Sensus Penduduk 2010, NTB mengalami apa yang disebut sebagai *silent revolution*. Ini ditunjukkan dengan data yang sangat positif berkait dengan kondisi demografi di NTB. Usia harapan hidup masyarakat di NTB meningkat drastis menjadi 67 tahun dari posisi 58 pada SP

2000. Ini menunjukkan berbagai program pembangunan kesehatan di NTB telah berhasil dengan sangat baik. Berbagai Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit menular seperti malaria, diare, dan lain-lain, yang pada zaman lima sepuluh tahun lalu seolah menjadi 'langganan' di NTB, lima tahun terakhir ini 'nyaris tak terdengar.'

Di bidang ekonomi, baru pertama kali dalam sejarah (meminjam kalimat pak CM dalam akun twitternya), NTB berhasil menurunkan prosentase angka kemiskinan di bawah dua puluh persen. Bahkan dalam dua tahun terkahir, NTB berhasil menjadi propinsi paling tinggi ke empat terkait penurunan angka kemiskinan ini setelah Papua, Maluku, dan Gorontalo. Keberhasilan ini tentu tidak lepas dari berbagai program pembangunan yang secara terarah dan terpadu di laksanakan di NTB, baik di bidang sosial, ekonomi, dan infrastruktur. Telah mulusnya ruas ruas jalan-jalan nasional dan propinsi dari Ampenan sampai Sape menjadi salah satu penyumbang meningkatnya pendapatan masyarakat dan penurunan angka kemiskinan tersebut. Disamping program lain seperti BSS, 3A, Wirausahabaru, dan lain-lain.

Generasi Emas 2025

Dari berbagai keberhasilan Nusa Tenggara Barat tersebut, maka bukanlah sebuah hayalan kalau kemudian kita mulai membangun visi bersama menghadapi masa depan dengan target capaian di tahun 2025. Visi yang saya maksudkan adalah tekad kita “mempersiapkan Generasi Emas NTB 2025.”

Mengapa 2025? Pertama, karena 2025 adalah akhir dari RPJP NTB 2005-2025. Kedua, pada tahun tersebut, anak-anak yang lahir di era 2000an dimana cukup banyak program pemerintah yang mempengaruhi secara positif tingkat intelektualitas dan derajat kesehatan mereka, seperti Wajar 9 Tahun, HKI, NICE, PKH, PNPM, dan lain-lain akan berusia belasan dan duapuluhan tahun. Artinya pada usia-usia emas produktivitas manusia. Ketiga, menurut BPS, Indonesia, termasuk NTB mendapatkan “bonus demografi” antara tahun 2010-2035, dimana penduduk usia produktifnya lebih banyak dari mereka yang tergolong non produktif.

Dengan demikian pada tahun tersebut, jumlah mereka yang tergolong produktif di NTB akan dominan. Tinggal bagaimana kita mengarahkan sehingga mereka bisa menjadi tenaga kerja produktif dan sekaligus berkualitas. Kata kuncinya di situ. Seperti yang dikatakan oleh Prof. Rochmat, yang juga Rektor Universitas Negeri Yogyakarta, Generasi Emas adalah “generasi berkarakter, produktif, unggul, kompetitif, dan peduli.” Kalau kita mengacu kepada definisi versi Ary Ginanjar, seorang motivator dan pendiri Lembaga

ESQ, generasi emas adalah sebuah generasi yang hidup di era tersebut, memiliki tingkat intelektualitas, emosionalitas, dan spiritualitas, tinggi dan seimbang. Dengan keseimbangan dan keunggulan ketiga unsur tersebutlah, menurut Ary, Indonesia ini akan dapat menguasai dunia.

Mengukur Generasi Emas itu bisa juga sederhana. Untuk pendidikan, misalnya, ukuran paling sederhana adalah tidak ada lagi anggota generasi tersebut yang buta huruf. Bahkan sebagian besar, artinya lebih dari setengahnya telah menamatkan pendidikan SMTA. Wajar 12 Tahun sudah tuntas. Prosentase penduduk yang masuk di Perguruan Tinggi juga meningkat. Katakanlah 25 persen dari penduduk usia produktif. Dapat didisain, berapa persen anak-anak lulusan SMTA yang harus melanjutkan ke PT. Untuk menjangkau 'emas' yang sesungguhnya, harus juga direncanakan dari sekarang sebuah program yang mengidentifikasi anak-anak berotak cemerlang atau jenius untuk 'diprogramkan' masuk ke Perguruan Tinggi terkemuka di dalam dan luar negeri. Pada waktunya, anak-anak inilah yang diharapkan akan membangun dan/atau membawa nama baik NTB di tingkat nasional bahkan Indonesia di dunia internasional.

Untuk kesehatan, indikator umum tentulah usia harapan hidup dengan berbagai variabelnya. Yang jelas adalah, berbagai perilaku hidup bersih dan sehat sudah menjadi budaya masyarakat kita di NTB. Semua rumah sudah memiliki jamban sendiri. Demikian pula akses masyarakat terhadap air bersih juga demikian. Tidak boleh ada kampung atau desa yang warganya kesulitan terhadap air bersih sepanjang tahun. Program NTB Hijau diharapkan sudah menampakkan hasil dan memberi manfaat nyata pada tahun itu, dimana luas lahan kering sudah berkurang secara

signifikan. Berbagai program pembangunan waduk dan embung yang sekarang masuk RPJM sudah akan selesai dan bahkan pada tahun itu sudah dimanfaatkan untuk mengairi lahan yang sekarang masuk kategori kering.

Dari ukuran ekonomi, pada tahun 2025, sudah akan sangat sedikit mereka yang masuk kategori keluarga miskin. Katakanlah di bawah lima persen. Bahkan kalau menggunakan ukuran kemiskinan yang kita pakai sekarang, pada tahun 2025, mungkin sudah tidak akan ada lagi. Sebagian besar angkatan kerja telah terserap di berbagai bidang ketenaga kerjaan. Kalau sekarang, pendapatan per kapita kita di NTB berada di bawah rata-rata nasional, maka pada tahun 2025, kita harus berani menargetkan sama atau bahkan di atas rata-rata nasional. Sehingga jika Indonesia berhasil mencapai target peningkatan pendapatan per kapita sesuai dengan Roadmap MP3EI 15.000 dolar per kapita pertahun pada tahun 2025, maka di era NTB Emas 2025, kita juga harus bisa seperti itu.

Mungkin masih banyak lagi indikator lain yang dapat kita disain yang akan menjadi pegangan kita dalam mengarahkan berbagai program pembangunan di NTB sepuluh atau lima belas tahun ke depan. Namun yang pasti adalah, apa yang telah kita hasilkan di saat kita merayakan Ulang Tahun NTB ke 54 ini, akan menjadi modal utama kita untuk bergerak, bekerja, dan melanjutkan berbagai ikhtiar secara bersama-sama. Sekali layar terkembang, pantang biduk surut ke belakang. Pada saat itulah, NTB akan benar-benar menjadi bagian dari Indonesia, dalam makna yang sesungguhnya, seperti yang menjadi salah satu alasan, mengapa Bapak Dr. TGH M. Zainul Majdi, berkehendak untuk maju lagi menjadi Gubernur NTB lima tahun mendatang. Insya Allah. Wallahu 'alam bissawab.

Empat T, oleh-oleh dari Eropah

Ketika transit di bandara internasional Malaga, salah satu kota besar di Spanyol—setelah berwisata ke Granada, Spanyol, kota peninggalan zaman keemasan Islam di Eropah, saya membeli sebuah buku manajemen yang merupakan kumpulan dari berbagai buku seller. Judulnya adalah “The Management Gurus, Lessons from The Best Management Books of All Time.” Buku ini merupakan himpunan abstraksi dan ringkasan eksekutif dari 15 buku manajemen karya para penulis terbaik dunia.

Salah satu penulis yang tulisannya diringkas dalam buku tersebut adalah John C. Maxwell yang menulis buku dengan judul “Winning with People.” Dalam buku ini Maxwell menjelaskan bagaimana cara membangun dan mempertahankan hubungan baik dengan orang-orang, yang pada dasarnya untuk kepentingan kita sendiri juga. Tulisan tersebut didasarkan atas hasil observasinya terhadap orang-orang sukses dalam sejarah modern peradaban dunia, seperti Dale Carnegie, John Wooden, Ronald Reagan, dan Norman Vincent Peale.

Buku lain yang ditulis Maxwell adalah “The 21 Irrefutable Laws of Leadership.” Buku ini menjadi salah satu best seller di Amerika Serikat yang dibeli oleh lebih dari satu juta orang sejak tahun 1999. Di dalam buku tersebut diuraikan 21 Hukum Kepemimpinan yang tak bisa ditolak. Salah dua di antara hukum tersebut adalah “Trust is foundation of leader

ship” (kepercayaan adalah landasan utama sebuah kepemimpinan) dan “Leadership develops daily, not in a day” (kepemimpinan dibangun setiap hari, bukan dalam sehari).

Maksudnya secara sederhana tidaklah sulit untuk dipahami. Bahwa kepercayaan adalah sesuatu yang sangat berharga dan harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Dengan kata lain, kalau kita mau menjadi pemimpin, maka kepercayaan orang lain haruslah kita pelihara dan jaga sebaik-baiknya. Ada pepatah sewaktu sekolah yang sering kita dengar: “sekali lancung keujian, seumur hidup orang tak percaya”. Maksudnya tidak lain agar kita jangan pernah berlaku tidak jujur atau berbohong pada orang lain.

Hukum yang kedua, adalah hubungan keseharian kita dengan orang lain akan mempengaruhi tingkat kepercayaan kita dan juga kepemimpinan kita. Bisa saja ada orang yang tiba-tiba diangkat menjadi pemimpin secara struktural kekinian, karena pangkat atau senioritasnya. Namun untuk membangun kepemimpinan agar kemudian tugas-tugasnya menjadi pemimpin bisa efektif tentu dia harus membangun hubungan yang baik dengan para anak buahnya dalam waktu tertentu. Tidak mungkin dalam sehari.

Yang menarik dari tulisan Maxwell tersebut adalah adanya prinsip Empat T, yang menurut saya seringkali kita lupakan sehari-hari. Ada empat T yang harus mendapat perhatian kita sebagai pemimpin ataupun mereka yang mau menjadi pemimpin.

T yang pertama adalah “Total Picture”. Setiap pemimpin tidak boleh mengambil keputusan hanya dengan informasi sebagian alias yang tidak utuh. Apalagi tidakimbang. Seorang pemimpin harus memiliki gambaran yang utuh dan berimbang terhadap suatu permasalahan. Untuk itu, kita harus dapat

mendengarkan, mencari informasi dari berbagai pihak yang terlibat atau kita anggap mengetahui persoalannya.

T yang kedua adalah “Timing”. Seorang pemimpin harus dapat mengetahui falsafah waktu. Bagi seorang pemimpin, waktu adalah sesuatu yang amat berharga. Banyak kita dengar orang mengatakan, “kesempatan tidak pernah datang dua kali.” Maksudnya jelas, kita harus dapat memanfaatkan waktu sebaik baiknya. “Jangan membuang waktu,” kata orang tua kita. Dalam tulisan Maxwell: seorang pemimpin harus dapat mengetahui “kapan dan di mana dia harus mengatakan apa dan kepada siapa.” Janganlah kita mengeluarkan kata kata yang ternyata waktunya (timingnya) tidak tepat; atau audiensnya tidak tepat. Demikian juga janganlah kita tidak mengatakan sesuatu jika memang ‘timing’nya memang mengharuskan kita untuk mengatakannya. Dalam bahasa yang lebih sederhana, kalau waktu itu kita harus marah, ya kita harus keluarkan. Kalau waktunya bercanda, ya jangan kita marah. Kira-kira demikian.

T yang ketiga adalah “Tone”, atau nada suara. Seringkali kita tidak tepat dalam mengeluarkan nada suara. Akibatnya cukup fatal. Orang lain menganggap kita lagi marah, padahal sesungguhnya tidak demikian. Ini hanya karena nada suara kita yang menurut orang yang mendengarkan terlampau tinggi. Itulah sebabnya, nada suara ini juga perlu kita perhatikan. Jangan sampai membuat orang salah persepsi.

T yang keempat atau terakhir, “Temperature”, atau suhu udara sekitar kita yang tentunya terkait dengan persoalan yang kita hadapi. Seringkali suhu udara di sekitar kita ‘meningkat’ manakala reaksi yang timbul dari sebuah aksi yang timbul lebih dari seharusnya. Ada istilah ‘terlalu membesar-besarkan persoalan.’ Maksudnya adalah janganlah kita bereaksi yang berlebihan terhadap sebuah persoalan atau

aksi yang sesungguhnya jika ditanggapi dengan kepala dingin akan menjadi selesai. Akan menjadi teratasi. Saya kira di situlah letak the art of leadership. Seni dalam memimpin. Yakni bagaimana kita mengelola sebuah persoalan yang dihadapi, sehingga setiap persoalan yang timbul selalu dapat diatasi dengan efektif dan efisien. Tidak dibiarkan merembet ke mana-mana, yang dapat memperburuk suhu udara di sekitar kita. Wallahu 'alam bissawab.

BIL Operasional, NTB Take Off, InshaAllah



KETIKA menghadiri acara groundbreaking (menandai dimulainya pembangunan atau sering juga diartikan sebagai peletakan batu pertama) BIL pada hari Sabtu, tanggal 19 Januari 2008, saya sempat menulis sms ke beberapa teman, yang intinya saya menyatakan bahwa BIL inilah kelak yang akan

menjadi pertanda take off-nya masyarakat Nusa Tenggara Barat.

Waktu itu yang melaksanakan ground breaking adalah Bapak Ir Hatta Radjasa—yang kala itu menjabat Menteri Perhubungan, didampingi Gubernur NTB Bapak HL Serinata. Berbagai macam perasaan para hadirin pada waktu itu tak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Ada rasa haru, bahagia, bangga, dan tentu sedih juga. Semua berbaur menjadi satu. Setelah sekian lama tak jelas ceritanya, BIL akhirnya mulai dibangun. Banyak yang optimis. Namun tidak sedikit yang sebaliknya, pesimis. Akankah BIL akan menjadi Bandara Udara Internasional yang kemudian operasional, suatu hari kelak. Sebuah pertanyaan yang saya yakin menghantui semua hadirin pada waktu itu. Sikap pesimis, dan bahkan skeptik, tentu dibarengi dengan berbagai alasan masing-masing.

Pak menteri sendiri seakan tidak percaya terhadap apa yang dilakukan. Beliau bercerita bahwa ada pihak-pihak tertentu yang menghalanginya untuk melakukan acara *ground breaking* itu. Dengan berbagai alasan yang berbeda. “Tapi karena ini adalah suatu pekerjaan yang baik, di tempat yang baik, dengan niat yang baik, untuk kesejahteraan masyarakat, saya berketetapan hati untuk datang ke sini. Apapun resikonya ...,” ungkap beliau yang disongsong riuh tepuk tangan meriah para undangan.

Dan benar saja: terjadilah acara itu melalui deru sirene dan peragaan pergerakan alat berat, sebagai pertanda dimulainya pembangunan Bandara Internasional Lombok yang kemudian kita kenal dengan istilah, “BIL”, itu. Alhamdulillah rabbil alamin.

Kini, di hari-hari menjelang mulai beroperasinya BIL, Sabtu, 1 Oktober 2011, tentu banyak orang yang tidak bisa

tidur nyenyak. Sebab membayangkan akan mulai beroperasinya BIL, tentu akan membuat dua perasaan yang berbeda juga. Mereka yang senang dan mereka yang tidak senang.

Yang berpikiran positif dan yang berpikiran (mungkin, maaf) negatif. Sesuatu yang sesungguhnya sangat lazim, dan biasa terjadi di mana-mana. Kalau meminjamalur pikirnya Hatta Radjasa—ketika melaksanakan ground breaking di awal 2008 lalu, yang menyatakan bahwa mereka yang kelihatannya tidak setuju dengan pembangunan BIL, sesungguhnya bukan tidak setuju, akan tetapi ragu-ragu. Meragukan apakah benar-benar pemerintah mau membangun bandara internasional di tengah-tengah pulau yang belum banyak dikenal masyarakat dunia. Kalau memakai istilah bahasa inggris, ‘in the middle of nowhere.’ Apakah benar, pemerintah akan membangun bandara baru, padahal bandara yang sudah ada sekarang, konon, banyak yang merugi alias lebih besar biaya operasional daripada pemasukan.

Apakah jumlah penumpang yang masuk ke NTB sedemikian banyaknya, sehingga bandara yang ada sudah tidak mampu memuat lagi? Bahkan ada tokoh yang menyangsikan niat tersebut karena di APBN tidak ada nomenklature atau pos anggarannya. Dan banyak lagi alasan yang dipakai untuk menjadi ragu tadi. Sementara yang setuju menjadi makin berdebar-debar, karena apabila ini benar-benar terjadi, pastilah roda ekonomi di daerah ini akan berputar lebih kencang lagi. Akan terjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di daerah sekitar BIL. Akan terjadi perputaran uang yang makin bertambah, aktivitas ekonomi masyarakat akan semakin dinamis. Yang pada gilirannya, daerah wisata Lombok bagian selatan yang selama ini ibarat the sleeping beauty akan bangun dari tidur panjangnya. Akan sangat

mempermudah para investor pariwisata untuk menanamkan investasinya di wilayah ini.

Lahirnya BIL akan menjadi seorang ‘pangeran’ yang kedatangannya akan membuat sang putri jelita terbangun dari tidur panjangnya. Dan putri itulah yang kini kemudian kita kenal dengan kawasan pariwisata, Mandalika. Yang sebentar lagi akan diresmikan menjadi kawasan ekonomi khusus pariwisata nasional Mandalika.

NTB Take Off

Pengalaman di berbagai daerah yang membangun bandara menunjukkan fenomena seperti yang digambarkan di atas. Terbangunnya bandara internasional Ngurah Rai, Denpasar, kemudian disusul beroperasinya bandara baru di Makassar dan Surabaya adalah contoh yang menunjukkan ‘kemampuan’ sebuah bandara menjadi trigger atau pemicu pertumbuhan ekonomi suatu kawasan.

Secara sederhana bisa dijelaskan oleh teori ekonomi bahwa dengan beroperasinya sebuah bandara, tentu akan semakin banyak investor yang tertarik untuk datang dan menebarkan investasinya. Apakah dengan membangun pusat perbelanjaan, membangun pabrik, membangun perhotelan, dan lain-lain. Yang pasti, dengan berbagai pembangunan tersebut akan dapat membuka lapangan kerja, sehingga akan mengurangi dampak pengangguran dan kemiskinan. Dengan demikian, pendapatan masyarakat pun akan semakin meningkat.

Apabila pendapatan meningkat, maka akan diimbangi dengan pola konsumsi yang semakin meningkat pula. Meningkatnya konsumsi akan mempengaruhi omset para pedagang bahan makanan. Juga produktivitas para petani akan meningkat pula. Mereka inilah yang secara langsung

merasakan peningkatan omset, yang pada gilirannya menambah keuntungan. Maka para pedagang dan petani akan meningkat asetnya. Yang tadinya tidak punya sepeda motor menjadi punya sepeda motor. Yang tadinya tidak pernah terpikir akan punya mobil, menjadi punya mobil. Yang tadinya tergolong pengusaha mikro menjadi pengusaha kecil, menengah, dan bahkan ada yang sangat progresif menjadi pengusaha besar.

Demikianlah seterusnya, sehingga dalam postur atau struktur ekonomi daerah ini akan nampak sebuah kondisi di mana proporsi penduduk dengan pendapatan menengah ke atas akan menjadi semakin banyak.

Peran dunia swasta dalam pembangunan akan menjadi semakin menonjol dan bahkan dominan, dibandingkan dengan peran atau dana dari pemerintah. Boleh saja dana pemerintah, baik dalam bentuk APBD atau APBN sekalipun di bawah Rp 10 T, namun investasi swasta antara 5-10 kali lipatnya. Kalau ini terjadi, inilah kemudian yang dimaksud Prof WW Rostow dalam “Stage of Development”-nya sebagai fase take off atau fase tinggal landas, sebagai kelanjutan dari kondisi pra tinggal landas—di mana peran pemerintah masih sangat dominan.

Selamat *take off* masyarakat NTB. Semoga kemiskinan di daerah ini makin berkurang, Insya Allah.

Nihil Temuan Pemeriksaan

Masih teringat dalam benak saya, pada suatu ketika di awal masa ‘kegubernuran’ Bapak Tuan Guru Bajang, TGH Muhammad Zainul Majdi, beliau bertanya kepada Kepala Inspektorat (Inspektur) pada waktu itu, alm. Bapak H. Junaidi Najamuddin. “Pak inspektur, mungkinkah ketika Bapak melakukan pemeriksaan di SKPD SKPD, tidak menemukan sama sekali sesuatu yang keliru, alias nihil temuan?” Secara spontan pak inspektur menjawab “tidak mungkin pak Gub?” yang kemudian di balas lagi oleh pak Gub kala itu, “mengapa tidak mungkin? Bukankah tugas Bapak di samping memeriksa juga melakukan pembinaan; kalau tidak mungkin, apa gunanya pembinaan? Bukankah dengan pembinaan itu, makin lama temuan-temuan kesalahan itu akan makin berkurang dan pada suatu ketika akan menjadi nihil sama sekali?”

Sebuah dialog yang bagi saya terus terngiang-ngiang sampai hari ini. Saya sangat ingin, ketika saya menjadi Kepala Bappeda, atau ketika menjadi Kadis Dikpora, bahwa dari hasil pemeriksaan inspektorat, atau Irjen Kementrian, atau BPKP, dan atau BPK sekalipun, staf saya melaporkan kalau di SKPD yang saya pimpin tidak ditemukan suatu kekeliruan alias temuan hasil pemeriksaan sekecil apapun. Baik yang sifatnya administrasi, ataupun dan apalagi keuangan. Namun harapan pak Gubernur seperti yang saya ceriterakan di atas, masih belum dapat terwujud. Ada saja kekeliruan yang menjadi

'temuan pemeriksa.' Baik yang sifatnya administrasi, ataupun juga keuangan.

Lucunya, untuk tidak mengatakan sesuatu yang susah diterima, kekeliruan atau kesalahan yang terjadi seringkali merupakan perulangan dari tahun ke tahun. Bahasa-bahasa pemeriksa seperti "tidak sesuai juklak/juknis," atau "terjadi kemahalan harga," atau "barang tidak sesuai dengan spesifikasi," atau "konstruksi bangunan tidak sesuai perencanaan" atau "dokumen perjalanan tidak lengkap," dan sebagainya adalah kalimat atau frase yang sesungguhnya sangat terukur. Artinya, si terperiksa juga dengan mudah menerima atau memahami kalimat tersebut. Yang saya maksudkan dengan 'lucu' adalah, kesalahan yang sama masih bisa terjadi pada tahun berikutnya. Padahal si terperiksa adalah orang atau pejabat yang sama.

Ketika memberikan binwas pada jajaran inspektorat beberapa waktu yang lalu, setelah menjabat Sekda, cerita di atas saya ungkapkan dengan lebih utuh. Lalu saya buat kalimat tanya, "dengan fenomena tersebut, siapa sesungguhnya yang bermasalah? Apakah kawan-kawan aparat pelaksana yang tidak mampu memperbaiki kesalahan yang dibuat tahun sebelumnya, atautkah kawan-kawan pemeriksa yang suka mengada-adakan kesalahan, yang tidak happy, tidak merasa bekerja dengan serius, kalau tidak ada temuan ketika melakukan suatu pemeriksaan?" Saya kemudian melanjutkan, "kalau yang kedua yang terjadi maka, mungkin mindset rekan-rekan pemeriksa yang harus segera diubah. Sudah tidak masanya lagi kita menggunakan paradigma buruk sangka. Menurut paradigma buruk sangka, 'semua orang pasti membuat kesalahan kecuali yang benar-benar bekerja dengan baik.' Kita harus dapat mengubahnya menjadi sebaliknya, paradigma baik sangka. Artinya, 'semua orang pasti akan

melakukan sesuatu dengan baik dan benar, kecuali yang memang punya niat dan tabiat jahat.”

Memang manusia bukan makhluk yang sempurna. Manusia tidak luput dari kesalahan. Tapi, menurut guru saya waktu SMA dulu, hanya manusia yang maaf, bodoh saja, yang membuat kesalahan dengan sengaja. Dari situlah saya sangat terinspirasi dari dialog antara Gubernur TGB dengan Inspektur di atas. Melalui kerja keras dan cerdas, serta ketelitian yang tinggi, Nihil Temuan Pemeriksaan atau NTP di instansi kita masing-masing harus dapat diikhtiarkan. Sehingga provinsi NTB bukan hanya dikenal dengan predikat WTP yang sudah lima kali berturut-turut diperoleh, tapi ke depan, kita juga harus mampu membangun budaya NTP alias Nihil Temuan Pemeriksaan. Mulai dari entitas yang paling kecil, di setiap SKPD kita masing-masing. Dirgahayu NTB ke 58, 17 Desember 2016. Wallahua’lambissawab. (Jkt, 081216)

Merintis Kerjasama Dengan Belanda

Adalah Dr. Lalu Hayanul Haq, dosen Fakultas Hukum Universitas Mataram yang sedang menyelesaikan kuliahnya di Universitas Utrecht Belanda, yang sangat bersemangat untuk menjalin kerjasama antara Pemprov NTB dengan Pemprov Utrecht Belanda. Alasannya jelas, antara Utrecht dengan Nusa Tenggara Barat memiliki kesamaan-kesamaan yang relatif terhadap negaranya. Artinya, menurut Aak, demikian biasa dia dipanggil di kampusnya, banyak praktek baik yang dilaksanakan oleh pemerintah Utrecht yang dapat ditiru atau dipelajari oleh pemrov NTB dalam hal melaksanakan pembangunannya. Salah satu yang kongkrit adalah kita dapat mengirim staf ke Utrecht University untuk meningkatkan ilmu pengetahuannya. Baik melalui program pendidikan ber gelar, maupun yang non gelar, seperti kursus-kursus singkat.

Masih menurut Aak, Utrecht juga berpengalaman menjalin kerjasama dengan beberapa negara di kawasan Afrika. “mumpung saya masih di sini,” kata beliau pada saya suatu ketika. Saya fikir benar juga. Bagiamanapun kerjasama-kerjasama seperti itu memang perlu dirintis, untuk kemudian dikembangkan sehingga dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi daerah. Memang konsekuensinya kita harus mau mengeluarkan sedikit investasi, dari uang daerah. Sebab untuk mendapatkan sponsor, tidak mudah, kalau kita tidak merintis dari awal. Dan disitulah perlunya dana awal itu.

Maka pada tahun 2010 (Cek persisnya) saya menyediakan anggaran di Bappeda untuk dua kegiatan. Pertama adalah untuk kegiatan Capacity Building Workshop on Good Governance. Ini dimaksudkan untuk mendidik para pegawai khususnya yang ada di Bappeda-bappeda kabupaten/kota, provinsi, dan tokoh-tokoh potensial dari kalangan LSM. “jatah” untuk LSM ini memang khusus diadakan karena permintaan dari Utrecht seperti itu. Jadi dalam workshop itu nantinya akan ada dinamika yang positif, dimana proses interaksi diskusi tidak hanya melibatkan ‘suara’ birokrasi, tapi juga perlu ada suara non pemerintah. Di situlah peran dari utusan peserta dari LSM. Disamping juga peserta perwakilan dari kalangan akademisi.

Porsi anggaran lainnya adalah untuk keperluan perjalanan ke dan dari Utrecht Belanda. Waktu itu kami anggarkan untuk mentor yang dari Belanda dan peserta terpilih dari NTB yang akan dikirim ke Belanda. Dengan demikian, pelaksanaan work-shop di Mataram akan diikuti dengan serius oleh para peserta karena ada ‘iming-iming’ empat orang akan dikirim ke Belanda. Pembiayaan selama di Belanda juga mendapat bantuan dari Utrecht. Kami tidak perlu membayar biaya workshop selama di Belanda. Tapi kami menanggung biaya perjalanan para tutor yang dikirim dari Utrecht ke Mataram. Kerjasamanya seperti itu.

Untuk memulai proses kerjasama itu, Gubernur NTB diundang ke Belanda pada bulan November 2010; untuk menanda tangani piagam kerjasama antara Universitas Utrecht dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sebagai Kepala Bappeda, saya ikut dalam kunjungan ke Belanda tersebut. Kunjungan yang berlangsung pada akhir November 2010.

Gagasan Sister Province

Meskipun pada awalnya, kerjasama yang ditandatangani Gubernur NTB adalah dengan Universitas Utrecht, namun rombongan kami diterima juga oleh Wakil Gubernur Provinsi Utrecht. Dalam diskusi dengan wakil gubernur Utrecht, tercetus gagasan untuk ke depan akan dibangun kerjasama antara kedua provinsi dari negara yang berbeda tersebut. Wakil gubernur Utrecht menyambut dengan hangat kedatangan Gubernur NTB bersama rombongan.

Salah satu aspek yang menarik di Utrecht ini adalah pertumbuhan ekonominya yang sangat progresif dalam dekade terakhir. Banyak perusahaan-perusahaan multi nasional yang mendirikan pabriknya di Utrecht. Artinya, ada daya tarik tersendiri, termasuk mungkin kebijakan pemerintahnya yang perlu kita pelajari, yang membuat ratusan perusahaan multinasional menempatkan pabrik atau membuka kantor perwakilan perusahaannya di provinsi tersebut.

Salah satu yang mereka sebut sebagai faktor positif dalam peningkatan kinerja pembangunan khususnya ekonomi di Utrecht adalah keterlibatan para akademisi dari kampus membantu pemerintah. Dengan kata lain, hubungan antara kampus dengan pemda sangat baik dan bersinergi. Ada profesor-profesor yang sangat piawai dalam menjalin kerjasama dengan berbagai perusahaan multinasional yang terlibat atau dilibatkan oleh Pemdanya dalam rangka menjalin kerjasama internasional. Karenanya tidak mengherankan dalam sepuluh atau dua puluh tahun terakhir pertumbuhan ekonomi Utrecht luar biasa. Konon, ratusan industri yang berorientasi ekspor berdiri dan memberi kontribusi luar biasa terhadap perekonomian provinsi tersebut.

Dari kunjungan ini muncul gagasan untuk membangun kerjasama langsung antara Utrecht dengan Nusa Tenggara Barat. Ya semacam *sister province* program. Gagasan ini mungkin perlu ditindak lanjuti. Salah satu yang yang saya kira strategis untuk mewujudkan ini adalah mencari sponsor pendanaan; apakah dari Belanda sendiri atau dari donor internasional. Dan kalau ini bisa terwujud, manfaat yang akan diperoleh sudah jelas; diantaranya adalah peningkatan kompetensi sumberdaya manusia birokrasi kita di Nusa Tenggara Barat. Kemungkinan lain yang dapat digarap adalah kerjasama dalam pengiriman tenaga kerja keperawatan yang konon cukup tinggi kebutuhan mereka.

Kebetulan dalam kunjungan ke Belanda tersebut kami bertemu dengan koordinator perawat Indonesia yang bekerja di Belanda. Dia yang menginformasikan peluang itu. Tinggal bagaimana kita menindak lanjutinya. Apalagi ketika BLKI kita di Lombok Timur sudah mulai operasional, maka penyiapan tenaga kerja terdidik seperti tenaga kerja perawat itu dapat dilaksanakan di BLKI tersebut, atas biaya dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Aspek lain yang kita dapat belajar dari Belanda, adalah terkait dengan pengembangan pariwisata. Dengan kerjasama *sister province* tersebut, pasti akan ada kemudahan-kemudahan yang akan diperoleh dalam rangka memasarkan destinasi wisata kita di Belanda. Di samping itu, kita juga akan dapat belajar untuk memperbaiki dan mengembangkan berbagai destinasi yang kita miliki agar lebih dapat menjadi destinasi yang ber kelas dunia.

Dari segi irigasi, Belanda adalah negara yang paling baik dalam mengelola jaringan irigasinya. Nah kita mungkin dapat mendatangkan para ahlinya ke NTB untuk dapat menyempurnakan jaringan irigasi kita, khususnya di

Lombok. Bukankah selama ini masih sangat banyak air sungai kita yang mengalir ke laut dengan percuma? Di sisi lain, masih cukup banyak areal persawahan kita yang hanya mengandalkan air hujan, untuk pengairannya.

Kata kuncinya adalah: mari kita mulai bekerjasama, membuka jaringan internasional, sebagai salah satu milestone dalam MDGs, yaitu jaringan kerjasama internasional. Kita, NTB, tentu tidak ingin menjadi daerah yang seperti “katak dalam tempurung.” Jangan pula kit terbelenggu dengan jargon “IPM rendah,” yang mengesankan kita tidak memiliki kualitas SDM yang baik. Nah, dengan membangun kerjasama internasional, maka bukan tidak mungkin kesan tersebut akan dapat kita sirnakan, selaras dengan makin banyaknya hal-hal baik yang kita ekspos keluar. Tidak hanya gizi buruk dan buta huruf. Wallahu a’lam bissawab. (Mataram 310314)

GO Internasional

ADALAH benar apa yang dikatakan para futurist dunia, seperti Fukuyama, Putnam, Maslow, dan lain lain bahwa makin hari dunia makin mengglobal. Artinya hubungan antara satu negara dengan Negara lain, antara satu bangsa dengan bangsa lain, bahkan hubungan antara personal yang satu dengan personal yang lain, makin menjadi jadi. Hubungan tersebut tidak lagi sebatas hubungan social, hubungan kekerabatan, namun menjadi hubungan ekonomi dan saling ketergantungan.

Bayangkan, jika Jepang tidak membina hubungan baik dengan Negara lain, kemana produk produk mobil dan sepeda motor mereka yang jutaan per hari itu akan dipasarkan? Demikian juga Amerika, Eropah dan lain lain. Demikian pula halnya dengan Negara Negara yang masih terkebalakang atau dalam istilah sosiologinya disebut sebagai developingcountries, atau Negara sedang berkembang. Ketika kemampuan mereka masih sangat terbatas untuk menghasilkan produk produk yang dibutuhkan oleh masyarakatnya, seperti alat transportasi, alat alat produksi pertanian, dan lain lain. Dengan bahasa yang lebih sederhana, dunia antara bangsa ini kian hari kian saling tergantung. Baik antara sesama Negara maju, ataupun antara Negara maju dengan Negara yang sedang berkembang.

Jika pada zaman dahulu, hubungan antara Negara ini kemudian diterjemahkan secara sepihak oleh Negara maju, yang kemudian terjadilah penjajahan. Negara maju menjajah

Negara lain, dengan mengeksploitasi berbagai sumberdaya alam dan juga sumberdaya manusianya. Tujuannya tidak lain, dan sesungguhnya sama seperti yang ada sekarang, yaitu untuk kesejahteraan rakyatnya sendiri.

Sekarang, umumnya semua Negara sudah melek, sudah memiliki kapasitas sebagai Negara bangsa, sehingga tidak lagi dapat dieksploitasi dengan menggunakan metoda penjajahan. Maka yang digalakkan dan terjadi kemudian adalah hubungan perdagangan, hubungan bilateral ataupun multilateral yang pada dasarnya kemudian tercipta hubungan yang saling menguntungkan.

Peraturan pemerintah di Indonesia yang ada sekarang memungkinkan daerah membuka atau merintis hubungan langsung dengan pemerintah daerah di luar negeri. Maka terjadilah apa yang kemudian disebut sebagai twincity, sistercity, atau kota kembar. Ini biasanya terjadi antara satu kota di Indonesia dengan satu kota di Negara lain. Yogyakarta menjalin hubungan sistercity dalam istilah ini dengan Kyoto di Jepang. Hubungan antara provinsi disebut sisterprovince, seperti hubungan antara Papua dengan salah satu provinsi di China.

Manfaat dari hubungan seperti ini tentunya banyak; diantaranya adalah memungkinkan terjadinya pertukaran staf dalam arti kita belajar ke sana melalui proses yang tidak terlalu berbelit belit; atau mendatangkan mereka ke Indonesia. Demikian juga dalam hal bisnis, hubungan perdagangan bisa menjadi lebih lancar, apabila kita memiliki pelaku bisnis yang mampu melihat peluang dengan baik. Ada showroom atau outlet daerah kita yang dapat dibangun di Negara tersebut, yang sekaligus dapat menjadi pusat informasi bagi mereka yang tertarik untuk berhubungan dengan daerah kita.

Mengapa dengan Utrecht–Belanda?

Ketika Gubernur NTB, Kepala Bappeda, Kepala Biro Umum, Kadis Dikpora Lombok Timur, dan lain-lain berkunjung ke Belanda beberapa waktu lalu, tujuannya adalah untuk itu. Yakni membangun kerjasama lintas daerah lintas Negara. Ada kontak person kita yang ada di Belanda yang selama setahun belakangan ini telah mengambil inisiatif dan menegerjakan berbagai persiapan yang diperlukan untuk terwujudnya kerjasama antara NTB dengan Utrecht. Mengapa dengan Utrecht? Karena kontak person tersebut kebetulan bermukim di Utrecht, Belanda; dan secara kebetulan ada koleganya yang menjadi staf ahli Gubernur Utrecht, sehingga komunikasi dengan PemProvUtrecht diharapkan dapat lebih lancar.

Utrecht adalah salah satu dari dua belas provinsi yang memiliki pertumbuhan ekonomi tertinggi di Belanda. Saya hampir tak percaya ketika di terangkan kalau di provinsi ini ada seribu dua ratus lebih perusahaan internasional memiliki kantor atau aktivitas produktif. Baik dari Jepang, Amerika, Australia, Jerman, dan lain lain.

Mengapa demikian banyak? Karena mungkin provinsi ini mampu memberikan layanan yang terbaik bagi para investor untuk berinvestasi di Utrecht. Ada kemudahan perijinan dan fasilitas sarana prasarana yang diberikan kepada para pemilik modal, sehingga mereka berlomba lomba untuk mendirikan pabrik atau minimal semacam ‘kantor penghubung’nya di daerah ini, yang akan menjadi jendelanya untuk merebut pasar Eropah. Dan yang pasti, akan menciptakan langan kerja bagi penduduk Utrecht. Itulah salah satu yang dapat kita pelajari di Utrecht. Banyak lagi yang lainnya, termasuk bagaimana kita dapat mengisi kekurangan tenaga perawat di Belanda yang konon ribuan banyaknya. Karena tanpa mendatangkan investasi luar untuk masuk ke daerah kita,

ataupun peluang kerja di Negara lain bagi masyarakat kita, maka pertumbuhan perekonomian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat kita akan menjadi sangat lambat. Karena peran pemerintah sesungguhnya tidak lebih dari 20 persen saja. Sesuai dengan kapasitas fiscal yang dapat tercipta dari kemampuan financial yang dimiliki. *Wallahu a'lam bissawab...*



Membangun Diantara Mimpi dan Visi

Ikhtiar
mengIndonesiakan
NTB
Edisi Ke 2

Sayangi Mataram: Satu Kelurahan Satu Miliar, Mungkinkah?

Dalam sebuah diskusi tentang bagaimana membangun masyarakat di daerah perkotaan, muncul istilah Saransami, yang merupakan singkatan dari Satu Kelurahan Satu Miliar. Ada gagasan untuk memberikan alokasi dana dari Pemkot ke Pemerintahan Kelurahan sebesar satu miliar rupiah per tahun. Dengan dana sebesar itu diharapkan kemandirian masyarakat berbasis kelurahan atau lingkungan di perkotaan kota Mataram akan makin cepat dapat diwujudkan.

Kelurahan akan makin kreatif dan produktif dalam menggagas dan melaksanakan berbagai program yang terkait langsung dengan persoalan-persoalan di masyarakat. Mulai dari program percepatan penanggulangan kemiskinan, persoalan keber-sihan, pengangguran, pedagang kaki lima, kali bersih, dan lain-lain. Juga hal-hal terkait dengan pendidikan dan kesehatan. Cukup banyak hal-hal yang selama ini 'tersentralisir' di Pemkot, akan 'didesentralisasikan,' sehingga menjadi lebih mudah dan murah, dan tentu akan menjadi lebih efektif.

Dengan Saransami ini, diharapkan partisipasi masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan di tingkat kelurahan akan makin tinggi. Pak Lurah akan memiliki dana untuk berkreasi dan berinovasi terkait dengan pembangunan sumberdaya manusia, maupun untuk menciptakan lingkungan

yang bersih. Sebagian dari dana tersebut dapat diperuntukkan untuk menjamin setiap anak usia sekolah di kelurahannya harus berada di bangku sekolah. Tidak ada yang tidak bersekolah atau drop out.

Kreativitas para pemudanya dalam berbagai kegiatan olah raga dan kesenian juga terfasilitasi. Tidak ada waktu yang sia-sia bagi para pemuda. Kegiatan posyandu dan program seribu hari kehidupan manusia yang diharapkan menghasilkan manusia unggul masa depan juga dapat terjamin. Tidak ada ibu hamil atau keluarga yang punya balita, yang tidak mendapatkan perhatian sebagaimana mestinya. Demikian pula di bidang kesehatan dan sanitasi lingkungan. Tidak ada warga yang sakit, yang tidak tersentuh aparat kesehatan. Tidak ada rumah yang tidak punya MCK, dan lain-lain. Dana saransami ini dapat juga dipergunakan untuk memfasilitasi atau menstimuli perbaikan rumah tidak layak huni. Semua informasi berbasis IT.

Intinya, melalui kebijakan Saransami ini, partisipasi masyarakat dalam pembangunan sosial dan ekonomi bahkan juga agama dan budaya akan makin bergairah. Dana saransami ini juga dapat dijadikan pemancing untuk meningkatkan partisipasi dunia usaha dalam membangun masyarakat. CSR dari berbagai perusahaan yang bergerak di kota akan dapat dioptimalkan dan disinergikan. Demikian pula dana dari Pemerintah pusat ataupun pemerintah provinsi.

Pertanyaannya kemudian adalah untuk Kota Mataram, mungkinkah saransami ini dilaksanakan? Jawabannya adalah sangat mungkin. Dari mana danya? Ya dari APBD Kota Mataram.

Sebagai gambaran, APBD Kota Mataram tahun 2015 (yang sedang jadi wacana itu) adalah sebesar kurang lebih 1,1

T. Jumlah kelurahan di Mataram 50. Jadi kalau Saransami dilaksanakan, kita hanya butuh dana 50 M. Untuk biaya koordinasi kecamatan juga dialokasikan satu milyar per kecamatan, dengan 6 kecamatan, maka kita hanya butuh 56 M.

Dengan Saransami, kita tidak mengurangi pembiayaan untuk sektor pendidikan, kesehatan, ataupun penanggulangan kemiskinan. Kita hanya mengubah sistem pengelolaannya saja. Bahkan kita akan memperkuat sistem pengelolaan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur di kelurahan ataupun lingkungan, yang selama ini masih banyak tidak dapat diselesaikan dengan baik, ataupun tidak 'terjangkau.' Katakanlah untuk pemeliharaan jalan lingkungan yang seringkali berlubang atau tidak terurus, dengan Saransami ini akan menjadi lebih terurus. Atau terjadinya banjir setiap hujan turun agak lama. Ada fleksibilitas yang dapat diatur tanpa melanggar aturan keuangan yang ada. Tujuannya adalah agar masyarakat tidak perlu menunggu lama untuk dapat sekedar menutup lubang atau memperbaiki sarana prasarana umum yang memerlukan penanganan sederhana dan cepat.

Kelembagaan adat dan sosial keagamaan juga diharapkan lebih hidup dan dinamis. Demikian pula halnya dengan kelompok-kelompok kesenian dan olahraga yang menjadi ranah anak-anak muda. Ada porsi khusus dari Saransami yang diperuntukkan untuk mereka.

Terkait dengan penanggulangan kemiskinan dan penanganan para lansia, melalui Saransami ini juga dapat dilaksanakan dengan lebih krea-tif. Pemberian santunan bagi warga lansia, para orang tua jompo, maupun keluarga miskin yang sudah tidak produktif lagi akan dapat diatur dengan baik. Pelibatan para relawan muda dan mereka yang peduli akan menjadi kian efektif dan produktif. Dengan demikian, saya

membayangkan, masyarakat akan menjadi makin dinamis. Yang lebih penting lagi adalah semua menjadi merasa memiliki kota ini; bersama-sama membangun kota ini.

Kalau sudah ini tercipta, maka tidak akan sulit untuk mengajak siapapun bekerja, bergotong royong memelihara kota, membangun kota, menyayangi kota. Mari kita sayangi kota mataram ini. Meniru ucapan Prabowo, kalau bukan kita, siapa lagi; kalau bukan sekarang, kapan lagi. *Wallahu a'lam bissawab.*

Membangun Visi Kota

Secara sederhana, membangun dapat diartikan sebagai upaya untuk melakukan perubahan. Dengan kata lain, pembangunan adalah perubahan. Tentu perubahan dari suatu keadaan tertentu, menjadi suatu kondisi yang lebih baik, di segala aspek kehidupan; baik itu sosial, politik, ekonomi, infrastruktur, dan lain-lain.

Pembangunan atau perubahan itu sesungguhnya adalah sebuah keniscayaan. Dalam suatu masyarakat, apalagi yang telah berpendidikan, maka perubahan itu pasti akan terjadi. Baik cepat atau lambat. Masyarakat, dengan keberadaan sumberdaya manusia yang nota bene adalah pelaku dari sebuah proses perubahan, secara alamiah pasti akan berkembang.

Kehadiran seorang pemimpin di tengah-tengah masyarakat, juga sebuah keniscayaan. Dalam setiap komunitas, selalu saja lahir orang-orang yang memang diberikan amanah oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin di kelompok masing-masing. Pemimpin itu diperlukan, dalam rangka menjamin berbagai perubahan yang terjadi dalam suatu proses pembangunan, tidak merugikan pembangunan itu sendiri. Dan yang lebih penting, agar perubahan itu mejadi lebih terarah sesuai dengan visi kota yang telah dibangun.

Pentingnya visi

Secara sederhana, visi adalah suatu tujuan yang merupakan kehendak bersama warga kota, ke arah mana

pembangunan atau perubahan suatu kota akan menuju. Visi sebuah kota hendaknya dapat diukur, atau paling tidak dirasakan oleh warga kota. Sebagai contoh, ketika awal kota Mataram terbentuk, dibawah kepemimpinan Drs. H. Mujitahid, visi kota Mataram adalah sebagai Kota Ibadah, yaitu singkatan dari Indah, Bersih, Aman, Damai, dan Harmonis. Sebuah visi sederhana, tapi kemudian ukurannya menjadi mudah untuk diukur ataupun dirasakan oleh warga kota Mataram. Berbeda dengan Mataram Maju dan Religius dan Berbudaya, yang mengukurnya relatif lebih sulit.

Ada juga kota atau daerah yang membangun visinya lebih spesifik. Misalnya Kota Bandung, sebagai kota jasa yang Bermartabat (Bersih, Makmur, Taat, dan Bersahabat); Yogyakarta memiliki visi sebagai kota pendidikan yang berkualitas, berkarakter, dan inklusif, pariwisata berbasis budaya, dan pusat pelayanan jasa yang berwwasan lingkungan dan ekonomi kerakyatan. Kota Medan, menjadi kota metropolitan yang berdayasaing, nyaman, peduli, dan sejahtera. Kota Manado, visinya ingin menjadi kota model ekowisata. Untuk kota Mataram ke depan, berpulang kepada kita.

Kalau kita mengacu kepada konsep MP3EI, dimana NTB bersama dengan Bali dan NTT ditetapkan sebagai gerbang pariwisata nasional, maka visi Kota Mataram hendaknya bagaimana membangun Kota Mataram menuju ke arah kota pariwisata. Artinya, pembangunan kota Mataram ke depan harus didasari oleh keinginan agar kota Mataram menjadi daerah tujuan utama para wisatawan, baik nusantara ataupun manca negara.

Pertanyaannya kemudian, apa yang harus dilakukan untuk mencapai visi tese-but? Jawabannya sederhana. Harus dibangun berbagai destinasi wisata yang menarik, yang akan

menjadi ‘buah bibir’ para wisatawan. Yang akan membuat para pelancong tidak merasa cukup sekali saja datang ke Mataram. Islamic Center yang berada di jantung kota Mataram harus dapat dikemas sedemikian rupa, sehingga memiliki daya tarik tersendiri. Demikian pula Pura Mayura, dengan nukilan kisah sejarahnya yang pasti menarik. Mungkin pula ada bangunan gereja yang memiliki nilai sejarah, misalnya dibangun sejak zaman penjajahan dan lain-lain. Mataram memiliki museum negeri yang dapat dikembangkan ke depan.

Mataram juga memiliki kampung kampung tradisional dengan ciri khas yang tidak dimiliki oleh kota lain di Indonesia. Misalnya Kekalik dengan penduduknya yang sebagian besar merupakan pengrajin tahu tempe; atau Babakan atau Getap dimana masih banyak dapat ditemukan pengrajin besi atau pande besi. Atau Sekarbela sebagai pusat pengrajin mutiara. Atau ada kampung atau desa-kelurahan yang memiliki ke khasan tersendiri, yang kalau dikemas dengan perspektif pariwisata, pasti akan menjadi destinasi wisata yang menarik bagi wisatawan.

Dari segi kesenian, Mataram juga memiliki khasanah luar biasa. Dasan Agung terkenal dengan kesenian rebana dan (juga) drama cupak gerantang. Punia, Karang Kelok dan Monjok (pernah) terkenal dengan rudatnya. Kampung Melayu Ampenan dengan burdah atau ardhanya, dan juga tentu orkes melayunya, dan lain-lain dan lain-lain.

Ada juga gagasan menjadikan kali jangkuk sebagai salah satu destinasi wisata. Dengan mengadakan festival atau kegiatan kesenian yang rutin, dan tentu dengan penataan kali jangkuk yang bersih dan indah.

Kesemuanya itu, mungkin juga banyak yang belum saya tuliskan, adalah potensi yang dapat dikembangkan ketika kita

sepakat menjadikan Kota Mataram sebagai Kota Pariwisata. Sebuah visi yang sederhana, tapi memiliki implikasi yang luar biasa. Apa yang dulu pernah menjadi visi Mataram Kota Ibadah, yaitu Indah, Bersih, Aman, Damai, dan Harmonis, adalah modal utama sebuah daerah destinasi wisata. Demikian juga visi Maju, Religius dan Berbudaya.

Ketika semua warga bersepakat untuk itu, lantas kebijakan pemerintah juga mendukung ke arah itu, maka lima tahun ke depan dan seterusnya, Mataram akan dibanjiri oleh para wisatawan dari berbagai pelahan wilayah di nusantara maupun manca negara. Bukan hanya sebagai tempat menginap atau makan minum, tapi sebagai sebuah destinasi tersendiri yang menjadikan wisatawan betah berhari-hari. Indikatornya itu saja. Atau ada fikiran lain? *Wallahu a'lam bissawab. (Jkt, 14/07/15)*

Membangun Tanpa Uang Negara

ADALAH Dr. Sondiamar, staf ahli Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, yang pertama kali saya dengar mengeluarkan istilah seperti judul tulisan ini. Bagaimana kita bisa membangun daerah atau Negara ini tanpa uang Negara. Maksudnya? Tentu dengan menggunakan uang dari swasta murni, atau masyarakat itu sendiri.

Caranya? Itulah yang dia ungkapkan ketika menjadi pembicara kunci (keynotespeaker) dalam acara seminar percepatan pembangunan infrastruktur strategis di Mataram, beberapa waktu lalu, atas undangan Bappeda NTB. Membangun tidak selalu harus menggunakan uang negara, kata dia. Dan memang demikianlah adanya, senyatanya.

Kapasitas dana pemerintah untuk membangun bangsa ini sesungguhnya hanya 20 persen saja dari yang dibutuhkan. Bahkan bisa kurang dari itu. Jawa Timur, sebagai contoh. Kalau APBD-nya sih kurang lebih Rp 10 triliun saja. Tapi, dana pembangunan yang bergerak di Jawa Timur per tahun tidak kurang dari Rp 100 triliun. Fantastis: tapi dari mana uangnya? Ya, itulah yang dimaksudkan Sondiamar. “Dari pihak swasta,” sebutnya. Baik dalam negeri maupun luar negeri. Dan pengaturan (peraturan perundang-undangan) mengenai hal ini sudah sangat lengkap.

Sehari sebelum menjadi pembicara, kami sempat mengajak Sondiamar, yang ahli kelautan atau pelabuhan laut tersebut, jalan-jalan ke Teluk Awang. Ia tampak sangat terkesan dengan mulut teluk yang sangat ideal, dengan panjang sekitar 2,5 kilometer itu. Demikian pula dengan potensi daratannya yang relatif landai dan cukup luas. Sejurus ia melontarkan pemikiran, “kalau saja pemerintah yang menguasai lahan daratannya, maka akan sangat mudah untuk ‘menjual’ kawasan tersebut kepada para pemilik kapal-kapal besar dunia untuk dijadikan pelabuhan internasional.”

Tapi lambat atau cepat, menurutnya, pelabuhan alternatif setelah Singapura sangat diperlukan, di sepanjang jalur lalu lintas internasional yang melewati Selat Lombok. Karena kapal kapal dunia akan menjadi semakin besar dan semakin berat, sementara Selat Malaka akan menjadi semakin padat namun tidak semakin dalam. Oleh karena itu, ALKI di Indonesialah alternatif satu-satunya. Termasuk Selat Lombok.

Kita bisa membuat “Singapura Besar di Lombok,” ujar Sondiamar mengutip kawannya yang di Eropah sana. Kawankawan Sondiamar yang ahli kepelabuhanan melihat potensi Lombok yang luar biasa ke depan. Syaratnya tentu, para pengambil kebijakan harus dapat memanfaatkan potensi strategis letak Pulau Lombok dan Selat Lombok, seperti yang seringkali kita ungkapkan dalam berbagai presentasi.

Persoalannya memang, ya, satu itu. Kapasitas fiskal NTB yang tidak memungkinkan untuk mewujudkan impian menjadikan Lombok sebagai Singapura Besar (karena memang luasnya jauh lebih besar ketimbang Singapura). Satu-satunya jalan adalah menarik investor, membuat kebijakan yang menarik bagi para investor, dan aktif berpromosi kemana-mana. Yang tidak kalah pentingnya lagi, dan sudah kita mulai lakukan adalah menyelesaikan persoalan

infrastruktur jalan, listrik, fasilitas air minum, dan lain-lain. Tak kalah pentingnya juga adalah mempersiapkan sumberdaya manusia (SDM) agar tidak menjadi penonton di panggung sendiri.

Ketika saya ajukan pertanyaan kepada Sondiamar, bagaimana caranya menarik investor agar mereka mau membuat pelabuhan di Teluk Awang? Beliau bilang, siapkan lahan sepuluh ribu hektare, berikan mereka secara “cuma-cuma,” artinya Hak Guna Usaha (HGU), atau Hak Pemanfaatan Lahan (HPL), atau apalah namanya. Yang jelas untuk yang 10 ribu hektare, mereka tidak perlu mengeluarkan duit. Ijinnya jangan berbelit-belit. Nah, bukankah, setelah lahan tersebut mulai terbangun, harga lahan di sekitarnya akan meningkat tajam? Mungkin lebih dari sepuluh kali lipat dari harga sebelumnya? Di situlah letak kompensasinya.

Pembelinya nanti juga pasti mereka, atau kawan-kawan mereka, mitra kerja mereka sesama investor, untuk membangun industri, membangun kawasan kota baru. Dan karena yang membuat pelabuhan itu para pemilik kapal, maka pastilah pelabuhan tersebut akan menjadi ramai. “Kalau kita yang bangun pelabuhan, belum tentu ramai, belum tentu ada yang mau singgah juga,” kata Sondiamar. Masuk akal juga, pikir saya.

Yang terbersit di benak saya kemudian, jikalau kita kumpulkan semua para pemilik lahan, lantas kita buat perusahaan atau koperasi, atau apapun namanya, dan inilah yang akan membangun komunikasi dengan pemerintah. Untuk selanjutnya pemerintah berkomunikasi dengan investor. Katakanlah terkumpul lahan 15-20 ribu hektare. Setengahnya kita ‘gratiskan’ kepada para investor, seperti yang dikatakan Sondiamar. Kemudian setengahnya lagi dijual.

Dengan hasil penjualan yang setengah bagian itu, sesungguhnya kita akan mendapatkan uang yang sekaligus termasuk nilai lahan yang kita gratiskan. Padahal yang kita gratiskan pun tidak kita lepas percuma. Dapat saja dia menjadi saham kita kelak, yang royalti atau dividennya dapat kita nikmati, ketika perusahaan yang membangun di atas tanah tersebut mulai mendapatkan keuntungan kelak di kemudian hari. Sesederhana itu. It's that a simple.

Pertanyaannya adalah kapan kita mulai, dan siapa yang akan memulai? *Wallahu a'lam bissawab.*

Membangun Singapura Besar Bernama Lombok

Saya merasa beruntung berapa kali berkesempatan melawat ke Singapura. Sebuah negara kota, sekaligus negara pulau. Luasnya kurang dari 500 km persegi dengan berpenduduk sekitar 4 juta orang. 'kompensasi' antara Lee Kuan Yew dengan saingan politiknya di Malaysia. Menjadi negara berdaulat sejak tahun 1959 (punya pemerintahan sendiri 3 Juni 1959, terpisah dari Malaysia, 9 Agustus 1965). Pada saat itu penduduk Singapura berjumlah 1,6 juta orang yang terdiri dari tiga etnik mayoritas, yaitu China, Melayu, dan India. Meski secara konstitusi bahasa resmi negara adalah melayu – sebagaimanahalnya Malaysia, namun dalam keseharian mereka lebih fasih berbahasa Inggris.

Telah menjadi rahasia umum bahwa terdapat perbedaan kultur antara negara yang dijajah oleh Inggris dibandingkan dengan negara yang dijajah oleh Belanda. Intinya, konon, negara Inggris sangat memperhatikan pendidikan penduduk negara yang dijajah. Sementara Belanda kurang perhatian. Kalaupun ada, tidak terlalu banyak. Dan tentu sangat selektif.

Tidak semua orang mendapat kesempatan untuk mengenyam pendidikan, yang paling bawah sekalipun. Sementara Inggris, konon, memberikan kesempatan luas bagi negeri yang dijajah untuk mengenyam pendidikan. Itulah sebabnya, lembaga lembaga pendidikan di negara negara

jajahan Inggris berkembang dengan baik. Dampaknya, mungkin ini hikmahnya, Bahasa Inggris menjadi berkembang juga di negara-negara terjajah dan dipertahankan menjadi *second language* di kemudian hari. Contohnya Malaysia dan Singapura, menyebut negara terdekat. Juga India. Sementara Belanda tidak demikian. Dan itu juga mungkin yang menyebabkan Bahasa Belanda tidak berkembang di negeri eks jajahannya seperti halnya Bahasa Inggris.

Ketika berdiri menjadi sebuah negara, posisi penduduk Singapura tercatat berjumlah 1.646.000 orang. Proporsi penduduknya kira-kira sebagai berikut: Cina 74,1 persen, India 9,2 persen, Melayu 13,4 persen dan lainnya 3,3 persen pada tahun 2010. Bentuk pemerintahannya adalah parlementer, dimana presiden hanya sebagai Kepala Negara, sementara Kepala Pemerintahannya dipegang oleh Perdana Menteri. Pada posisi itulah Lee Kuan Yew mulai membangun Singapura sejak 5 Juni 1959 hingga dia melengserkan diri pada 28 November 1990 untuk kemudian menjadi Menteri Senior yang tetap berpengaruh terhadap pemerintahan Singapura.

Membangun dengan keterbatasan sumberdaya alam, Singapura tentu mengandalkan dua hal, yaitu sumberdaya manusia dan letaknya yang strategis sebagai semenanjung yang dilewati oleh mereka yang akan melintasi: antara Eropah dan Asia Barat ke Asia Timur atau ke Australia. Itulah sebabnya pelabuhan laut Singapura merupakan pelabuhan terpadat kedua di dunia, setelah Pelabuhan Shanghai. Untuk saat ini, hanya melalui pintu Singapura-lah kapal-kapal dunia itu berlayar mengangkat barang-barang dari Eropah ke Asia Timur, Australia atau sebaliknya. Pada suatu ketika, pasti kapal-kapal tersebut akan jenuh dan memerlukan alternatif alur laut yang lain.

Faktor lainnya adalah karena bobot atau tonase dari kapal kapal laut makin lama menjadi makin besar dan makin berat. Menurut Dr Son Diamar, ahli kelautan yang pernah menjadi deputi di Bappenas, saat ini tengah dbangun kapal kapal type PostPanamax dengan panjang 4,5 kali lapangan sepakbola (450m), melebihi 300.000 DWT dan mampu membawa kontainer 13.000s Tus yang tentu tidak bisa melewati Selat Malaka. Merekaharus mencari aternatif lain. Yaitu yang dikenal dengan Alur Laut Kepulauan Indonesia 2 atau ALKI 2 yang menyusuri Samudra Hindia di bagian bawah Sumatra, kemudian belok di Selat Sunda menuju Selat Lombok dan terus ke utara melewati selat Sulawesi dan ke Laut China Selatan. Pada saat itu, Lombok menjadi pilihan paling tepat untuk disinggahi.

Seperti hasil kajian yang kini tertuang dalam MP3EI (Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia), Lombok adalah salah satu tempat yang cocok untuk dibangun suatu Global Hub (persinggahan kapal kapal dunia). Apakah untuk mengisi bahan bakar, atau sekadar beristirahat dari perjalanan panjang mereka dari benua Eropah atau Asia Barat. Atau bahkan untuk menurunkan atau menaikkan barang. Persis seperti kondisi Singapura di tahun 1959 ketika mereka mulai membangun negerinya.

Itulah sebabnya, ketika berkesempatan mengunjungi Singapura, saya berhayal bahwa suatu ketika, Lombok akan menjelma menjadi Singapura Besar. Mengapa besar, karena memang luas pu- launya sepuluh kali luas Singapura, sementara jumlah penduduknya hampir sama. Yang beda adalah kualitas SDMnya. Itulah sebabnya, masalah pendidikan SDM ini harus menjadi prioritas utama.

Kita harus segera mengejar kemajuan yang ada di depan mata dan meninggalkan berbagaimacam hal yang

menyebabkan kita tertinggal. Masalah buta aksara, masalah drop out pendidikan, masalah kesempatan kerja dan peluang usaha dan lain lainnya, haruslah kita akseleratifkan. Dan kita sudah “on the way” sekarang ini. Bahwa belum nampak secara signifikan hasilnya, ya memang kita harus sabar. Investasi pendidikan tidak dapat kita rasakan dampaknya dalam kurun waktu satu dua tahun. Paling cepat lima tahun, bahkan lebih. Karena urutan berikutnya adalah dampaknya terhadap pola pikir masyarakat. Pola pikir yang akan membawa masyarakat mewujudkan suatu bentuk peradaban modern.

Oleh karena itu sangat tidak masuk akal kalau ada orang yang menafikan sektor pendidikan, ketika ingin membangun budaya ataupun peradaban. Pendidikan itulah kuncinya. Malaysia dan Singapura mulai menerapkan 20 bahkan 25 % APBN nya untuk pendidikan sejak tahun 70 an. Sedangkan Indonesia tahun 2000 an. NTB sendiri sejak tahun 2009, sehingga wajar kalau ada perbedaan di berbagai bidang antara kita dan kedua negara tersebut hari ini.

Namun tidak ada kata terlambat dalam membangun. Ampenan ataupun kawasan Kayangandi KLU, Insya Allah akan segera menjelma menjadi salah satu faktor pembangkit pembangunan di Lombok. Seperti halnya Ampenan atau Pelabuhan Carik di masa jayanya tempo doeloe. Tentu dengan wajah yang lebih modern. Mirip-mirip dengan pelabuhan yang ada di Singapura hari ini. Namun kedepan, akan lebih besar, lebih ramai dan tentu akan membawa masyarakatnya lebih maju dan lebih sejahtera. *Insha Allah*.

LECI, Meniru Singapura dan China

LECI, atau *Lombok as Eco-city Island* adalah sebuah gagasan untuk membangun Pulau Lombok dengan mengedepankan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Bahkan sering saya katakan, ini adalah sebuah paradigma. Paradigma pembangunan, yang memang didasari pada suatu kaidah keilmuan, bagaimana kita membangun dengan memperhatikan teori-teori pembangunan. Teori-teori adalah pilihan-pilihan. Kita harus memilih dari berbagai teori yang ada.

Pembangunan berkelanjutan adalah proses pembangunan (lahan, kota, bisnis, masyarakat, dsb) yang berprinsip "memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan." Menurut Brundtland Report dari PBB, (1987), pembangunan berkelanjutan adalah terjemahan dari Bahasa Inggris, sustainable development. Salah satu faktor yang harus dihadapi untuk mencapai pembangunan berkelanjutan adalah bagaimana memperbaiki kehancuran lingkungan tanpa mengorbankan kebutuhan pembangunan ekonomi dan keadilan sosial. Banyak laporan PBB, yang terakhir adalah laporan dari KTT Dunia 2005, yang menjabarkan pembangunan berkelanjutan terdiri dari tiga tiang utama (ekonomi, sosial, dan lingkungan) yang saling bergantung dan memperkuat.

Untuk sebagian orang, pembangunan berkelanjutan berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi dan bagaimana mencari jalan untuk memajukan ekonomi dalam jangka panjang, tanpa menghabiskan modal alam. Namun untuk sebagian orang lain, konsep "pertumbuhan ekonomi" itu sendiri bermasalah, karena sumberdaya bumi itu sendiri terbatas.

Pilihan terhadap "*sustainable development paradigm*" kemudian dijabarkan dalam bentuk LECI didasarkan pada kenyataan bahwa Nusa Tenggara Barat adalah gugusan pulau-pulau kecil, atau relatif kecil. Ada lebih dari 280 pulau-pulau di Nusa Tenggara Barat, baik yang berpenghuni maupun tidak berpenghuni. Sementara 'main island'-nya adalah Lombok dan Sumbawa. Yang juga relatif kecil. Lombok, khususnya, dengan luas sekitar 5000 km persegi dan dihuni lebih dari 3 juta manusia, menjadi pulau yang terpadat ketiga di Indonesia, setelah Jawa dan Bali. Artinya, jika tidak dikelola dengan baik, dengan pilihan kebijakan yang tepat, maka daya dukung Pulau Lombok terhadap kehidupan di atasnya, akan dapat segera tergerus.

Lombok, dengan luas areal pulaunya yang relatif kecil itu lambat laun pasti akan menjadi Kota Pulau; seperti halnya Singapura sekarang. Desa-desa dan kelurahan akan berkembang sedemikian rupa, sehingga pada waktunya nanti tidak akan ada pembatasnya. Jika sekarang masih dapat dilihat dengan jelas, pembatas antara desa yang satu dengan yang lain, yaitu bentangan sawah atau rimbunnya kebun, maka suatu ketika nanti, bentangan swah dan kebun itu akan menjadi bangunan-bangunan dengan karakter yang jauh berbeda sama sekali dibandingkan dengan pertanian yang memberi rona kehidupan masyarakat.

Belajar dari Singapura dan China

Kalau kita lihat model pembangunan di Singapura, maka hal pertama yang akan mengesankan kita adalah infrastruktur jalannya yang baik sekali. Baik dalam hal penataannya, maupun dalam hal kualitas serta volume ruas jalan-jalan tersebut. Mungkin tidak ada jalan di Singapura yang sempit. Semua ruas jalan lebar-lebar, sehingga dapat ditata menjadi dua jalur, empat lajur. Bahkan ada yang dua jalur, enam lajur. Sehingga kemana saja kita bepergian, kita dapat dengan mudah mengendarai kendaraan umum ataupun pribadi. Padahal luas Singapura, mungkin sepersepuluh luas Pulau Lombok.

Menyadari luas wilayahnya yang seperti itu, sejak awal, desain pembangunan property di Singapura dibuat keatas. Artinya, tidak ada rumah atau pemukiman penduduk atau kantor yang tidak bertingkat. Kalau dalam bahasa melayu, rumah pangsa. Sebab lahan mereka memang sangat terbatas. Dengan jumlah penduduk yang relatif padat, mereka memang tidak ada pilihan lain. Kalaupun mereka melakukan reklamasi pantai, potensinya juga terbatas, disamping memerlukan biaya yang tidak sedikit.

Namun yang menarik, meski daratannya sangat luas, ketika saya mengunjungi Beijing China, dan sempat berkeliling ke daerah pedesaan di China, ternyata pola "membangun ke atas" ini juga di-terapkan di pedesaan-pedesaan di China. Program ini dimulai di awal era delapan puluh atau sembilan puluhan. Desa-desa yang padat penduduknya, dengan pola pemukiman yang konvensional, menyebabkan dua hal: pertama, laju alih fungsi lahan pertanian sangat tinggi. Persawahan dengan cepat berganti menjadi tempat pemukiman, pembangunan perumahan penduduk, yang memang tidak mungkin dihindari. Kedua, dengan pola pemukiman padat seperti itu, rumah yang dibangun kecil-kecil,

dan area terbuka hijauanya menjadi sangat terbatas, ataupun bahkan tidak ada. Anak-anak menjadi tidak memiliki tempat untuk bermain di luar jam sekolah.

Nampaknya dari fenomena ini kemudian China membuat kebijakan apa yang disebut “*rural restoration*” yang intinya, membangun pemukiman dengan pola ke atas. Sehingga, katakanlah satu kampung yang padat dengan penduduk, katakanlah seribu KK, pola pemukiman padat tanpa ada RTHnya, maka kampung itu diratakan dulu dengan tanah. Rumah-rumah di situ kemudian dihancurkan, dan disitulah dibangun rumah tingkat yang kemudian dapat menampung seribu KK. Karena membangun ke atas, maka lingkungan yang tadinya tidak memiliki RTH, akan memiliki RTH yang cukup, untuk keperluan pelestarian lingkungan dan juga untuk tempat bermain anak-anak atau keluarga.

Dengan demikian, tumbuh kembang anak dan generasi muda pedesaan di China akan menjadi lebih baik ke depan. Lingkungan pedesaan juga akan menjadi lebih asri. Laju alih fungsi lahan pertanian juga akan dapat dikendalikan.

Dalam fikiran saya, kita dapat membangun Pulau Lombok seperti itu. Meniru apa yang telah dilakukan oleh Singapura dan China. Dalam hal konektivitas, semua sudut di Lombok ini, khususnya sumbu-sumbu pertumbuhan ekonomi harus dapat terhubung dengan infrastruktur jalan yang lebar dan mulus. Laju konversi lahan pertanian harus dapat dikendalikan dengan pola pendekatan “membangun ke atas.”

Dengan pola membangun ke atas ini, kita akan tetap dapat mempertahankan ruang terbuka hijau, ruang yang luas untuk anak-anak bermain, atau tempat kita ‘menghirup udara segar.’ Rumah-rumah susun, seperti di Cina, tidak saja

mewarnai kota-kota besar, tapi juga desa-desa. Bahkan desa-desa di Cina yang tadinya padat dengan pemukiman tradisional dan tidak memiliki RTH, banyak yang sudah dipoles ulang. Rumah-rumah tersebut diratakan dengan tanah, kemudian dibangun rumah susun yang tinggi, sehingga dapat menyisakan paling tidak 30-40% nya sebagai RTH-nya. SPM di bidang perumahan menjadi lebih komplit; ada rumah, ada ruang terbuka hijaunya, atau tempat bermain anak dan juga tempat berolah raga keluarga. Bukankah untuk kehidupan yang sehat, kita membutuhkan disamping pangan, sandang, dan papan, juga olah raga dan rekreasi.

Maka, ketika dengan pola perumahan konvensional ternyata tidak dapat memenuhi salah satu kebutuhan tersebut, dalam hal ini adalah RTH, maka China segera mengadakan restorasi. Merubah pola pembangunan horizontal menjadi vertikal. Inilah yang mungkin menarik untuk kita tiru, dalam konteks membangun Lombok as Ecocity Island, atau LECL. *Wallahu a'lam bissawab.* (Mataram, 170414)

Mempersiapkan RPJMD 2009-2013: NTB BerSaing

Seperti yang saya singgung dalam tulisan saya yang lain, 'panggung pertama' saya sebagai Kepala Bappeda NTB adalah dalam arena Musrenbang RPJMD 2009-2013; yang merupakan keharusan konstitusional Kepala Daerah terpilih untuk melaksanakannya. Sesuai dengan aturan yang ada, pasangan Kepala Daerah Terpilih harus dapat menetapkan RPJMD, atau rencana pembangunan lima tahunannya paling lambat enam bulan setelah pelantikan. Ini berarti, kalau pelantikannya bulan september, maka paling telat pada bulan Maret tahun berikutnya, RPJMD tersebut harus sudah diketok. Ini artinya, proses ujung pengesahan di DPRD dapat diselesaikan dengan baik.

Musrenbang adalah salah satu langkah konsultasi publik yang harus dilaksanakan, guna mendapatkan legitimasi dari masyarakat. Musrenbang dilaksanakan setelah melalui proses penyusunan yang cukup panjang. Di Bappeda sendiri tentu prosesnya juga diawali dengan penyusunan konsep RPJMD yang telah dimulai jauh sebelum pelantikan, bahkan sebelum Pemilu diadakan berlangsung. RPJMD ini juga merupakan perpaduan antara konsep yang telah didesain oleh Bappeda, sesuai dengan RPJPD 2005-2025, dan sesuai dengan tata naskah yang mengatur hal itu, yaitu dalam hal ini adalah Permendagri.

“Pertemuan” antara tim penyusun dari Bappeda dengan tim dari Kepala Daerah terpilih dilaksanakan setelah pelantikan. Hal-hal penting, strategis, dan menjadi ‘janji politik’ seorang kepala daerah yang telah disusun dalam rancangan program pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur, dimasukkan menjadi bagian dari RPJMD. Terutama terkait visi misi dan janji politik, atau jargon politik yang telah menjadi bahan kampanye, seperti Pendidikan Gratis, Kesehatan Gratis, Penciptaan Wirausaha Baru, pembangunan di bidang ekonomi dan sosial lainnya. Semua agenda tersebut kemudian di formulasikan ulang oleh tim RPJMD yang ada di Bappeda.

Secara kebetulan, tim RPJMD di Bappeda adalah Kepala Bidang Evaluasi dan Pelaporan, yang nota bene baru dilantik, bersamaan dengan pelantikan saya. Namanya Tri Budi Prayitno. Panggilan akrabnya mas Yiyit, yang ternyata adik kelas saya semasa di SMA. Juga yunior saya di Pramuka. Mas Yiyit ini ternyata juga adalah tim penyusunan visi misi yang membantu Bapak Badrul Munir, wakil gubernur terpilih.

Dialah yang kemudian, sesuai dengan tupoksinya, yang menjadi penanggung jawab secara teknis penyusunan RPJMD NTB 2009-2013. Sebagai penanggung jawab umumnya, tentu saya sebagai Kepala Bappeda NTB, yang dilantik per 6 Oktober 2008. Sejak pelantikan itu pula, pembahasan RPJMD kemudian mulai sangat intensif dilaksanakan di pendopo wakil gubernur, Bapak Badrul Munir. Di sinilah hampir setiap malam, setiap kepala SKPD yang baru dilantik, ataupun yang lama, diundang untuk mendiskusikan substansi atau materi yang ada di RPJMD tersebut.

Salah satu ‘tantangan’ yang beliau ajukan kepada peserta pertemuan adalah bagaimana agar setiap skpd, atau pengelola kegiatan memiliki paling tidak satu program terobosan, atau program unggulan. Tantangan yang tentu

tidak mudah, dan memerlukan pemikiran yang mendalam. Ada kawan yang spontan mengajukan unggulannya, yang merupakan ekstraksi dari program yang ada di SKPDnya, ada kawan yang memerlukan waktu bermalam-malam (baca: berhari-hari) untuk kemudian usulan program yang dia unggulkan dapat disetujui oleh forum. Baik istilahnya, maupun substansi programnya.

NTB Bumi Sejuta Sapi (BSS)



Isitilah Bumi Sejuta Sapi sebagai contoh. Proses penemuan istilah atau jargon ini cukup panjang. Meskipun penetapan komoditas sapi sebagai program unggulandi dinas peternakan sudah disetujui, namun apa istilah yang akan dipergunakan sebagai jargonnya, itu yang lama. Ada yang usulnya NTB Bumi Sapi, Program Pengembangan Sapi NTB, dan seterusnya, sebelum kemudian forum yang dihadiri pak Wagub menyepakati Bumi Sejuta Sapi. Ini tentu dengan segala pemaknaannya.

Demikian pula program Permata, alias perlindungan mata air. Ada juga Ruang Hijau, NTB Hijau, di bidang pengelolaan lingkungan. Kalau AKINO dan ABSANO itu yang usulkan istilahnya, saya ingat betul, adalah pak Sudaryanto. Dengan penjelasan apa makna dan misi yang terkandung di dalamnya. Saya sendiri 'menemukan' istilah ADONO, alias Angka Drop Out Nol. Waktu itu kami diskusi di sebuah hotel di Mataram, terkait program pendidikan. Juga saya mengusulkan Gerakan Penciptaan Seratus Ribu Wirausaha Baru, dengan leading sektor Dinas Koperasi dan UKM. Waktu itu, saya menghadiri dan presentasi makalah terkait pembangunan koperasi berkualitas di sebuah hotel di Senggigi.

ABSANO, AKINO, ADONO

10/09/2010 JAYADI LOMBOK 1 KOMENTAR

Tiga program unggulan yang ditargetkan tuntas tahun 2013 di provinsi Nusa Tenggara Barat terus bergulir. Program lima tahunan, yang kini memasuki tahun kedua, tidak serta-merta membuahkan hasil yang memuaskan, karena disana-sini masih banyak hambatan, Ketiga program unggulan itu adalah, Pertama, menekan angka kematian ibu menjadi nol atau **Akino**. Kedua, menekan angka buta aksara menjadi nol atau **Absano**. Dan Ketiga, menekan angka drop out atau putus sekolah hingga titik nol atau **Adono**.

Gubernur NTB TGH. Zainul Majdi berharap, lewat ketiga program itu terjadi akselerasi peningkatan mutu sumber daya manusia NTB, sehingga NTB terangkat dari keterpurukannya yang belum dapat beranjak dari ranking 32 dari 33 provinsi.

Tipikal pak BM adalah senang dan kuat begadang. Tidak jarang kawan-kawan kepala SKPD sampai larut malam berdiskusi di Pendopo dua; tempat kediaman beliau. Dan

beliau ikut langsung dalam diskusi tersebut. Menjelang pengajuan RPJMD ke

Mendagri untuk dievaluasi maupun penyerahan dokumen ke Dewan, diskusi makin intens. Salah satu yang menjadi bahandiskusi adalah indikator yang ditetapkan secara kuantitatif dalam RPJMD tersebut. Di sini ada dua pendapat. Mengapa kita tidak ikut gaya RPJMD sebelumnya saja, dimana tidak menggunakan indikator kuantitatif. Cukup menggunakan indikator kualitatif saja. Karena resikonya, indikator kuantitatif dapat menjadi isu politik, manakala indikator yang telah ditetapkan ternyata tidak dapat kita capai. Dan itu tidak salah. Tidak ada keharusan sesungguhnya kita menggunakan indikator kuantitatif. Kata-kata kualitatif seperti meningkat, menurun, tetap, dinamis, statis, dan seterusnya sesungguhnya dapat dipergunakan. Tidak perlu menggunakan angka-angka tertentu.

Saya sendiri berada pada aliran yang pro kepada penggunaan indikator kuantitatif. Hal ini dengan maksud, kita dapat mengukur secara lebih jelas, apakah dan seberapa besarkah kita dapat mencapai suatu hasil dalam dinamika pembangunan, selama lima tahun ke depan. Misalnya, penetapan angka peningkatan populasi sapi di NTB menjadi minimal satu juta ekor di tahun 2013. Atau penetapan target dua ribu koperasi berkualitas; penurunan angka kemiskinan dua persen per tahun, penurunan angka kriminal menjadi sekian kasus per tahun, atau target penanganan konflik horizontal sekian sekian per tahun, dan seterusnya.

Indeks Pembangunan Manusia, IPM, yang pada tahun 2008 angkanya 63.7 dalam lima tahun ke depan ditargetkan meningkat menjadi 70. Angka 70 ini yang waktu itu saya agak kritisi. Bagaimana menghitungnya? Dari mana datangnya, dan apa yang harus dilakukan untuk menggapainya. Beberapa

kali saya menyarankan mas Yiyit untuk berkonsultasi dengan pak Anwar Fachry, dosen Unram yang saya tahu sangat faham dengan indikator determinan IPM. Apakah angka 70 itu rasional atau tidak. Kalau tidak, berapa yang kira-kira rasional dan dapat kita capai.

Demikian pula halnya dengan target penurunan angka kemiskinan yang dua per sen per tahun. Apakah ini rasional atau hanya emosional. Rasional maksud saya adalah, penetapan angka telah melalui kajian empirik dengan mencermati kecenderungan dan capaian kita dalam lima atau bahkan sepuluh tahun terakhir. Bukan emosional, hanya karena janji politik, yang mungkin tidak didasari pada kajian yang mendalam secara akademik. Ataukah semata untuk menjadi motivasi dalam bekerja. Tanpa memperhitungkan 'dampak politik' apabila ternyata itu kita tidak bisa capai.

Harus saya akui, itulah pada akhirnya yang terjadi. Ada angka-angka yang ditetapkan dengan niat untuk memotivasi para kepala SKPD, bahkan seluruh stakeholder untuk bekerja lebih giat ke depan. Bahkan angka penurunan kemiskinan dua persen per tahun juga ternyata dapat memotivasi para pemangku kepentingan di tingkat kabupaten kota. Sehingga dalam sebuah roadshow, berhasil disepakati berapa angka yang ingin dicapai oleh setiap kabupaten/kota dalam kaitannya dengan penurunan angka kemiskinan di daerahnya per tahun. Memang ada yang tidak berani pada angka dua persen; tapi ada juga yang berani di atas angka provinsi tersebut. Ini juga saya lihat sebagai sisi positif keberanian penetapan angka-angka dalam indikator RPJMD.

Ketika proses evaluasi di Kementrian Dalam Negeri, naskah RPJMD NTB dijadikan salah satu contoh baik, karena adanya indikator kuantitatif tersebut. Bahwa dalam proses evaluasi lima tahun kemudian, ternyata memang ada yang

tidak tercapai, jumlahnya jauh lebih sedikit dari yang tercapai. Tapi Bapak Gubernur mengatakan, “ketika proses pelaksanaan suatu program telah dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, sesuai dengan perencanaan yang telah disusun, maka walaupun kita tidak berhasil mencapai target outputnya, tapi outcomenya pasti kita peroleh. Dampaknya ataupun hikmahnya, pasti akan dapat dirasakan, baik oleh subyek pembangunan maupun oleh obyek pembangunan itu sendiri.” Wallahu a’lam bissawab. (Banda Aceh 120314)

Tampaksiring Summit

AGAK berbeda dengan pertemuan di Cipanas. Pertemuan para petinggi negeri ini di Tampaksiring yang dipimpin langsung oleh presiden SBY memokuskan pada tiga hal prioritas. Program pro rakyat, justiceforall, dan pencapaian Millenium Development Goals (MDGs). Meski kemudian komisinya ditambah satu judul lagi, yaitu percepatan pembangunan ekonomi.

Yang tidak kalah menariknya, pada momen kali ini jumlah peserta juga bertambah. Ini menandakan atensi dan intensitas yang menggembirakan. Kondisi ini terbaca dari hadirnya para praktisi maupun pengamat ekonomi, serta rektor sejumlah perguruan tinggi. Ditambah lagi beberapa petinggi lembaga donor dan perwakilan masyarakat sipil (LSM).

Meski diliputi hujan lebat, pertemuan tetap berjalan khidmatsesuai agenda yang telah disusun rapih oleh Bappenas. Fokus untuk program Pro Rakyat adalah terkait dengan tiga klaster dalam pengentasan kemiskinan. Mencakup penanggulangan kemiskinan (PK) berbasis keluarga, PK berbasis pemberdayaan masyarakat, dan PK berbasis pemberdayaan usaha mikro dan kecil. Terkait program justiceforall, programnya fokus pada keadilan bagi anak, keadilan bagi perempuan, ketenagakerjaan, bantuan hukum, reformasi hukum dan peradilan, dan kelompok miskin dan terpinggirkan. Lalu tentang pencapaian tujuan MDGs: pembahasannya pada upaya penanggulangan kemiskinan dan

kelaparan, pencapaian pendidikan dasar untuk semua, kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, kesehatan anak dan ibu, pengendalian penyakit HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya, jaminan kelestarian lingkungan hidup, dan percepatan pencapaian MDGs secara keseluruhan.

Para menteri, gubernur, kepala-kepala Bappeda, BPMPD, dibagi ke dalam komisi-komisi yang membahas ketiga aspek di atas. Sementara pimpinan sidang kelompok diserahkan langsung ke para menko dan pemakalahnya, yaitu para menteri terkait. Saya sendiri, ikut dalam kelompok pembangunan pro rakyat. Di mana membahas soal perkembangan dan sejauh mana pelaksanaan kegiatan PNPM, PKH, dan kegiatan subsidi langsung kepada masyarakat lainnya. Intinya adalah pembahasan sejauh mana program penanggulangan kemiskinan telah berjalan dan secara efektif telah dapat menurunkan prosentase kemiskinan dari tahun ke tahun.

Terkait penurunan angka kemiskinan ini, target nasional pada tahun 2014 adalah 8 persen. Asumsinya: setahun paling tidak dapat diturunkan hingga 2 persen. Angka ini selaras dengan MDGs 2015. Secara implisit, saya mendapatkan informasi bahwa manakala pada tahun tersebut masih ada daerah-daerah yang tidak dapat mencapai angka rata-rata nasional, maka mereka harus berupaya sendiri melalui sumberdaya dan sumberdana yang dicari sendiri. Karena setelah 2015, berbagai program penanggulangan kemiskinan sudah tidak akan ada lagi yang khusus, seperti PNPM sekarang ini.

Presiden SBY dengan tegas menyatakan bahwa daerah-daerah yang masih berada di bawah rata-rata nasional pada berbagai indikator kesejahteraan akan menjadi tanggung jawab keras para kepala daerah. Terutama dengan

mendekatkan diri pada angka rata-rata nasional. Di situlah tugas berat kita di NTB. Berdasarkan data terakhir, angka kemiskinan di NTB masih di atas 22 persen, sementara nasional sudah berada pada posisi 15 persen. Sekiranya kita sukses menurunkan angka kemiskinan dua persen saja per tahun, maka di tahun 2015 kita baru akan mencapai sekitar 14 persen. Syukur-syukur menjadi 12 atau jika ada lompatan menjadi 10 persen. Mimpinya sih begitu.

Pertanyaannya adalah, apakah mimpi tersebut dapat menjadi kenyataan? Dalam sebuah kesempatan, Gubernur NTB, TGH. M. Zainul Majdi, MA., mengemukakan bahwa untuk dapat meninggalkan ketertinggalan, NTB harus bisa bermimpi. Menurutnya, Kaum Yahudi bisa maju seperti sekarang ini karena didorong oleh nilai-nilai budayanya. Adalah sebuah kebiasaan masyarakat Yahudi untuk meletakkan cita-citanya pada sesuatu yang tidak mungkin untuk diraih, namun mereka berupaya mencari cara yang paling mungkin untuk meraihnya. *Wallahu a'lam bissawab.*



Gagasan Untuk Masa Depan

Ikhtiar
mengIndonesiakan
NTB
Edisi Ke 2

Membangun Mataram Berbasis Kota Cerdas

Kota Cerdas atau *Smart City* adalah suatu paradigma baru dalam pembangunan perkotaan. Maksudnya adalah bagaimana sebuah kota dapat dibangun berdasarkan atau dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Mulai dari perencanaannya, sampai pada upaya pelayanan pada masyarakat atau public service nya. Secara sederhana, Kota Cerdas atau *Smart City* dapat didefinisikan sebagai upaya kota untuk meningkatkan kualitas layanan kepada warganya maupun untuk meningkatkan partisipasi warganya dalam pembangunan dengan memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi.

Beberapa sektor pembangunan yang dapat memanfaatkan ITC ini dalam praktek adalah sektor kependudukan, seperti layanan KTP dan perizinan, sektor transportasi umum, pendidikan, kesehatan, dan pengelolaan sampah dan air. Bahkan sektor keamanan juga dapat memanfaatkan teknologi komunikasi informasi ini. Sebagai ilustrasi, ketika tinggal di Amerika Serikat tahun sembilan puluhan, ada kawan yang mendadak harus dibawa ke rumah sakit, dia menelpon ke 911. Dalam waktu sekitar lima menit, ambulans dan perawat datang ke apartemennya, untuk memberikan perawatan. Bahkan pada saat yang sama, datang juga patroli polisi dan pemadam kebakaran. Rupanya sistem yang dibangun, ketika menelpon ke 911, yang menerima dan

merespons tidak hanya bagian kesehatan darurat, tapi juga pos jaga kepolisian dan pemadam kebakaran. Ini salah satu bentuk layanan cepat tanggap pemerintah terhadap kebutuhan warga yang membutuhkan.

Dengan sistem ITC ini pula kita dapat melaksanakan deteksi dini terhadap berbagai kebutuhan dan kondisi masyarakat. Katakanlah terhadap kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat prasejahtera. Dengan penerapan sistem ini akan dapat terdeteksi sekiranya ada rumah tangga atau keluarga prasejahtera yang tidak memiliki sesuatu untuk dikonsumsi pada hari itu. Dalam bahasa yang lebih canggih, dengan penerapan sistem kota cerdas, negara dapat kita hadirkan kapan saja masyarakat membutuhkan. Bahkan untuk hal-hal yang sifatnya pribadi sekalipun. Bukankah kewajiban negara atau pemerintah untuk melindungi segenap tumpah darah bangsa Indonesia, dan memajukan kesejahteraan umum, serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Sehingga prinsipnya, tidak boleh ada warga yang merasa terabaikan hak-haknya. Siapapun dia, baik dari keluarga berada maupun yang tidak mempunya.

Pelibatan swasta dan relawan

Salah satu faktor kunci keberhasilan Walikota Bandung saat ini adalah kemampuannya dalam membangun partisipasi masyarakat, khususnya dunia swasta dalam menggerakkan pembangunan. Ternyata, dengan sentuhan pendekatan yang tepat, partisipasi dunia swasta luar biasa besarnya.

Disamping itu, dia juga dapat menggerakkan mahasiswa, pemuda, dan unsur generasi muda lainnya untuk turut serta terlibat langsung dalam mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi kota Bandung. Ada rasa bangga ikut membangun kota yang ditumbuhkan di kalangan para pemuda tersebut,

sehingga mereka secara pro aktif dan sukarela menyumbangkan tenaga dan pikirannya dalam membantu pemerintah membangun masyarakat. Ridwan Kamil berhasil membangun kesadaran warganya, bahwa kota Bandung adalah milik bersama seluruh warga yang harus dijaga dan dipelihara bersama, kebersihannya, kenyamanannya, ketahanan warga dan masyarakatnya, dan lain-lain sebagainya. Intinya, dia berhasil membangkitkan kepedulian warga Bandung akan keberadaan kotanya. Dengan kata lain, melalui penerapan sistem Kota Cerdas atau Smart City ini, pak walikota berhasil membangun 'Rasa Sayang' warganya terhadap kotanya.

Bagaimana dengan Mataram?

Apabila dibandingkan dengan Bandung, tentu Mataram lebih sederhana. Penduduknya lebih sedikit dan wilayahnya lebih sempit. Artinya, kalau di Bandung bisa, Mataram harusnya pasti bisa. Apalagi dewasa ini pengguna HP di Mataram hampir merata di setiap rumah tangga. Ini adalah modal infrastruktur utama. Tinggal 'menempelkan' sistem aplikasi sesuai dengan program yang diterapkan maka selesailah urusan smart city.

Mulai dari urusan ambulans untuk menjemput warga yang membutuhkan, urusan layanan pendidikan anak-anak, sampai pada urusan patroli polisi untuk membantu warga yang kerampokan ataupun kebakaran yang tiba-tiba, ataupun juga urusan kebersihan kota yang sering ber-masalah. Dengan luas areal jangkauan kota Mataram yang relatif sempit, maka tidak ada alasan bagi petugas negara untuk tidak sampai ke TKP sesegera mungkin.

Dengan sistem smart city ini, tidak diperlukan petugas patroli lalu lalang setiap saat di lingkungan pemukiman, yang

dapat menjadi penyumbang kemacetan lalu lintas. Mereka cukup stand by di posko masing-masing. Bahkan dengan sistem relawan yang juga dapat dikembangkan, petugas-petugas terkait dapat saja berasal dari warga setempat, sehingga pertolongan pertama atau respons darurat dapat segera secara real time dapat dilaksanakan. Mari membangun kota dengan kebersamaan. Mari bangun rasa bangga menjadi warga kota Mataram, dan rasa bangga telah turut serta didalam membantu warga yang membutuhkan. Sekecil apapun bantuan itu. Mari Sayangi Mataram. *Wallahu a'lam bissawab. (Jkt 14/07/15)*

Menyederhanakan SPJ

Ketika memberikan sambutan dalam cara penyerahan penghargaan kepada Kementrian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang telah lima kali atau lebih mendapatkan status WTP di Istana Negara beberapa waktu yang lalu, Bapak Presiden Jokowi menekankan perlu penyederhanaan mekanisme dan dokumentasi Laporan atau Surat Pertanggung Jawaban keuangan negara. Beliau sangat gerah dengan masih demikian rumit dan banyaknya kertas yang harus dipergunakan dalam rangka penyelesaian LPJ atau SPJ tersebut. “kalau ada orang lembur di kantor, pasti mereka mengerjakan SPJ. Begitu juga kalau ada tumpukan kertas di meja, pasti itu urusannya dengan SPJ,” ungkap beliau dengan nada dan raut muka yang sangat serius.

Memang beliau orang yang sangat praktis. Tidak mau yang *jelimet-jelimet*. Ketika menjadi walikota Solo, beliau yang memelopori proses perijinan yang biasanya hitungan bulan atau minggu menjadi hitungan hari. Bahkan menjadi hitungan jam. Namun terkait dengan apa yang dikeluhkan tadi, sistem akuntansi kita sesungguhnya yang harus dibenahi. Paradigma yang selama ini menjadi anutan para akuntan, dan kemudian dituangkan menjadi keebijakan dalam pemeriksaan laporan pertanggung jawaban adalah, semakin banyak dokumen yang harus disediakan untuk membuktikan adanya sebuah transaksi penggunaan keuangan negara, akan semakin baik dan semakin terjamin akuntabilitasnya. Jadi, disamakan dengan berperkara di pengadilan. Semakin banyak saksi semakin baik. Sehingga,

semakin kecil kemungkinan seseorang untuk melakukan manipulasi atau kecurangan, misalnya dalam hal pengadaan barang jasa, perjalanan dinas, dan lain-lain.

Sebagai ilustrasi, untuk mempertanggung jawabkan suatu perjalanan dinas, dokumen yang harus ada adalah ijin bepergian, undangan, surat perintah tugas, surat perintah perjalanan dinas atau SPPD, bukti transportasi yang dipergunakan seperti tiket dan boarding pass (kalau naik pesawat), tiket taksi atau bus, kwitansi hotel, dan laporan hasil perjalanan. Di beberapa kementerian ditambah lagi dengan foto. Dan seterusnya. Artinya, untuk membuktikan bahwa seseorang tidak melakukan perjalanan fiktif, sekian banyak dokumen harus disiapkan. Itulah yang diperiksa. Tujuan pemeriksaan sebenarnya sederhana, benarkan seseorang itu melakukan perjalanan dinas. Dasarnya apa, bepergian pakai apa, kegiatan yang dihadiri apa, menginap dimana, kapan pergi kapan pulang, dan laporannya seperti apa.

Sementara kalau untuk pengadaan barang jasa, dokumen yang harus disiapkan per item barang adalah dokumen perencanaannya sebagai dasar pengadaan, dokumen terkait spesifikasi barang, dokumen proses pengadaan, beli langsung atau mekanisme lelang yang menjadi dokumen tersendiri dan cukup tebal, dokumen terkait proses eksekusinya berupa SK-SK (mulai dari SK Kepala Daerah, SK Kepala Dinas, SK Kepala Bidang, SK Kepala Seksi, SK Panitia Pengadaan, dan lain-lain), dokumen terkait serah terima barang dari panitia pengadaan ke panitia penerimaan dan pemeriksa barang, dokumen serah terima ke pengguna akhir, dan lain-lain.

Bisa dibayangkan betapa tebalnya dan begitu banyaknya pejabat yang harus tanda tangan untuk pembuktian bahwa barang yang sudah direncanakan untuk diadakan itu benar

proses pengadaannya. Inilah yang kemudian menjadi penyebab mengapa semakin tinggi jabatan seseorang, maka semakin banyak dokumen yang harus ditanda tangani, dan tentu akibatnya semakin lama atau semakin banyak waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tanda tangan - tanda tangan tersebut. Padahal idealnya, semakin tinggi jabatan seseorang, seharusnya semakin banyak waktu yang dipergunakan untuk memikirkan hal hal yang sifatnya kebijakan, untuk berinovasi, bukan hal hal yang sifatnya teknis administrasi.

Pertanyaannya adalah, mungkinkah berbagai hal tersebut disederhanakan? Tidakkah penyederhanaan akan berpengaruh terhadap akuntabilitas? Tidakkah akan memperbesar peluang orang atau oknum untuk manipulatif, berbuat tidak jujur?

Kata-kata 'fiktif' dan 'mark up,' 'memperkaya diri atau orang lain' adalah kata-kata kunci yang berpotensi untuk terjadinya kerugian negara, yang pada ujungnya menimbulkan terjadinya tindak pidana korupsi. Sebenarnya ke situ arah dari instrumen sistem pelaporan pertanggung jawaban diarahkan. Mekanisme dan sistem yang diimplementasikan dalam pembuatan LPJ atau SPJ harus mampu dengan mudah untuk mendeteksi terjadinya salah satu atau ketiga kata 'sakti' tersebut. Apakah seseorang melakukan perjalanan fiktif, belanja fiktif, atau me 'mark up' harga barang dan atau jasa yang dibeli? Inti dari sistem pelaporan yang dibuat sesungguhnya adalah itu.

Oleh pemeriksa, pastilah yang dicari adalah hal-hal tersebut. Untuk pembuktiannya, dalam sistem yang ada sekarang, mekanisme dan dokumen yang harus disediakan, menurut Bapak Presiden, masih terlalu banyak. Artinya, masih bisa disederhanakan. Apalagi dalam era digital sekarang ini,

seharusnya penyederhanaan sistem pelaporan pertanggung jawaban itu tidaklah terlampau sulit. Kalau sekarang sudah mulai dipraktekkan e-planning dan e-budgetting, saya kira sudah waktunya diformulasikan e-reporting.

Saya membayangkan untuk pertanggung jawaban sebuah perjalanan dinas, misalnya, kita cukup membuka aplikasi e-reporting perjalanan, dimana kita dapat mengisi berbagai informasi yang diperlukan, seperti dasar bepergian (undangan dan/atau perintah tugas), waktu, kota tujuan, acara yang dihadiri. Sementara untuk bukti fisik kehadiran, cukup kita mengupload foto yang membuktikan kehadiran kita di acara tersebut. Tidak perlu ada tanda tangan panitia atau pejabat setempat. Sedangkan untuk menunjukkan berapa lama atau berapa hari, kita bisa mengupload bukti berupa boardingpass elektronik yang kita terima dari travel tempat kita membeli tiket pesawat. Sementara untuk bukti penginapan, menurut saya tidak diperlukan. Karena untuk penginapan ini, bisa ditanggung panitia, bisa kita tanggung sendiri. Bendahara kantor akan memberikan biaya perjalanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, real cost untuk transportasi, dan akomodasi sesuai dengan kebijakan yang ada. Dengan kata lain, untuk akomodasi tidak diperlukan bukti fisik seperti kwitansi hotel dan lain lain.

Paradigma ataupun asumsi yang terbangun selama ini dalam pembuatan juklak juknis pertanggung jawaban penggunaan keuangan negara sudah waktunya dirubah. Kalau selama ini asumsinya adalah: dalam penggunaan keuangan negara sebagian besar pegawai berpotensi dan cenderung untuk melakukan kecurangan, hanya sedikit yang jujur. Kita rubah menjadi sebaliknya, sebagian besar pegawai pasti jujur, kecuali hanya sedikit yang memang bermental curang. Dengan perubahan paradigma tersebut, para

pemeriksa, para auditor, tidak akan akan pening kepalanya jika tidak menemukan sesuatu kesalahan ketika melakukan pemeriksaan. Termasuk ketika memeriksa laporan pengadaan barang jasa, yang juga harus disederhanakan prosesnya.

Dengan perubahan mindset para pemeriksa tadi, kita akan dapat memperbaiki sistem dan mekanisme Laporan Pertanggung Jawaban menjadi lebih sederhana, praktis, tanpa mengurangi akuntabilitasnya sedikitpun. Dan Bapak Presiden Jokowi tidak akan lagi melihat tumpukan kertas berlabelkan SPJ di setiap kantor yang beliau kunjungi. *Wallahu a'lam bissawab.*

Satu NTB Satu Data

Salah satu hal yang Belanda tidak mau berikan kepada kita ketika mereka menjajah bangsa kita ratusan tahun adalah terkait dengan penatausahaan data. Saya katakan demikian karena sejak zaman dulu hingga sekarang, Belanda sangat terkenal dengan kerapiannya dalam menata dan menyimpan data yang mereka punya. Termasuk data ejarah, data kependudukan, data pembangunan, data dimbidang sosial, ekonomi, politik, dan lain-lain. Buktinya, berbagai data sejarah yang dimiliki Indonesia seجا ratusan tahun silam, masih tersimpan hingga sekarang, di berbagai perpustakaan di negeri Belanda.

Berbagai dokumen kuno yang sangat bernilai yang merupakan warisan nenek moyang bangsa Indonesia dalam bentuk tulisan-tulisan ataupun benda-benda bersejarah peninggalan kerajaan-kerajaan di Indonesia, dapat kita temukan di Belanda. Ketika penulis berkesempatan untuk mengunjungi Belanda tahun 2010 yang lalu, kami berkesempatan pula mengunjungi museum Leiden. Kebetulan saat itu yang sedang berada di ruang pameran adalah perhiasan atau mungkin semacam rencana kerajaan yang berasal dari Kerajaan Selaparang. Menurut petugasnya, banyak benda-benda bersejarah dari Indonesia yang sudah dikembalikan ke museum nasional Indonesia, atas permintaan pemerintah Indonesia. Dengan kata lain, demikian rapinya Belanda menata usahakan dokumen-dokumen dan data yang mereka miliki, dan demikian rapinya juga mereka memelihara

data tersebut, sehingga mudah dicari, khususnya bagi para peneliti ataupun para pengambil kebijakan.

Berbeda dengan kita. Bukan hal yang dianggap aneh, kalau data pembangunan kita tidak sama antara instansi yang satu dengan yang lain. Apalagi data yang dimiliki pusat dengan yang dimiliki atau dipublikasi oleh daerah. Meskipun kita sudah memiliki BPS yang menurut Undang-undang, lembaga inilah yang berhak untuk mengeluarkan data resmi di Indonesia. Itupun masih sering bermasalah; artinya tidak jarang instansi lain mempersoalkan data yang dipublikasi oleh BPS.

NTB Satu Data

Gagasan membangun sebuah “Bank Data” yang diakui oleh semua pihak sesungguhnya merupakan harapan semua kita; khususnya para pimpinan kita di daerah ini. Gubernur NTB, Bapak Dr. TGH M Zainul Majdi, dalam beberapa kesempatan mempertanyakan tingkat akurasi data yang masuk ke meja beliau, karena dari sumber yang lain, data untuk satu hal, bisa berbeda. Beliau sangat cermat dengan data yang sifatnya kuantitatif. Daya ingat beliau sangat tinggi. Oleh karena itu, kalau kita melaporkan sesuatu dengan data yang sifatnya angka-angka, tidak boleh salah. Karena angka itu akan beliau ingat terus, sehingga kalau ada masuk data yang sama dengan angka yang berbeda, pasti akan beliau pertanyakan.

Dalam suatu rapat pimpinan, beliau pernah menanyakan, “kapan kita bisa memiliki data yang terintegrasi, yang merupakan hasil koordinasi dari semua instansi terkait, termasuk melibatkan BPS, sehingga kita memiliki satu data untuk satu persoalan.” Itulah yang kemudian kita formulasi dengan satu gagasan yang bertajuk NTB Satu Data.

Secara kebetulan di Bappeda ada lembaga donor dari Australia, yang bernama AIPD, atau Australia Indonesia Partnership for Decentralization, yang membantu Pemda dalam membangun good governance, termasuk membangun hal-hal yang berkait dengan data. Bahkan mereka telah berpengalaman membantu provinsi NTT dengan lembaga dan kantor “resource center” nya. Oleh karena itu, seperti “pucuk dicinta ulam tiba,” ketika gagasan NTB yang ingin memiliki “satu NTB satu data” kami diskusikan, mereka menyambutnya dengan antusias. Maka sejak 2011, dimulailah rencana pembangunan resource center tersebut dengan mengirimkan beberapa staf dari Pemda untuk study banding ke NTT dan Jawa Barat. Kita ke NTT untuk melihat bentuk kelembagaan dan bahkan juga gedung data yang dibangun atas bantuan dari AIPD. Sedangkan di Jawa Barat kita mempelajari seperti apa lembaga sejenis mereka bangun.

Ternyata di Jawa Barat ini sudah memiliki lembaga yang bernama “Jabar Satu Data.” Lembaga ini berdiri dan menjadi UPT di bawah Bappeda Jabar, sejak tahun 2010. Mereka punya gedung sendiri, dan sekarang telah menjadi pusat data yang operasional dan fungsional. Berbagai data yang umum maupun khusus yang biasanya diterbitkan oleh BPS, mereka terbitkan. Mereka memang sudah menanda tangani kerjasama dengan BPS, sehingga data yang dikeluarkan harus sinkron. Tidak boleh berbeda. Dalam perkembangannya, pusat data ini juga memanfaatkan teknologi informasi, sehingga masukan data dari berbagai instansi di jajaran pemprov atau kabupaten/kota dapat secara cepat di entry. Ada operator data entry yang dilatih, di setiap instansi. Setelah data masuk dan terkumpul, barulah kemudian diadakan rapat sinkronisasi dan verifikasi, sebelum kemudian dipublikasi.

Kira kira seperti itulah, NTB SATU DATA yang ingin diwujudkan, sebagai implementasi dari diskusi dan juga perjalanan yang cukup panjang selama ini. Jika tidak ada aral melintang, pada tanggal 2 September 2014 ini, Gubernur NTB akan meresmikan pusat data yang diberi nama BALE ITE, yang gedungnya telah selesai direnovasi di Jalan Majapahit, tidak jauh dari perpustakaan wilayah, atas bantuan dari AIPD tersebut.

Setelah gedung diresmikan, tentu harus segera ditetapkan bentuk kelembagaannya. Apakah akan meniru Jawa Barat, yakni dalam bentuk UPT di bawah Bappeda, ataukah bentuk lain, UPT dibawah Badan Perpusda, atau seperti apa. Yang pasti adalah, Bale Ite harus menjadi pusat layanan data dan informasi yang terbuka dan bermanfaat bagi seluruh warga masyarakat, terlebih bagi para mahasiswa, dosen, peneliti, dan masyarakat terpelajar lainnya yang selalu haus akan data. Tentu yang utama adalah bagi para pengambil kebijakan didaerah ini, sehingga data yang tersaji di Bale Ite tersebut, benar-benar sudah melalui proses uji sah yang ilmiah. Ada SOPnya, dalam memproduksi dan mempublikasi data. Dengan demikian, impian untuk memiliki "Satu NTB Satu Data" di daerah ini benar-benar terwujud. *Wallahu a'lam bissawab.* (Jambi, 270814)

Menuju Birokrasi Kelas Dunia

Alhamdulillah, cukup banyak ilmu yang saya peroleh dalam mengikuti Diklatpim Tingkat II yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI di Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur (PKP2A) kampus Jatinangor, Jawa Barat. Diklat itu sendiri diselenggarakan selama kurang lebih 70 hari, sejak 3 September sampai dengan 8 Nopember 2013.

Salah satu topik yang menarik dalam Diklatpim ini adalah adanya visi dari LAN s untuk mewujudkan birokrasi Indonesia menjadi birokrasi kelas dunia. Tidak kurang dari Kepala LAN sendiri membicarakan masalah itu. Demikian pula para pembicara yang lain. Ini artinya, “menjadi birokrasi kelas dunia” itu sudah tidak lagi sekedar menjadi jargon, tapi sudah masuk dalam blue print atau grand design pembangunan aparatur pada Kementerian Negara Pembinaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi. Kelahiran UU Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sedang difinalisasikan di DPR, juga merupakan bagian dari grand design itu. Konon, dalam ujian tulis calon PNS yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini, materinya sudah mencerminkan visi itu. Pemerintah sudah mulai meletakkan dasar-dasar pada *mindset* para calon PNS, bagaimana mereka berkiprah ke depan; bagaimana mereka menata diri, menata perilaku dan cara berfikir, sehingga kualitasnya tidak kalah sama PNS dari negara lain.

Apa itu Kelas Dunia?

Isitilah kualitas kelas dunia sudah umum dipakai di dunia Perguruan Tinggi. Ada isitilah (yang dipakai untuk promosi): *World Class University* atau Universitas Klas Dunia. Tidak lain maksudnya adalah kualitas pengajar dan lulusan Perguruan Tinggi tersebut tidak jauh beda dengan kualitas Perguruan Tinggi yang ada di negara-negara maju.

Dari sisi SDM dan infrastruktur, ada semacam *benchmark* yang dipergunakan, misalnya: seberapa banyak penelitian dan publikasi ilmiah dengan kualitas internasional telah dihasilkan; berapa banyak professornya yang sudah 'berkelas dunia.' Seberapa banyak pendapat atau publikasi para professor tersebut telah dikutip oleh para peneliti atau pengajar lain dari kampus lain (yang dikenal dengan istilah *citation index*). Dan lain-lain.

Sementara itu, untuk membangun "birokrasi ber kelas dunia" tentu indikatornya berbeda. Menurut Sekertaris Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Tasdik Kinanto, inti dari birokrasi berkelas dunia itu adalah birokrasi yang profesional, akuntabel dan melayani.

Menurut Togar Arifin Silaban, yang menulis buku tentang *World Class Bureaucracy*, "birokrasi kelas dunia adalah sistem yang mengelola administrasi pemerintahan dengan prinsip-prinsip *good governance*. Disana ada profesionalisme birokrat yang tinggi, kompetensi tinggi, transparansi dan akuntabilitas yang tinggi. Etos kerja para birokrat berada pada kematangan dan kedewasaan sistem birokrasi. Sistem bekerja efisien dan efektif."

Dengan kata lain, birokrasi klas dunia itu intinya pada dua sumbu: sumbu pertama adalah aparatur SDM itu sendiri;

dan yang kedua adalah pada sistem, tata kelola administrasi atau *governance*.

Antara SDM dan system, menurut teory *System Thinking* yang kami alami selama Diklatpim ini, saling mempengaruhi. SDM yang baik akan melahirkan system yang baik. System yang baik, akan mewujudkan birokrasi yang baik pula. Dari mana mulainya?

Kalau itu pertanyaannya, saya akan menjawab tanpa ragu: SDMnya. Inilah yang kita benahi terlebih dahulu. System yang ada sekarang kita laksanakan sebagaimana mestinya; karena asumsinya, system yang ada sekarang sudah baik. Ketika suatu hari kwalifikasi SDM yang kita bangun dan kembangkan telah meningkat, maka dengan sendirinya mereka akan dapat menakar, apakah system yang ada sekarang sudah cocok, atau perlu disempurnakan; dalam rangka memenuhi tuntutan layanan yang disediakan untuk publik.

Bukankah, seperti yang disampaikan Sektretaris Menpan di atas, bahwa ujung dari kualitas birokrasi itu sesungguhnya adalah kepuasan publik terhadap jasa layanan yang mereka sajikan. Apa yang aparat birokrasi kerjakan sehari-hari di kantor tidak lain sesungguhnya adalah bagaimana meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan birokrasi sehari-hari. Karena esensi dari terbentuknya sebuah negara adalah bagaimana rakyat atau penduduk di negara itu dapat terlayani kebutuhannya dalam kehidupan mereka sehari-hari.

Kalau kondisi pada hari ini, kesan umum terhadap pelayanan birokrasi masih belum ideal. Bahkan jauh dari ideal. Masih cukup banyak terdengar kasus-kasus yang terjadi yang melibatkan aparaturnya yang kemudian muncul isitilah arogansi

aparatur, ego sektoral, tidak profesional, asal-asalan, dan lain-lain. Kesemuanya itu mencerminkan kualitas aparatur kita saat ini. Bahkan tidak sedikit dari kalangan aparatur yang justru 'minta dilayani' oleh masyarakat, bukan menempatkan diri sebagai pelayan masyarakat.

Saya ingat ketika masih kuliah di Amerika Serikat. Dalam sebuah perjalanan, saya tersesat, dan masuk ke suatu kantor untuk menanyakan arah yang harus saya lalui. Begitu mereka tahu masalah saya, secara langsung salah seorang dari pegawai yang ada di kantor itu kemudian menemui saya dan bahkan ke luar dari gedung itu untuk menunjukkan ke arah mana saya harus mengendarai kendaraan saya. Dia rupanya merasa tidak cukup hanya dengan menunjukkan peta yang saya bawa. Dia harus yakin bahwa saya faham apa yang dia jelaskan. Seperti itulah, mungkin, pelayanan yang seharusnya diberikan oleh aparatur yang nota bene berlabel klas dunia. Profesional, artinya faham yang mereka harus kerjakan, faham apa yang mereka harus berikan, dan faham bahwa apa yang diberikan itu adalah sesuai dengan apa yang dikehendaki masyarakat. Bahkan mereka juga harus faham, apakah masyarakat puas atau tidak dengan layanan yang mereka berikan. "As simple as that," kata orang Amerika tadi, setelah melihat dari raut wajah saya, kalau saya faham kemana saya harus menuju, agar tidak tersesat. Wallahu 'alam bissawab. (Jatinangor, 19/10/13)

Indonesia Terpaksa Maju: Bagaimana dengan NTB?

Bahasa wartawan, atau mantan wartawan, memang beda. Beda dengan akademisi, politisi, apalagi dengan birokrasi. “Indonesia terpaksa maju,” seperti judul tulisan ini adalah kalimat yang diucapkan oleh Pak Dahlan Iskan, Menteri Negara BUMN RI, yang nota bene adalah mantan wartawan. Beliau mengucapkan kalimat tersebut di hadapan ribuan wisudawan Universitas Brawijaya Malang, yang saya hadiri karena anak pertama saya menjadi wisudawan, Sabtu 20 Oktober kemarin.

“Indonesia terpaksa maju,” menurut pak Dahlan, karena saat ini terdapat 136 juta orang di Indonesai ini yang sudah siap maju. Mereka itu tidak lagi memikirkan apa yang akan dimakan hari ini. Mereka tidak lagi memikirkan apa yang akan dikonsumsi minggu depan. Mereka tidak lagi memikirkan soal rumah, soal pakaian, ataupun soal kebutuhan pokok lainnya. Yang mereka pikirkan adalah bagaimana agar bisnis mereka, usaha mereka, pekerjaan mereka, hari ini lebih baik dari hari kemarin. Usaha mereka bulan depan lebih maju dari usaha mereka bulan ini. Jumlah tenaga kerja yang mereka pekerjakan makin bertambah dan bertambah; sehingga hidup mereka makin berarti dari hari ke hari. Ada 136 juta orang, warga Indonesia yang seperti itu. Yang kalau dibandingkan dengan negara Malaysia, lebih dari sepuluh kali lipat. Artinya,

akan tercipta sepuluh kali negara Malaysia yang akan menjadikan Indonesia sebagai negara maju.

Jumlah yang sangat besar inilah yang tidak akan dapat dibendung oleh siapapun. Dalam kalimat pak Dahlan, meski banyak yang pesimis dengan “apakah Indonesia bisa maju, padahal korupsi masih merajalela, demokrasi masih setengah hati, pemerintah gagal mensejahterkan rakyatnya,” dan berbagai kalimat bernada pesimis dan skeptis lainnya; namun kenyataannya, pada hari ini di Indonesia, ada 136 juta rakyat Indonesia yang sudah siap maju. “jadi, walaupun Indonesia ini dipimpin oleh pemerintah yang tidak mau rakyatnya maju, tidak mau masyarakatnya sejahtera, dengan kondisi aktual kelas menengah Indonesia seperti itu, maka Indonesia pasti akan maju. Kita akan lihat dalam lima atau sepuluh tahun yang akan datang, Indonesia akan menjadi negara yang terpaksa maju,” ungkap pak Dis yang disambut dengan tepuk tangan oleh para wisudawan.

Yang tidak dijelaskan oleh beliau adalah kondisi hari ini, tentu tidak terlepas dari kontribusi para pengambil kebijakan di negeri ini dalam kurun waktu yang cukup lama. Peran dan pengaruh kuat para presiden dari masa ke masa yang telah mengantarkan republik ini, mengantarkan seluruh rakyat menuju ke arah kemajuan sehingga tercipta 136 juta rakyat yang siap untuk maju itu.

Bahwa masih ada lebih dari dua puluh juta penduduk yang masih bergelut dengan kemiskinan, masih harus terpaksa memikirkan kebutuhan dasar dan pokoknya sehari-hari, hingga hari ini, tentu harus juga diakui. Itulah tugas pemerintah selanjutnya, untuk menanggulangnya. Tugas pemerintah pulalah untuk mengentas-kannya, mengeluarkan mereka dari jaring kemiskinan, untuk selanjutnya turut serta dalam barisan penduduk yang siap maju. Apakah secara intra generasi atau

antar generasi. Yang dapat dimainkan oleh pemerintah sesungguhnya adalah mengambil kebijakan yang dapat mempercepat proses pengentasan kemiskinan, selaras dengan Bergeraknya 136 juta rakyat yang dimaksud oleh Pak Dahlan itu. Dalam kalimat yang jadi judul salah satu buku saya, harus ada “Affirmative Policy” yang secara konsisten dijalankan pemerintah, sehingga kelompok masyarakat miskin, terutama di daerah-daerah yang tertinggal, akan lebih cepat terentaskan. Lebih cepat dari harapkan kaum miskin itu sendiri.

Bagaimana dengan NTB?

Kalau kita menggunakan bahasanya Pak Dahlan Iskan, maka NTB juga termasuk di dalam barisan bangsa yang akan ‘terpaksa’ maju. Di NTB, ada sekitar 3,6 juta penduduk yang sudah siap maju; kalau kita menggunakan kamusnya Pak Dahlan. Yang sudah tidak risau dengan kebutuhan dasar sehari-hari. Sekarang saja kita sudah mulai merasakan itu. Baru setahun BIL beroperasi, dinamika perekonomian daerah ini mulai terasa meningkat secara signifikan. Indikator paling sederhana untuk mengukur kemajuan ekonomi adalah mulai padatnya arus kendaraan di jalan raya; daya beli masyarakat mulai meningkat.

Para pengembang property kewalahan untuk menyediakan komplek perumahan yang ditawarkan. “Kita menjual rumah di NTB ini seperti menjual kacang goreng saja; berapapun yang ditawarkan, tidak perlu waktu lama, langsung terjual,” ungkap salah seorang pengembang pada penulis, suatu ketika. “Bank-bank mulai melirik NTB untuk membuka kantor cabangnya,” kata Pemimpin Bank Indonesia Mataram suatu ketika. “Itu artinya ekonomi di NTB sudah mulai menggeliat,” kata beliau. Karena memang tidak mungkin lah sebuah bank akan membuka kantor cabang tanpa didasari oleh kajian yang mendalam dan akurat tentang daya beli dan

prospek ekonomi di suatu daerah. “Bukan hanya bank milik pemerintah dan swasta nasional, tapi bank asingpun sudah banyak yang mengurus ijinnya, untuk membuka cabang di NTB,” lanjut beliau. “Hitung saja jumlah ATM yang ada sekarang. Dari berbagainama bank,” pungkasnya.

Saya membayangkan, kalau saja Mandalika Resort mulai dibangun tahun ini, beberapa usaha pertambangan yang sudah siap eksploitasi juga dimulai, seperti marmer di Bima, lantasi pabrik pengolahan hasil laut di Teluk Santong, pabrik rumput laut di Dompu dan Lombok Timur, untuk menyebut beberapa simpul ekonomi yang sudah pasti beroperasi di NTB, Gerakan Seratus Ribu Wirausaha Baru sukses, maka apa yang disampaikan pak Dahlan tersebut bukanlah bualan seorang mantan wartawan. Tapi adalah suatu keniscayaan yang secara teoritis memang seharusnya akan terjadi. Kalau bahasa agamanya, sudah menjadi sunatullah. Bahwa dalam lima – sepuluh tahun ke depan, Indonesia, dan NTB di dalamnya akan menjadi maju.

Tinggal bagaimana pemerintah daerah menjaga kondusifitas daerah, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan penduduk, memelihara dan terus mengembangkan berbagai infrastruktur dan menjamin ketersediaan energi yang diperlukan untuk membangun.

Dari berbagai perbaikan angka-angka indikator yang pernah saya tulis sebelumnya, sebagai dampak dari kerja keras masyarakat dan pemerintah serta dunia usaha selama lima atau sepuluh tahun terakhir, maka manakala Indonesia ‘terpaksa’ maju (meminjam istilah pak Dahlan Iskan) suatu ketika nanti, maka, NTB pun akan ikut di dalam kemajuan itu. Kalaupun masih ada yang pesimis, bahkan cenderung skeptis, makakita, bagian dari yang optimis dan selalu berfikir positif, jangan pernah terpengaruh. Seperti katanya pak

Dahlan kepada para para wisudawan UB hari itu: "kalian memiliki kesempatan untuk memilih, apakah akan ikut gelombang kemajuan bersama dengan 136 juta rakyat Indonesia yang sudah siap maju, atau terlena dengan fikiran-fikiran pesimis dan skeptis yang membawa kalian sebagai orang yang selalu mengeluh dan menyalahkan keadaan." *Wallahu a'lam bissawab.* (Surabaya, 21 Oktober 2012)

ARSA dan Presentasi di Filipina

Asian Rural Sociology Association (ARSA) adalah organisasi para ahli Sosiologi Pedesaan tingkat Asia, yang saya ikut terlibat membidani kelahirannya. Waktu itu saya baru saja menyelesaikan program master saya di Ohio State University, Amerika Serikat. Waktu itu, pada tahun 1992, saya baru saja selesai mempertahankan tesis Master saya. Kebetulan tidak lama setelah itu, ada Kongres International Rural Sociology Association atau IRSA di Pennsylvania State University, dimana saya ikut menjadi peserta. Saya juga ikut presentasi, mempresentasikan materi dalam tesis master saya, yaitu tentang peran NGO dalam pembangunan.

Pada saat kongres inilah saya ikut dalam pertemuan khusus para peserta dari Asia, yang digagas oleh beberapa professor dari Jepang. Hadir dalam pertemuan itu para anggota delegasi dari beberapa negara Asia yang ikut dalam Kongres, seperti Jepang, Korea Selatan, Taiwan, China, Bangladesh, Pakistan, Malaysia, dan Indonesia. Dari Indonesia, yang ikut Kongres ada beberapa orang. Namun yang ikut dan aktif dalam pertemuan tersebut saya sendiri. Sehingga dalam penandatanganan deklarasi pembentukan ARSA, sayalah yang mewakili Indonesia. Secara resmi kemudian saya masuk menjadi anggota working group pembentukan Asian Rural Sociology Association (ARSA). Ketuanya berasal dari Jepang.

Beberapa tahun kemudian, ARSA ini resmi berdiri dan menjadi anggota International Rural Sociology Association (IRSA). Ketika pertemuan dua tahunannya diadakan di Rio de Janeiro, Brazil, tahun 2001, saya terpilih menjadi Vice President atau Wakil Ketua. Sedangkan Presiden atau ketuanya adalah seorang Professor dari Nagoya University, Jepang. Pada tahun 2004, saya menjadi tuan rumah pertemuan dua tahunannya, yang kami adakan di Jayakarta, Sengigi. Hampir pada setiap pertemuannya, di Bangkok, di Beijing, di Nagoya, dan terakhir di Filipina, saya selalu hadir. Meskipun saya tidak lagi menjadi vice president, tapi saya tetap menjadi council member atau dewan pengurus ARSA yang mewakili Indonesia.

Pada tahun 2010, pertemuan dua tahunannya diadakan di Filipina. Saya diundang sebagai salah satu keynote speaker. Makalah yang saya presentasikan pada waktu itu berhubungan dengan keberadaan kandang kolektif di Lombok.

Pada kesempatan ini saya menyampaikan berbagai keunikan dari kandang kolektif yang mungkin di tempat lain tidak ada. Bahwa dengan kandang kolektif itu berbagai persoalan yang sering menjadi kendala peternak dalam mengembangkan ternaknya dapat diatasi. Mulai dari persoalan keamanan, pakanternak, pengendalian penyakit, sampai pada aspek pemasaran.

Secara teoritis, sebuah budaya memang berasal dari tuntutan sosial; perilaku sosial yang kemudian terjadi berulang-ulang karena persoalan kebutuhan. Kandang kolektif menjadi budaya peternak di Lombok karena adanya tuntutan dari proses beternak itu sendiri; dengan adanya berbagai persoalan yang sering kali mereka hadapi. Salah satu persoalan adalah karena relatif terbatasnya skala usaha mereka. Setiap rumah tangga peternakan umumnya hanya

menguasai dua sampai tiga ekor ternak sapi. Dari skala usaha ekonomi, jumlah ini masih belum layak. Di satu sisi, kemampuan peternak itu sendiri memang terbatas. Khususnya kemampuan dalam menyediakan pakan bagi ternaknya.

Oleh karena itu, dengan menggunakan kandang kolektif, persoalan pakan ini, sekaligus skala usaha keekonomian dapat diatasi, karena dengan berkelompok, usaha ternak dapat menjadi lebih efisien. Masalah pakan dapat diatasi; bahkan juga pemasarannya.

Dengan sistem kandang kolektif, kegiatan penyuluhan juga dapat dilaksanakan secara lebih terorganisir. Para peternak dapat berfungsi sebagai manajer, sekaligus tenaga kerja bagi ternak masing-masing. Di lokasi kandang kolektif yang telah maju, kelembagaan menjadi modal sosial yang dapat diandalkan untuk memperkokoh posisi tawar peternak. Perubahan mindset atau pola pikir peternak, sehingga mereka dapat lebih berorientasi komersial, tidak sekedar memenuhi hobi atau kesenangan semata, dapat dilaksanakan.

Perubahan mindset ini merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam rangka memajukan peternakan di Nusa Tenggara Barat, khususnya di Pulau Lombok. Artinya, pola pikir beternak sebagai hobi, yang dari hitungan ekonomi kurang menguntungkan, harus dapat diubah menjadi pola pikir komersial. Artinya, beternak haruslah menjadi suatu usaha keluarga yang memiliki nilai keekonomian tertentu. Beternak harus dapat menguntungkan.

Hal lain terkait ini adalah, menjadikan kegiatan beternak sebagai kegiatan usaha utama. Bukan kegiatan usaha sampingan.

Menjadikan kegiatan beternak sebagai kegiatan usaha utama juga memerlukan langkah strategis yang harus dilaksanakan di Nusa Tenggara Barat. Hal ini mengingat masih belum banyak peternak-peternak di NTB yang sudah mapan atau maju, karena menjadikan kegiatan beternak sebagai kegiatan utamanya. Bahkan harus diciptakan peternak-peternak handal yang mampu mengelola agrobisnis peternak sedemikian rupa, sehingga bukan hanya bergerak di ranah peningkatan produksi, tapi juga pada ranah industri olahan hasil peternakannya. Bila perlu mereka telah dapat membangun rumah potong hewan sendiri, dan tidak lagi menjual sapi hidup, atau daging sapi, tapi sudah dalam bentuk hasil olahan, seperti bakso, abon, sosis, dan lain-lain.

Bagaimana caranya? Disitulah manfaat kandang kolektif, untuk dapat dimanfaatkan dalam mengembangkan usaha peternakan kedepan. Tinggal bagaimana intervensi pemerintah untuk proses pengembangan tersebut, mulai dari difusi inovasi dan teknologinya, sampai pada penguatan permodalannya. Karena kalau bicara pasar, Indonesia masih sangat luas dengan pasar yang masih sangat terbuka. Kalau kita tidak segera bertindak, maka pasar kita yang demikian potensial, hanya akan menjadi rebutan para pedagang dari luar daerah, bahkan luar negeri. Masalahnya, kegiatan beternak di masyarakat kita masih lekat dengan hobi atau pekerjaan sampingan. Bukan kegiatan ekonomi utama rumah tangga. *Wallahu a'lam bissawab. (Mataram, 130414)*

Catatan Kecil dari Calgary, Canada

Memang ini baru pertama kali saya ke Calgary, Canada. Sebuah kota di panati barat, dekat denngan Vancouver. Dengan penduduk sekitar 1,2 juta, Calgary termasuk kota terbesar ketiga di Canada. Calgary ini lahir atau terbentuk sebagai kota pada tahun 1884 dengan Walikota pertamanya bernama George Murdoch. Kota ini berkembang dengan pesat dengan bangunan-bangunan tingginya pada tahun 1970an, sebagai berkah dari oil boom. Maklum penghasilan provinsi ini sebagian besar dari tambang minyak dan pertanian.

Kota ini cukup indah. Pernah menjadi tuan rumah olimpiade musim dingin tahun 1988. Karenanya di kota ini ada dibangun sebuah taman, untuk mengenang oeristiwa itu. Namanya Olympic Park. Kebetulan dekat sekali dengan hotel tempat saya menginap.

Seperti halnya kota kota lain di Amerika atau Kanada, 'settingan' kotanya sudah standar. Ada gedung gedung perkantoran tinggi. Jalan-jalan raya tertata rapi. Ada monorail atau kereta api yang membawa penumpang dari ujung ke ujung dalam kota. Ada juga bus kota. Bahkan juga bus dan kereta api antar kota. Kota ini menjadi pusat kereta api Canada sejak tahun 1996, pindah dari Montreal.

Yang menarik, dan mungkin bisa kita tiru adalah penataan jalan-jalan di pusat keramaian. Ada jalan-jalan lebar yang merupakan lorong antara pusat pertokoan yang diperuntukkan hanya untuk pejalan kaki saja. Tidak boleh ada kendaraan lewat disitu. Pengerasannya juga tidak pakai aspal. Ada tempat tempat duduk yang disediakan. Jadi semacam taman di tengah pusat perbelanjaan.

Saya membayangkan kalau jalan antara perlimaan di ampenan menuju pantai ampenan dibuat seperti itu. Bolehlah ada kendaraan yang lewat di situ, tapi kecepatannya tidak boleh lebih lima atau sepuluh km per jam. Sehingga tidak menghawatirkan bagi pejalan kaki. Karena kalau dilarang, kesian mereka yang tinggal di kampung di sekitarnya. Atau mereka yang mau menikmati pantai juga bisa pakai mobil. Nah, samping kanan kirinya dipenuhi oleh para penjual souvenir ataupun rumah makan aneka rasa. Tentu perlu dana dan waktu. Karena untuk orang datang ke sana, pasti harus dibangun daya tariknya yang khas. Ini yang perlu difikirkan bersama. Gagasan pak wali untuk menghidupkan Ampenan sebagai kota tua sudah tepat. Kalau jadi dibangun pelabuhan pariwisata di Ampenan, dapat menjadi daya tarik tersendiri. Wisatawan dari Bali yang mau ke Lombok bisa mendarat di sana. Kalaupun mereka tidak menginap, tapi dengan dibangunnya berbagai sarana pariwisata dan perbelanjaan di Ampenan, uang mereka bisa 'dikuras' di situ.

Mesti dibangun juga pusat pertunjukan tetap. Apakah untuk kesenian tradisional ataupun modern. Ini juga bagian dari upaya membangun daya tarik bagi wisatawan. Saya pernah terlibat dalam perencanaan pembangunan Museum Bahari di Ampenan. Mungkin ini juga dapat ditelaah kembali kemungkinannya. Museum bahari ini penting, mengingat Ampenan adalah salah satu jendela dunia untuk nusantara

pada masa lalu. Sebuah kota yang sangat terkenal. Bahkan namanya mungkin lebih dikenal dari pada pulau Lombok.

Kembali ke Calgary. Saya sempat menikmati taman olimpiade, atau Olympic Park. Tidak terlalu luas tapi cukup indah. Ada kolam dangkal ditengah tengah taman yang bisa disinggahi oleh burung-burung. Yang menarik, ada bangunan yang terdiri dari pagar-pegar dengan atap yang terbuka. Di sisi pagar atau temboknya terdapat nama-nama para peraih medali olimpiade yang berasal dari Kanada dari masa ke masa. Baik olimpiade musim panas, musim dingin, ataupun olimpiade khusus bagi penyandang cacat.

Di sini saya berfikir, bagus juga kalau kita juga dapat memberikan penghargaan bagi para peraih medali PON kita dari masa ke masa dengan mengukir nama mereka di lempengan tembaga dan meletakkannya di taman-taman seperti Olympic Parknya Calgaryitu. Supaya anak cucu kita tidak kehilangan jejak. Jangan sampai mereka tidak tahu, kalau pernah ada, putra putri terbaik kita dari NTB yang bisa meraih medali dalam even bergengsi seperti PON. Bahkan dalam PON 2012 lalu, demikian banyak medali yang diraih. Sayang sekali kalau nama-nama itu hanya berlalu begitu saja, tanpa pernah kita ukir di sebuah prasasti yang monumental. Ini juga akan memberikan inspirasi tersendiri bagi mereka, para generasi muda kita. Agar bisa berprestasi, bahkan lebih tinggi dari para pendahulunya.

Saya juga sempat naik ke Calgary Tower, yang tingginya sekitar 190,8 meter. Tower ini didirikan tahun 1967 dan diresmikan pada bulan Juni 1968. Untuk naik, kita bayar 16 dolar per orang. Di atas, di bawah area observasi ada restoran berputar. Cuma restoran ini selalu penuh. Kalau mau makan di situ, harus pesan jauh-jauh hari sebelumnya. Dikatakan berputar, karena memang tempat duduknya selalu bergerak

berputar, 360 derajat. Makanya diberi nama Restoran 360 derajat.

Dari ketinggian 190 meter itu, kita dapat menikmati Kota Calgary seluruhnya. Kalau pakai teleskop, yang disediakan secara gratis, kita bisa melihat bangunan-bangunan di pinggir kota, sampai sejauh dua puluh kilometer. Di bagian lantai bawah, ada toko souvenir, tempat untuk membeli oleh-oleh. Tentu oleh-oleh khas Calgary. Meskipun sebagian besar Made in China.

Yang menarik, di dinding-dinding menara ini, dipajang foto-foto lama, yaitu sewaktu menara itu dibuat. Artinya ada semacam diorama proses pembangunan menara itu, dari mulai peletakan batu pertama, sampai peletakan kuadron puncaknya. Di sini saya teringat bangunan Islamic Center kita yang saat ini sedang dibangun. Termasuk pembangunan menara Asmaul Husna-nya, yang tingginya 99 meter itu (jadi setengah dari Calgary Tower). Foto-foto dokumentasi masa-masa kontruksinya harus diamankan dan nanti dipajang di tempat yang khusus disediakan untuk itu, di dalam area IC tersebut.

Jam di tangan saya menunjukkan hampir pukul 21.00. tapi sinar matahari masih nampak. Rupanya magrib di Calgary pk. 21.55 sementara matahari terbit pk 05.20. Artinya, matahari di peraduannya hanya lima atau enam jam saja. Merasa sudah capek, kami kembali ke hotel, istirahat. Esoknya harus presentasi, menyampaikan gagasan yang terkait dengan ikhtiar membangun Generasi Emas NTB di masa masa mendatang, melalui Hibah Kompetisi senilai dua juta dollar di Grand Challenge Canada yang cukup bergengsi. *Insha Allah. (Calgary, Canada)*

World Class Research University

Dari Indonesia Update 2012, Canberra

Saya beruntung mendapat kesempatan menghadiri Indonesia Update Conference 2012 di Australian National University. Penyelenggaranya adalah Indonesia Project yang konon sudah berlangsung bertahun tahun. Pada forum tahunan inilah dibicarakan berbagai progress maupun tantangan yang dihadapi oleh Indonesia dalam tahun berjalan dan yang akan datang. Para Indonesianis dari seluruh Australia berkumpul dalam forum ini. Narasumbernya juga berasal dari tokoh tokoh dan para akademisi tersohor dari Indonesia seperti Prof. Fasli Jalal, Anies Baswedan, Thee Kian Wie, dan lain lain.

Salah satu topik yang diperbincangkan adalah terkait dengan peningkatan kualitas Pendidikan Tinggi, dengan maraknya berbagai PT di tanah air yang berjargon World-class University alias Universitas berkelas dunia. Target yang dikejar adalah PT tersebut masuk dalam rangking, entah yang ke seribu, lima ratus, seratus, atau bahkan jika mungkin di bawah seratus, dalam deretan universitas bergengsi di Asia atau dunia.

Pertanyaannya adalah, apakah semua PT kita harus 'jor-joran' menjadi world-class university, sebagai 'jualannya' sehingga menjadi menarik bagi para calon mahasiswa? Atau ada bahan 'jualan' lain yang dapat menjadi branding, sehingga

tetap menjadi favorit? Apa sesungguhnya yang menjadi daya tarik bagi setiap calon mahasiswa untuk memilih PT yang akan dimasukinya?

Berbagai pertanyaan tadi menjadi bahan diskusi para peserta conference, yang datang dari berbagai penjuror Australia. Saya sendiri mempertanyakan apakah memang seharusnya semua PT di Indonesia 'berwawasan global' menjadi world class research university? Atau cukup lah dengan kiprah menjadi center of excellence bagi kemajuan pembangunan di daerah atau di kawasan dimana PT tersebut berada.

Membangun sebuah perguruan tinggi berkualitas memang tidaklah mudah. Apalagi menjadikannya masuk dalam rangking dunia. Banyak faktor yang mempengaruhi. Banyak kriteria yang harus dipenuhi oleh sebuah perguruan tinggi untuk dapat mensejajarkan diri dengan PT lain yang lebih berkualitas, yang sudah memiliki reputasi tinggi, seperti UI, UGM, ITB, ITS, dan lain lainnya. Salah satunya adalah publikasi dari para professor dan tenaga pengajar di PT tersebut; di jurnal ilmiah yang juga telah diakui kualitasnya (baca: terakreditasi). Yang tidak kalah penting, dan bahkan paling penting adalah kualitas proses belajar mengajar yang terjadi di sebuah perguruan tinggi. Kualitas belajar mengajar ini dipengaruhi oleh dua unsur penting juga, yaitu kualitas tenaga pengajar dan kualitas mahasiswanya.

Persoalan yang terjadi pada perguruan tinggi di daerah daerah, seperti NTB, NTT, atau Indonesia bagian timur pada umumnya adalah kualitas input yang masuk ke PT tersebut relatif jauh lebih rendah dibandingkan dengan kualitas mereka yang masuk di PT PT di Pulau Jawa.

Diastika Rahwidiati dan Rivandra Royono dari AusAID Jakarta yang mempresentasikan hasil penelitian terkait fenomena PT di Indonesia mengungkapkan bahwa di NTT, mereka yang masuk Undana umumnya bukan dari kelompok sepuluh terbaik di SMA-SMA dari NTT. Karena mereka yang masuk sepuluh terbaik umumnya memilih melanjutkan studi ke Pulau Jawa. Fenomena itulah yang mempersulit peningkatan kualitas belajar mengajar di PT yang ada di daerah. Dengan kata lain, ketika input yang masuk di sebuah PT demikian rendah, bagaimana kita bisa berharap kualitas outputnya berkualitas. Apalagi kemudian kita bermimpi untuk menjadi world class university? Tapi apapula yang harus di 'jual' agar PT tetap diminati?

Jawabannya, menurut kedua peneliti di atas adalah memberikan pendidikan yang "locally relevant quality," yang lulusannya dapat berkontribusi terhadap pembangunan atau kebutuhan daerah. Artinya, mereka memahami apa yang dibutuhkan daerah, peluang kerja seperti apa yang mungkin dibutuhkan oleh masyarakat di daerah sekitarnya. Sehingga ketika mereka lulus dari PT, mereka dapat langsung terserap di daerahnya, baik sebagai pegawai ataupun memanfaatkan peluang pasar atau ekonomi yang ada untuk berwirausaha secara mandiri. Demikian pula bagi para professor dan tenaga akademik lainnya. Mereka seyogyanya dapat memberikan kontribusi melalui berbagai hasil penelitian yang dilakukan, terkait upaya pemecahan masalah yang ada di daerah. Dengan demikian, keberadaan sebuah PT di setiap daerah akan dirasakan eksistensinya oleh masyarakat dan pemerintah daerah setempat. Mungkin ini yang dimaksudkan oleh ungkapan hendaknya sebuah Perguruan Tinggi jangan jadi menara gading yang keanggunannya hanya dapat dinikmati dari kejauhan; namun hendaknya menjadi sumber mata air, dimana keberadaannya dirasakan secara langsung

manfaatnya oleh masyarakat sekitar. Menjadi perguruan tinggi yang “locally relevant institution” kiranya jauh lebih mudah dan cepat, serta lebih bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Tentu, tanpa harus mengekang, bahkan terus mendorong, mereka (tidak banyak memang) yang berpotensi untuk ‘go global’ di bidangnya. *Wallahu a’lam bissawab. (Sydney, 23 September 2012)*

Epilog: Industrialisasi dan Mimpi Gubernur NTB

Saya terinspirasi menulis soal ini setelah membaca tulisan Pak Gub Zulkieflimansyah di Lombok Post di lembar yang sama dengan tulisan saya tentang Korona dan Sosiologi.

Sebenarnya saya sudah memahami apa yang beliau pikirkan dengan industrialisasinya ketika beliau memaparkan konsep industrialisasi di depan para kepala SKPD awaltahunlalu. Waktu itu saya yang jadi moderatornya. Acara itu sendiri digagas oleh Kepala Bappeda kala itu, pak Ridwansyah. Tempat acaranya juga di Bappeda. Di situ saya baru tahu kalau disertasi beliau terkait dengan industrialisasi. Jadi pantaslah, kalau beliau sangat faham seluk beluk industrialisasi.

Saya jadi ingat dengan konsep nilai tambahnya alm Prof. Habibie ketika menjadi Menristek sekembali dari Jerman tahun 80an. Bahwa kalau singkong dijual mentah, harganya bisa sepersepuluh bahkan seperseratus atau seperseribu dari kalau singkong diubah atau diproses melalui proses industri. Katakanlah menjadi kosmetik, atau obat, misalnya. Atau yang paling sederhana menjadi kerepek singkong lantas dikemas dengan bagus. Selisih antara jual mentah dengan jual hasil industri itulah, yang Prof. Habibi katakan sebagai nilai tambah. Syaratnya bisa terwujud nilai tambah itu dan menjadi uang, ya

barangnya laku dijual. Dan disitulah masalah kunci dari sukses atau gagalnya proses industrialisasi di suatu negara atau suatu daerah.

Hasil industri kita, selama ini, tidak laku di pasar. Kalah bersaing dengan produk dari daerah lain atau dari luar negeri. Contohnya, industri minyak kelapa kita di Cakra yang dulu pernah berjaya. Sekarang sudah tinggal nama, karena tidak mampu bersaing dengan produk sejenis dari Jawa. PT GNE, pernah diberikan fasilitas permesinan untuk memproduksi pupuk organik di Banyumulek. GNE sudah menanam investasi dengan membangun gedungnya. Tapi apa yang terjadi? Industri itu layu sebelum berkembang. Ketika menjadi pejabat, saya berusaha membantu. Tapi “dikalahkan” oleh aturan. Lho koq aturan?

Ide atau saran saya waktu itu meminta Dinas terkait untuk membeli produk yang dihasilkan oleh GNE, kemudian memasukkannya ke dalam paket hibah yang akan dibagikan ke kelompok-kelompok tani. Bahasa saya mirip dengan apa yang disampaikan oleh pak Gub sekarang. Kalau pemerintah tidak mau membantu industri, apalagi yang sifatnya IKM, untuk membeli produknya, maka kita tidak akan pernah memiliki industri yang sesungguhnya produknya kita butuhkan di daerah ini. Kita akan selamanya mengimpor produk tersebut dari luar. Dan itu artinya, petani atau produsen kita di NTB tidak akan pernah mendapatkan berkah nilai tambah.

Tapi itulah faktanya. Teman-teman kadis tidak mau ambil resiko. Membeli barang dengan harga yang lebih tinggi dari harga pasar. Apalagi belinya ke satu produsen saja. Nanti terganjal istilah punya “vested interest” atau monopli. Padahal kalau kita mau membantu mereka, para IKM itu, ya, pemerintah harus mau membeli produknya dalam skala besar. Dan berkesinambungan. Katakanlah tiga atau lima tahun. Baru

mereka bisa tumbuh. Dan setelah tumbuh, barulah mereka akan mampu menghadapi persaingan pasar. Karena yang tidak mungkin dilakukan adalah menyetop produk yang sama dari luar daerah atau luar negeri. Maka “affirmative policy” seperti judul buku pertama saya sewaktu jadi Kepala Bappeda NTB, yang harus dilaksanakan. Artinya ada kebijakan khusus dari pemerintah yang berani untuk keluar dari pakem aturan yang ada. Seperti aturan tender misalnya. Kalau belanja di atas dua ratus juta harus melalui tender terbuka. Nah kalau tender terbuka, pastilah IKM kita akan kalah dari produk industri besar.

Untuk itu, solusinya pak Gub dan DPRD buat Perda. Perda tentang industrialisasi di NTB. Di PERDA itulah diatur hal-hal atau seluk beluk tentang bagaimana pemerintah berperan aktif dalam membantu IKM-IKM kita di NTB sehingga produk yang dihasilkan mampu menyaingi produk dari luar daerah. Sekarang ini memang sudah ada Rumah Kemasan milik Dinas Perindustrian. IKM-IKM bisa mendapatkan fasilitas kemasan secara murah atau gratis. Tapi ternyata itu masih belum mampu mendongkrak IKM kita. Karena kapasitasnya masih terbatas. Anggaran yang disiapkan APBD untuk itu juga sangat minim.

PERDA tentu tidak bisa meng’halal’kan belanja di luar ketentuan yang diatur oleh peraturan di atasnya, dalam hal ini PP dan UU. Maka usul saya, Pemda NTB, harus berani mengusulkan ke Presiden untuk merubah bunyi Peraturan Pemerintah tentang belanja menggunakan APBD. Bahwa untuk kepentingan industrialisasi di daerah yang sangat strategis untuk mengentaskan kemiskinan, pemerintah boleh melakukan affirmative policy kepada para IKM. Boleh membeli produk mereka tanpa melalui tender dan dengan

harga yang ‘pasti’ membuat mereka untung dan karenanya akan cepat berkembang.

Bukankah Jepang bisa menjadi negara industri super power mengalahkan Amerika karena menerapkan affirmative policy seperti itu? Jepang seringkali ditegur oleh WTO, karena ketahuan menerapkan dumping policy. Artinya pemerintah membeli produk rakyatnya dengan harga jauh lebih tinggi dari pada harga ekspornya. Dengan sistem dumping itu, Jepang membantu rakyatnya untuk meningkatkan pendapatan dan sekaligus produk-produk Jepang bisa bersaing di pasar global. Contoh yang lebih berani, kalau bicara soal ini adalah China. Dan sekarang China sudah tumbuh ekonominya menyaingi Jepang dan bahkan Amerika. Jauh meninggalkan Indonesia yang di awal tahun 60-an kondisi ekonomi kedua negara itu hampir sama.

Jadi? Ya kalau Pak Gub mau merealisasikan mimpi tentang industrialisasinya, maka itulah yang harus dilaksanakan. Sehingga ‘affirmative policy’ itu punya dasar hukum yang jelas. Bukan kebijakan sporadis, seperti cerita minyak goreng, yang kemudian dikritisi habis-habisan oleh para pegiat ‘pasar bebas’ seperti kita baca di media.

Salah satu “oleh-oleh” yang saya petik selama menjadi birokrat di Pemda hampir sebelas tahun, yaitu. Negara ini sulit berkembang karena dikungkung oleh peraturan yang di buat sendiri. *Wallahu a’lambissawab.*